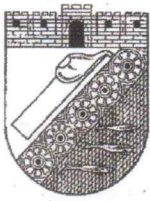




Pemerintah
Kota Pekalongan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mataram No.1 Kota Pekalongan Kode Pos 51111

Telp. (0285) 421042 Pos-el: inspektorat.kotapkl@gmail.com Laman: <https://inspektorat.pekalongankota.go.id/>

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Pekalongan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Pekalongan, 25 Maret 2025
Plt. INSPEKTUR
KOTA PEKALONGAN


SRI MULYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196710031997032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berpedoman pada ketentuan Pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.2.7/10582/OTDA, tanggal 24 Desember 2024 hal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah atas Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah serta Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan. Selain substansi tersebut, LPPD juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan LPPD Kota Pekalongan Tahun 2024. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan panduan dan pembinaan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dapat dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

Pekalongan, Maret 2025

**ACHMAD AEZAN ARSLAN DJUNAID, SE, MM**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... viii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 LATAR BELAKANG..... 1

1.1.1 Penjelasan Umum 1

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 27

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 161

a. Latar Belakang 161

b. Dasar Hukum..... 162

c. Kebijakan Umum 163

d. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 168

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 176

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO 176

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN..... 177

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil..... 178

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 185

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH 187

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN..... 281

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA..... 281

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA 281

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL..... 282

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN..... 282

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar 282

4.1.2. Target Pencapaian 282

4.1.3. Realisasi 286

4.1.4. Alokasi Anggaran 290

4.1.5. Dukungan Personil..... 291

4.1.6. Permasalahan dan Solusi 291

4.2. BIDANG KESEHATAN..... 292

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar 292

4.2.2. Target Pencapaian 293

4.2.3. Realisasi 308

4.2.4. Alokasi Anggaran 323

4.2.5. Dukungan Personil..... 324

4.2.6. Permasalahan dan Solusi 325

4.3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	326
4.3.1.	Jenis Pelayanan Dasar	326
4.3.2.	Target Pencapaian	326
4.3.3.	Realisasi	330
4.3.4.	Alokasi Anggaran	334
4.3.5.	Dukungan Personil	334
4.3.6.	Permasalahan dan Solusi	335
4.4.	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN.....	335
4.4.1.	Jenis Pelayanan Dasar	336
4.4.2.	Target Pencapaian	336
4.4.3.	Realisasi	337
4.4.4.	Alokasi Anggaran	340
4.4.5.	Dukungan Personil	341
4.4.6.	Permasalahan dan Solusi	341
4.5.	BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	342
1.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	342
1.4.2	Target Pencapaian	343
1.4.3	Realisasi	350
1.4.4	Alokasi Anggaran	355
1.4.5	Dukungan Personil	356
1.4.6	Permasalahan dan Solusi	357
4.6.	BIDANG URUSAN SOSIAL.....	359
1.4.7	Jenis Pelayanan Dasar	359
1.4.8	Target Pencapaian	360
1.4.9	Realisasi	379
1.4.10	Alokasi Anggaran	391
1.4.11	Dukungan Personil	392
1.4.12	Permasalahan dan Solusi	392
4.7.	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN.....	393
1.4.13	Bidang Urusan Pendidikan	393
1.4.14	Bidang Urusan Kesehatan	395
1.4.15	Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	398
1.4.16	Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	398
1.4.17	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	400
	SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.....	400
	SUB URUSAN BENCANA.....	401
	SUB URUSAN KEBAKARAN	402
1.4.18	Bidang Urusan Sosial	403
BAB V	PENUTUP	405

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan..... 2

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024..... 4

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024 5

Tabel 1. 4 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekalongan 5

Tabel 1. 5 Data Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum
Pembentukan Perangkat Daerah..... 6

Tabel 1. 6 Jumlah ASN Kota Pekalongan per Urusan Tahun 2024 13

Tabel 1. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 17

Tabel 1. 8 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 19

Tabel 1. 9 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja per Urusan Tahun 2024..... 20

Tabel 1. 10 Permasalahan Pembangunan Daerah..... 27

Tabel 1. 11 Program Unggulan Daerah Tahun 2021-2026 40

Tabel 1. 12 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun
2024..... 63

Tabel 1. 13 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024 164

Tabel 1. 14 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024 165

Tabel 1. 15 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024 165

Tabel 1. 16 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024 166

Tabel 1. 17 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024.....166

Tabel 1. 18 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran Tahun
2024.....167

Tabel 1. 19 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana
Tahun 2024.....167

Tabel 1. 20 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2024.....168

Tabel 1. 21 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 169

Tabel 1. 22 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....171

Tabel 1. 23 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 171

Tabel 1. 24 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman
Tahun 2024.....172

Tabel 1. 25 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun
2024.....173

Tabel 1. 26 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024 173

Tabel 1. 27 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024 174

Tabel 1. 28 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024 174

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro Kota Pekalongan 176

Tabel 2. 2 Indiaktor Kinerja Kunci Hasil.....178

Tabel 2. 3 Indiaktor Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 185

Tabel 2. 4 Pengukuran dengan Skala Ordinal.....187

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 188

Tabel 2. 6 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 189

Tabel 2. 7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya 191

Tabel 2. 8 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD 2026.....193

Tabel 2. 9 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.....195

Tabel 2. 10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1 196

Tabel 2. 11 Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan dengan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah 197

Tabel 2. 12 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024.....199

Tabel 2. 13 Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024 201

Tabel 2. 14 Kasus Kematian Balita dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024 203

Tabel 2. 15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2 204

Tabel 2. 16 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3 208

Tabel 2. 17 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024.....208

Tabel 2. 18 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4 211

Tabel 2. 19 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5 212

Tabel 2. 20 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6 216

Tabel 2. 21 Perbandingan Kategori Kota Layak Anak dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023.....216

Tabel 2. 22 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7 219

Tabel 2. 23 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 219

Tabel 2. 24 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8 224

Tabel 2. 25 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9 225

Tabel 2. 26 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10 228

Tabel 2. 27 Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....228

Tabel 2. 28 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11 229

Tabel 2. 29 Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 230

Tabel 2. 30 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12 231

Tabel 2. 31 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13 233

Tabel 2. 32 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 14 235

Tabel 2. 33 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15 236

Tabel 2. 34 Rekapitulasi Persentase Kondisi Jalan Tahun 2024 241

Tabel 2. 35 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 16 242

Tabel 2. 36 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....242

Tabel 2. 37 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 17 250

Tabel 2. 38 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 18 253

Tabel 2. 39 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 19 256

Tabel 2. 40 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....257

Tabel 2. 41 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 20 259

Tabel 2. 42 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 21 262

Tabel 2. 43 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 22 266

Tabel 2. 44 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2024.....266

Tabel 2. 45 Top 10 Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 266

Tabel 2. 46 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 23 272

Tabel 2. 47 Perbandingan Opini BPK Tahun 2023.....272

Tabel 2. 48 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 24 277

Tabel 4. 1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024
(Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023).....283

Tabel 4. 2 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 286

Tabel 4. 3 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2024 287

Tabel 4. 4 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 290

Tabel 4. 5 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 290

Tabel 4. 6 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 291

Tabel 4. 7 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024
.....291

Tabel 4. 8 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....293

Tabel 4. 9 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024.....308

Tabel 4. 10 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM
Bidang Kesehatan Tahun 2024 311

Tabel 4. 11 Total Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 322

Tabel 4. 12 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 323

Tabel 4. 13 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 324

Tabel 4. 14 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024
.....325

Tabel 4. 15 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024
.....327

Tabel 4. 16 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 330

Tabel 4. 17 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 331

Tabel 4. 18 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024.....334

Tabel 4. 19 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 334

Tabel 4. 20 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 334

Tabel 4. 21 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2024.....335

Tabel 4. 22 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
Permukiman dan Permukiman Tahun 2024.....336

Tabel 4. 23 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman
Tahun 2024.....338

Tabel 4. 24 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM
Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Tahun 2024 339

Tabel 4. 25 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan
Permukiman Tahun 2024.....340

Tabel 4. 26 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan
Permukiman Tahun 2024 340

Tabel 4. 27 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan
Permukiman Tahun 2024 341

Tabel 4. 28 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan
Permukiman Tahun 2024 341

Tabel 4. 29 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 343

Tabel 4. 30 Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat Tahun 2024 350

Tabel 4. 31 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 351

Tabel 4. 32 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....354

Tabel 4. 33 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.....355

Tabel 4. 34 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketentraman Umum Tahun 2024.....356

Tabel 4. 35 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Umum Sub Urusan Bencana Tahun 2024.....356

Tabel 4. 36 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024 357

Tabel 4. 37 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 357

Tabel 4. 38 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024 360

Tabel 4. 39 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....379

Tabel 4. 40 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....380

Tabel 4. 41 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....391

Tabel 4. 42 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....391

Tabel 4. 43 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024.....392

Tabel 4. 44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024 .392

Tabel 4. 45 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2024 393

Tabel 4. 46 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2024.....395

Tabel 4. 47 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 398

Tabel 4. 48 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 399

Tabel 4. 49 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketertiban Umum Tahun 2024 400

Tabel 4. 50 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024.....401

Tabel 4. 51 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024.....402

Tabel 4. 52 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024.....403

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administratif Kota Pekalongan..... 2

Gambar 1. 2 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan 3

Gambar 2. 1 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024 199

Gambar 2. 2 IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional.....213

Gambar 2. 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 - 2024 Kota Pekalongan.....260

Gambar 2. 4 Perbandingan Indeks Merit System dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.....263

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); dan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381).

b. Data Geografis Wilayah

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan sebesar 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 20 50' 42" s.d. 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" s.d. 109 42' 19" Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 – 518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah :

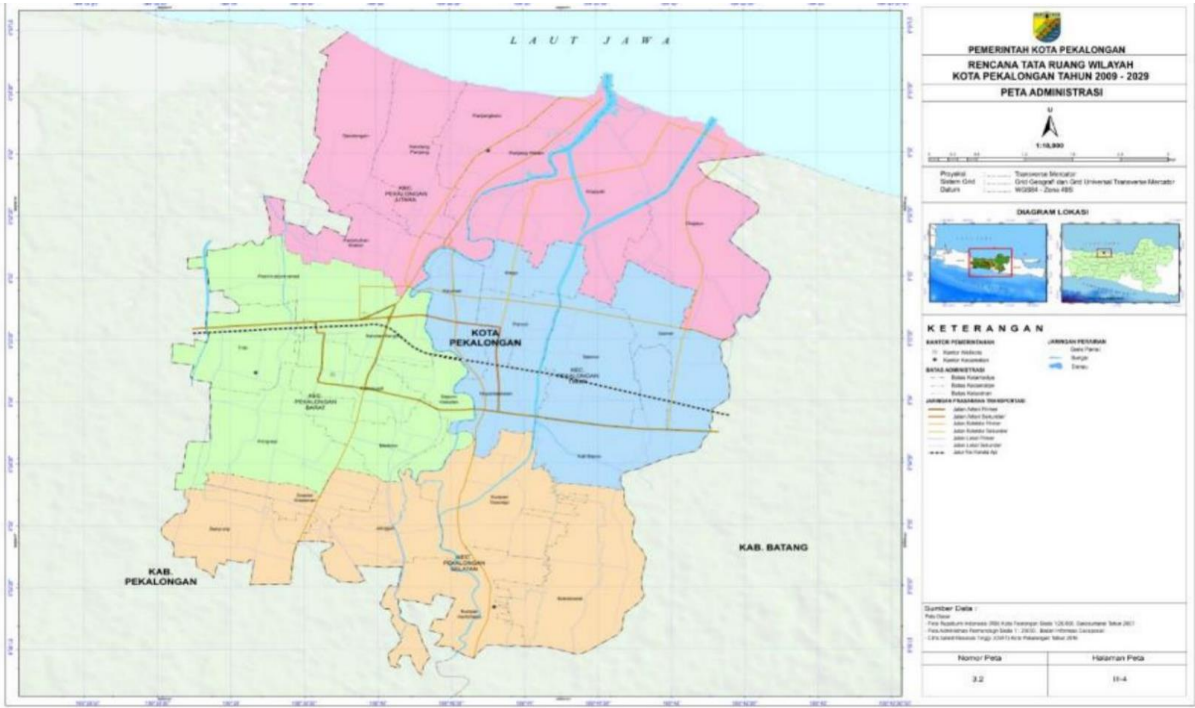
- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Batang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- Sebelah Barat : Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 Km² . Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km² . Perubahan ini dikarenakan adanya :

- a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009- 2029.
- b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi.
- c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis Pantai.

Jarak terjauh wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (yang diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien, serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peta administratif Kota Pekalongan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. 1 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

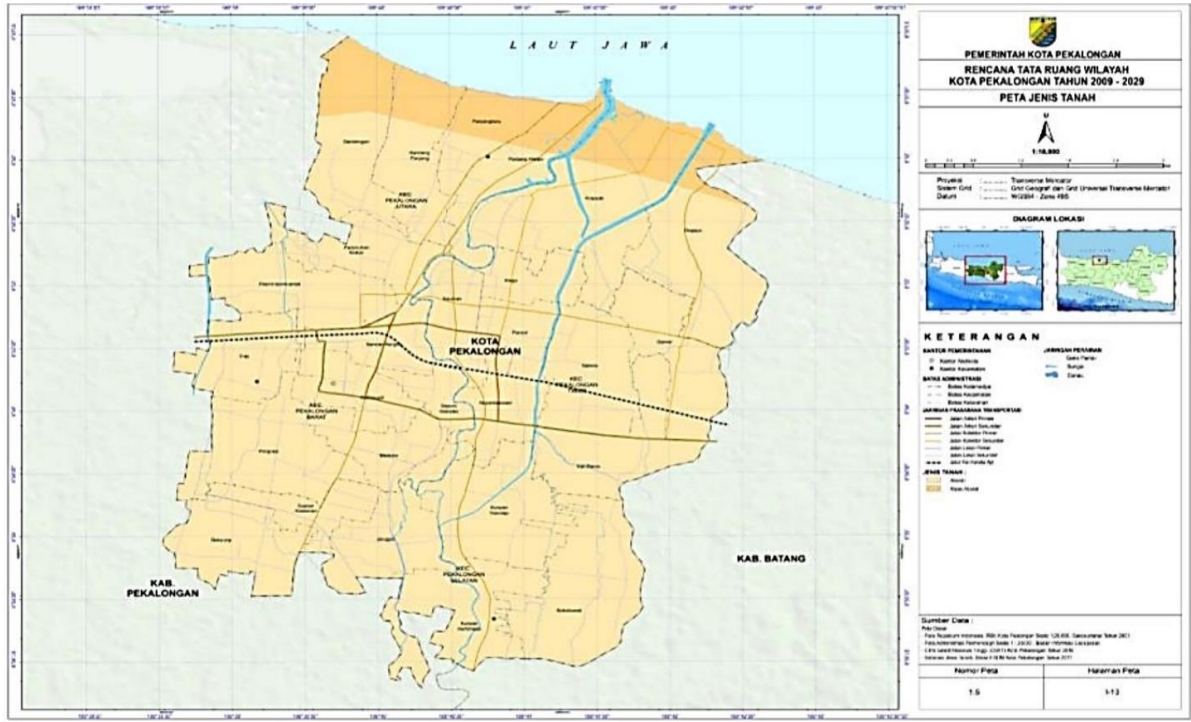
Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arah barat dan timur serta jalan ke arah selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel 1. 1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase Luas (%)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
Total		46,42	100

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Topografi dan jenis tanah secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 – 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8%. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengidentifikasi adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara signifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulangnya.



Gambar 1. 2 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2020

Wilayah yang sangat datar, kemudian terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (water run off) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial

kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

c. Informasi Umum Data Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah 318.221 jiwa, yang terdiri dari 161.308 jiwa laki-laki dan 156.913 jiwa Perempuan. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Pekalongan adalah 102,80. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 103 penduduk laki-laki.

Penduduk Kota Pekalongan terbesar ada di Kecamatan Pekalongan Barat, yaitu 97.017 jiwa dan paling sedikit ada di Kecamatan Pekalongan Utara yaitu sebanyak 68.537 jiwa. Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cukup tinggi yaitu 7.033 jiwa/km² , sehingga jika laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Pekalongan akan semakin padat.

Jumlah penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024 dan berdasarkan jenis kelaminnya, dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk					
		Laki-laki		Perempuan		Total	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1	Pekalongan Barat	49.109	30,44	47.908	30,53	97.017	30,49
2	Pekalongan Selatan	36.536	22,65	35.748	22,78	72.284	22,72
3	Pekalongan Timur	40.860	25,33	39.523	25,19	80.383	25,26
4	Pekalongan Utara	34.803	21,58	33.734	21,50	68.537	21,54
Jumlah		161.308	50,69	156.913	49,31	318.221	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, 2024.

Sedangkan jumlah penduduk Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2020 – 2024

KODE	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH PENDUDUK		RASIO JENIS KELAMIN
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN				
		n (Jiwa)	(%)	n (Jiwa)	(%)	n (Jiwa)	(%)	
337501	PEKALONGAN BARAT	49.109	15,43	47.908	15,05	97.017	30,49	102,51
337502	PEKALONGAN TIMUR	36.536	11,48	35.748	11,23	72.284	22,72	102,20
337503	PEKALONGAN UTARA	40.860	12,84	39.523	12,42	80.383	25,26	103,38
337504	PEKALONGAN SELATAN	34.803	10,94	33.734	10,6	68.537	21,54	103,17
3375	KOTA PEKALONGAN	161.308	50,69	156.913	49,31	318.221	100,00	102,80
	2023	161.082	50,65	156.876	49,35	317.958	100,00	102,63
	2022	160.527	50,55	156.406	49,45	316.933	100,00	102,22
	2021	159.843	50,57	156.373	49,43	316.216	100,00	102,29
	2020	159.846	50,50	156.273	49,50	316.119	100,00	102,01

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Kota Pekalongan terdiri dari 4 (empat) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan sebagaimana tercantum dalam tabel 1.4 :

Tabel 1. 4 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Kelurahan
1	Kecamatan Pekalongan Barat	1. Kelurahan Medono 2. Kelurahan Podosugih 3. Kelurahan Sapuro Kebulen 4. Kelurahan Bendan Kergon 5. Kelurahan Pasirkratonkramat 6. Kelurahan Tirto 7. Kelurahan Pringrejo
2	Kecamatan Pekalongan Timur	1. Kelurahan Noyontaansari 2. Kelurahan Kauman 3. Kelurahan Poncol 4. Kelurahan Klego 5. Kelurahan Gamer 6. Kelurahan Baros
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	1. Kelurahan Banyurip 2. Kelurahan Buaran Kradenan 3. Kelurahan Jenggot 4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo 5. Kelurahan Kuripan Yosorejo

		6. Kelurahan Sokoduwet
4	Kecamatan Pekalongan Utara	1. Kelurahan Krapyak 2. Kelurahan Kandang Panjang 3. Kelurahan Padukuhan Kraton 4. Kelurahan Degayu 5. Kelurahan Bandengan 6. Kelurahan Panjang Wetan 7. Kelurahan Panjang Baru

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada tabel 1.5.:

Tabel 1. 5 Data Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1.	Dinas Pendidikan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. 4 SPF TK	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 40.A Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
	b. 71 SPF SD	
	c. 17 SPF SMP	
	d. 1 SPNF Sanggar Kegiatan Belajar	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kota Pekalongan
2.	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. RSUD Bendan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C
	b. Puskesmas Bendan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 77 Tahun 2019 tentang Unit Pelaksana
	c. Puskesmas Kramatsari	

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	d. Puskesmas Tirto	Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Pekalongan
	e. Puskesmas Medono	
	f. Puskesmas Noyontaan	
	g. Puskesmas Tondano	
	h. Puskesmas Klego	
	i. Puskesmas Sokorejo	
	j. Puskesmas Dukuh	
	k. Puskesmas Krapyak Kidul	
	l. Puskesmas Kusuma Bangsa	
	m. Puskesmas Jenggot	
	n. Puskesmas Pekalongan Selatan	
	o. Puskesmas Buaran	
	p. UPTD Balai Pelayanan Dan Saintifikasi Jamu	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 53.A Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
	q. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
4.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
5.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
7.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
8.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	UPTD Balai Latihan Kerja	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
13.	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
14.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
15.	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	UPTD Metrologi Legal	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pekalongan
17.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. UPTD Museum Batik	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Batik pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
	b. UPTD Pantai Pasir Kencana Pekalongan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91B Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pantai Pasir Kencana Pekalongan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan
18.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
19.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. UPTD Tempat Pelelangan Ikan	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan
	b. UPTD Techno Park Perikanan	
20.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. Bagian Hukum	
	b. Bagian Pemerintahan	
	c. Bagian Organisasi	
	d. Bagian Perekonomian Dan SDA	
	e. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan	
	f. Bagian Kesejahteraan Rakyat	
	g. Bagian Umum	
	h. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	
	i. Sekretariat Daerah	
	j. Bagian Hukum	
21.	Sekretariat DPRD	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
23.	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
24.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
		Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
25.	Inspektorat Daerah	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
26.	Kecamatan Pekalongan Utara	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. Kelurahan Kandang Panjang	
	b. Kelurahan Panjang Wetan	
	c. Kelurahan Panjang Baru	
	d. Kelurahan Degayu	
	e. Kelurahan Bandengan	
	f. Kelurahan Krapyak	
	g. Kelurahan Padukuhan Kraton	
27.	Kecamatan Pekalongan Selatan	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. Kelurahan Jenggot	
	b. Kelurahan Buaran Kradenan	
	c. Kelurahan Kuripan Kertoharjo	
	d. Kelurahan Kuripan Yosorejo	
	e. Kelurahan Soko Duwet	
	f. Kelurahan Banyurip	
28.	Kecamatan Pekalongan Barat	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. Kelurahan Medono	
	b. Kelurahan Podosugih	
	c. Kelurahan Tirto	
	d. Kelurahan Sapuro Kebulen	
	e. Kelurahan Bendan Kergon	
	f. Kelurahan Pasirkratonkramat	
	g. Kelurahan Pringrejo	
29.	Kecamatan Pekalongan Timur	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan
	a. Kelurahan Kauman	
	b. Kelurahan Poncol	
	c. Kelurahan Klego	
	d. Kelurahan Gamer	
	e. Kelurahan Noyontaansari	

No.	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
	f. Kelurahan Setono	
	g. Kelurahan Kalibaros	
30.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, maka dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kota Pekalongan merupakan Sekretariat Daerah tipe B;
2. Sekretariat DPRD Kota Pekalongan merupakan Sekretariat DPRD tipe C;
3. Inspektorat Daerah Kota Pekalongan merupakan Inspektorat Daerah tipe B;
4. Dinas Daerah Kota Pekalongan, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, permukiman dan bidang pertanahan;
 - e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan dan tenaga kerja;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. Dinas Pertanian dan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - i. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. Dinas Perhubungan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - l. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika , bidang persandian dan bidang statistik;
 - m. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;

- o. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kebudayaan, dan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
 - q. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - r. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.
5. Badan Daerah Kota Pekalongan, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Pengembangan Daerah tipe A adalah unsur penunjang yang melaksanakan tugas fungsi perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
 - b. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah tipe A adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tipe B adalah unsur penunjang yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang kepegawaian, serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas kecil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah, juga terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi Bersifat Fungsional, yang memberikan layanan secara professional. Sebagai unit organisasi bersifat khusus, Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

f. Rincian Aparatur Negara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Berada di Setiap Perangkat Daerah.

Adapun jumlah ASN Kota Pekalongan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 3.179 orang, yang berdasarkan urusan pemerintahan daerah dirinci sebagai berikut:

Tabel 1. 6 Jumlah ASN Kota Pekalongan per Urusan Tahun 2024

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Dinas Pendidikan	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan	17	1278	31	1.326
2.	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	10	440	23	473
3.	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang	8	19	30	57

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				
4.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	6	5	7	18
5.	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	11	12	17	40
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	3	5	13
7.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial	6	2	7	15
8.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	22	4	30
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1	2	2	5
10.	Dinas Pertanian Dan Pangan	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	7	22	11	40
11.	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	1	0	1	2
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	6	12	80	98
13.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7	11	10	28
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4	3	6	13
15.	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1	0	2	3
16.	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	10	7	21	38
17.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	7	12	5	24
18.	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	1	3	1	5
19.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	3	6	11	20

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
20.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	1	1	3	5
21.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	0	2
22.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	2	4
23.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	2	2	7
24.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1	2	1	4
25.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3	3	3	9
26.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	10	6	9	25
27.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	7	4	6	17
28.	Dinas Pertanian Dan Pangan	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	22	11	40
29.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	8	4	42	54
30.	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	5	4	6	15
31.	Sekretariat Daerah	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	21	28	58	107
32.	Sekretariat DPRD	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	6	4	13	23
33.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan	1	0	0	1
34.	Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan	23	6	27	56
35.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian	6	10	6	22
36.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan Dan Pelatihan	1	3	3	7

No.	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
37.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian Dan Pengembangan	9	14	8	31
38.	Inspektorat Daerah	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6	26	4	36
39.	Kecamatan Pekalongan Utara	Unsur Kewilayahan	34	1	25	60
40.	Kecamatan Pekalongan Selatan	Unsur Kewilayahan	28	1	24	53
41.	Kecamatan Pekalongan Barat	Unsur Kewilayahan	33	1	29	63
42.	Kecamatan Pekalongan Timur	Unsur Kewilayahan	31	1	28	60

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2024

Upaya lain yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari sistem merit antara lain :

- a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur yang berkelanjutan;
- b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan merata;
- c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
- d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
- e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
- f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
- g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, pelaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
- h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
- i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
- j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
- k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
- l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Sedangkan indikator yang digunakan dalam pengukuran indeks penerapan sistem merit menurut Pasal 134 Ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 yaitu :

- Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan;
- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;

- Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.
- Menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja.
- Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang;
- Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN.
- Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan.

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam sturuktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap Pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dari dana PAD.

Pendapatan Daerah Kota Pekalongan yang ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.011.567.413.000,00 (satu triliun sebelas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.016.321.692.109,00 (satu triliun enam belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus sembilan rupiah) atau 100,47% dari target perubahan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,18% atau sebesar Rp12.109.091.365,00 (dua belas miliar seratus sembilan juta sembilan puluh satu ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah). Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 7 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024

URAIAN	APBD TA. 2024 (Perubahan)	REALISASI			PERTUM BUHAN (%)
		2024 Unaudited	%	2023	
PENDAPATAN DAERAH	1.011.567.413.000,00	1.016.321.692.109,00	100,47	1.028.430.783.474,00	-1,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	264.890.216.000,00	271.121.330.933,00	102,35	263.355.736.830,00	2,95
Pajak Daerah	107.200.000.000,00	111.866.942.211,00	104,35	115.437.057.778,00	-3,09
Pajak Reklame	3.200.000.000,00	3.243.742.658,00	101,37	2.097.207.502,00	54,67
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	20.950.000.000,00	21.485.912.642,00	102,56	19.683.495.153,00	0,00
PBJT-Tenaga Listrik	28.650.000.000,00	29.280.022.086,00	102,20	27.354.171.715,00	0,00
PBJT-Perhotelan	7.000.000.000,00	6.370.886.122,00	91,01	6.969.164.821,00	0,00
PBJT-Jasa Parkir	1.000.000.000,00	808.314.961,00	80,83	1.180.418.842,00	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	3.500.000.000,00	3.298.599.892,00	94,25	4.800.844.303,00	0,00

URAIAN	APBD TA. 2024 (Perubahan)	REALISASI			PERTUM BUHAN (%)
		2024 Unaudited	%	2023	
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	0,00	178.168.500,00	100,00	0,00	0,00
Pajak Air Tanah	2.200.000.000,00	2.441.286.486,00	110,97	2.604.348.300,00	-6,26
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.500.000.000,00	15.879.324.777,00	102,45	16.268.407.418,00	-2,39
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	25.200.000.000,00	28.880.684.087,00	114,61	34.478.999.724,00	-16,24
Retribusi Daerah	142.657.055.000,00	146.661.802.644,00	102,81	16.704.861.471,00	777,96
Retribusi Jasa Umum	127.826.193.000,00	132.971.231.279,00	104,03	5.360.026.648,00	2.380,79
Retribusi Jasa Usaha	14.028.862.000,00	12.161.720.569,00	86,69	10.500.956.872,00	15,82
Retribusi Perijinan Tertentu	802.000.000,00	1.528.850.796,00	190,63	843.877.951,00	81,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.197.536.000,00	7.197.597.251,00	102,99	7.117.204.338,00	15,93
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	7.197.536.000,00	7.197.597.251,00	100,00	7.117.204.338,00	1,13
Lain-lain PAD yang Sah	7.835.625.000,00	5.394.988.827,00	68,85	124.096.613.243,00	-95,65
Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	1.082.500.000,00	983.983.850,00	90,90	746.489.168,00	31,81
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	550.000.000,00	601.341.565,00	109,33	1.556.732.386,00	-61,37
Jasa Giro	2.174.000.000,00	945.103.669,00	43,47	1.236.960.852,00	-23,59
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir			0,00	0,00	#DIV/0!
Pendapatan Bunga	2.507.000.000,00	910.775.742,00	36,33	1.150.991.182,00	-20,87
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan	15.000.000,00	8.700.000,00	58,00	84.405.000,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	79.626.552,00	79,63	106.703.370,00	-25,38
Pendapatan Denda Pajak	500.000.000,00	312.852.172,00	62,57	424.843.743,00	-26,36
Pendapatan Denda Retribusi	2.700.000,00	50.174.310,00	1.858,31	1.087.000,00	4.515,85
Pendapatan dari Pengembalian	795.000.000,00	482.329.793,00	60,67	510.922.379,00	-5,60
Pendapatan BLUD	103.425.000,00	1.012.948.728,00	979,40	118.272.877.184,00	-99,14
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	6.000.000,00	7.152.446,00	0,00	4.600.979,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	746.677.197.000,00	745.200.361.176,00	99,80	763.287.046.644,00	-2,37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	643.685.175.000,00	650.085.108.490,00	100,99	667.941.862.118,00	-2,67
Dana Perimbangan	637.645.063.000,00	644.044.996.490,00	101,00	646.663.283.118,00	-0,40
Dana Bagi Hasil	31.209.351.000,00	30.923.429.300,00	99,08	33.443.093.969,00	-7,53
Dana Alokasi Umum (DAU)	468.978.068.000,00	476.430.586.000,00	101,59	451.200.064.000,00	5,59
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	33.996.929.000,00	34.474.175.227,00	101,40	52.410.414.846,00	-34,22
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	103.460.715.000,00	102.216.805.963,00	98,80	109.609.710.303,00	-6,74
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	21.278.579.000,00	-100,00
Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	21.278.579.000,00	-100,00
Insentif Fiskal	6.040.112.000,00	6.040.112.000,00	100,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal	6.040.112.000,00	6.040.112.000,00	100,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	102.992.022.000,00	95.115.252.686,00	92,35	95.345.184.526,00	-0,24
Pendapatan Bagi Hasil	82.064.551.000,00	74.727.559.186,00	91,06	72.883.759.926,00	2,53
Bantuan Keuangan	20.927.471.000,00	20.387.693.500,00	97,42	22.461.424.600,00	-9,23
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	1.788.000.000,00	100,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.788.000.000,00	100,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	1.788.000.000,00	100,00

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Belanja Daerah dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp1.074.231.528.000,00 (satu triliun tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.012.991.724.934,00 (satu triliun dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah) atau 94,30% dari anggaran perubahan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi belanja daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,83% atau sebesar Rp18.855.847.770,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah). Realisasi belanja daerah tahun 2024 dapat disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 8 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

URAIAN	APBD TA. 2024 (Perubahan)	REALISASI			PERTUM BUHAN (%)
		2024 Unaudited	%	2023	
BELANJA DAERAH	1.074.180.623.000,00	1.012.991.724.934,00	94,30	1.031.847.572.704,00	-1,83
BELANJA OPERASI	946.765.457.000,00	891.029.007.820,00	94,11	858.205.172.245,00	3,82
Belanja Pegawai	432.686.275.000,00	403.864.630.837,00	93,34	380.545.140.291,00	6,13
Belanja Barang dan Jasa	469.523.967.000,00	444.343.004.432,00	94,64	431.075.384.481,00	3,08
Belanja Hibah	42.218.643.000,00	41.171.575.629,00	97,52	44.257.036.973,00	-6,97
Belanja Bantuan Sosial	2.336.572.000,00	1.649.796.922,00	70,61	2.327.610.500,00	-29,12
BELANJA MODAL	123.315.166.000,00	119.315.357.114,00	96,76	170.653.380.598,00	-30,08
Belanja Tanah	953.730.000,00	479.100.343,00	50,23	3.036.176.608,00	-84,22
Belanja Peralatan dan Mesin	26.903.876.000,00	25.882.047.648,00	96,20	38.881.456.772,00	-33,43
Belanja Bangunan dan Gedung	23.061.916.000,00	22.491.212.461,00	97,53	54.122.619.156,00	-58,44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.037.190.000,00	68.057.605.746,00	97,17	72.047.095.943,00	-5,54
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.358.454.000,00	2.357.002.700,00	99,94	2.566.032.119,00	-8,15
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	50.905.000,00	48.388.216,00			
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.100.000.000,00	2.647.360.000,00	0,00	2.989.019.861,00	-11,43
Belanja Tidak Terduga	4.100.000.000,00	2.647.360.000,00	64,57	2.989.019.861,00	-11,43

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan belanja daerah antara lain :

1. Permasalahan

Secara umum pelaksanaan belanja terkait penatausahaan daerah tidak ada kendala yang berarti, hanya penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan keuangan masih belum berjalan dengan baik

2. Solusi

Perlunya koordinasi secara intensif antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Dalam Negeri selaku penyedia aplikasi.

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 9 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja per Urusan Tahun 2024

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
A.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	642.708.347.000	611.971.452.482
1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	242.896.049.000	231.201.593.789
	Dinas Pendidikan	242.896.049.000	231.201.593.789
2.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	260.645.813.000	250.227.523.245
	Dinas Kesehatan	114.592.355.000	109.431.803.805
	RSUD Bendan	111.955.118.000	109.510.936.834
	Puskesmas Bendan	3.530.529.000	3.324.935.328
	Puskesmas Kramatsari	1.847.222.000	1.714.514.335
	Puskesmas Tirto	2.497.654.000	2.315.703.121
	Puskesmas Medono	2.108.729.000	1.857.163.242
	Puskesmas Noyontaan	1.784.848.000	1.621.880.314
	Puskesmas Tondano	2.000.017.000	1.806.248.167
	Puskesmas Klego	1.987.034.000	1.847.074.296
	Puskesmas Sokorejo	2.580.957.000	2.410.444.066
	Puskesmas Dukuh	1.994.854.000	1.850.250.971
	Puskesmas Krapyak Kidul	2.364.201.000	2.202.687.134
	Puskesmas Kusuma Bangsa	3.138.468.000	2.813.709.051

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Puskesmas Jenggot	2.442.802.000	2.191.088.142
	Puskesmas Pekalongan Selatan	3.208.865.000	2.972.547.953
	Puskesmas Buaran	2.168.845.000	1.948.589.238
	Balai Pelayanan dan Sainifikasi Jamu	443.315.000	407.947.248
3.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	69.646.480.000	63.604.211.018
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69.646.480.000	63.604.211.018
4.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	43.932.412.000	42.612.900.539
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	43.932.412.000	42.612.900.539
5.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.255.093.000	16.578.278.496
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.157.628.000	12.720.482.844
6.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.332.500.000	7.746.945.395
	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.332.500.000	7.746.945.395
B.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	130.234.018.000	123.672.669.377
7.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.915.065.000	4.490.020.495
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.915.065.000	4.490.020.495
8.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	711.420.000	643.502.762
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	711.420.000	643.502.762
9.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	549.650.000	542.660.186
	Dinas Pertanian dan Pangan	549.650.000	542.660.186

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	922.818.000	411.540.778
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	922.818.000	411.540.778
11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	32.591.270.000	31.206.436.263
	Dinas Lingkungan Hidup	32.591.270.000	31.206.436.263
12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.512.455.000	5.095.608.526
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.512.455.000	5.095.608.526
13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.181.448.000	5.758.681.038
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	6.181.448.000	5.758.681.038
14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.128.416.000	3.882.278.415
	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.128.416.000	3.882.278.415
15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.020.652.000	30.113.699.242
	Dinas Perhubungan	31.020.652.000	30.113.699.242
16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.925.524.000	13.467.504.403
	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.925.524.000	13.467.504.403
17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.670.372.000	1.593.408.103
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.670.372.000	1.593.408.103
18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6.448.253.000	5.606.010.422
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.448.253.000	5.606.010.422
19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.448.253.000	5.606.010.422

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	6.448.253.000	5.606.010.422
20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	12.033.385.000	11.868.183.092
	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.033.385.000	11.868.183.092
21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	115.500.000	112.589.135
	Dinas Komunikasi dan Informatika	115.500.000	112.589.135
22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.199.825.000	4.142.668.446
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.199.825.000	4.142.668.446
23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	936.762.000	930.598.984
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	936.762.000	930.598.984
24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.218.523.000	3.666.916.587
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.218.523.000	3.666.916.587
C.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	54.100.135.000	50.200.644.436
25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	8.979.844.000	8.483.846.405
	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.979.844.000	8.483.846.405
26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	12.057.258.000	11.238.560.707
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	12.057.258.000	11.238.560.707
27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	7.472.015.000	6.823.325.795
	Dinas Pertanian dan Pangan	7.472.015.000	6.823.325.795

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
28.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	17.671.138.000	16.566.407.281
	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.671.138.000	16.566.407.281
29.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.919.880.000	7.088.504.248
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.919.880.000	7.088.504.248
D.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	125.129.180.000	115.519.928.758
30.	SEKRETARIAT DAERAH	57.117.893.000	53.494.232.986
	Sekretariat Daerah	14.723.886.000	13.733.389.637
	Bagian Hukum	691.807.000	537.468.124
	Bagian Pemerintahan	702.223.000	555.259.275
	Bagian Organisasi	327.453.000	321.151.663
	Bagian Perekonomian Dan SDA	356.263.000	343.355.085
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan	647.186.000	618.106.319
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	18.097.329.000	17.245.327.407
	Bagian Umum	20.089.416.000	18.672.651.580
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.482.330.000	1.467.523.896
31.	SEKRETARIAT DPRD	68.011.287.000	62.025.695.772
	Sekretariat DPRD	68.011.287.000	62.025.695.772
E.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	43.750.368.000	37.478.134.943
32.	PERENCANAAN	6.758.699.000	6.189.474.329
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.758.699.000	6.189.474.329

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
33.	KEUANGAN	27.028.420.000	24.397.858.811
	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	27.028.420.000	24.397.858.811
34.	KEPEGAWAIAN	7.695.527.000	5.119.470.369
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.695.527.000	5.119.470.369
35.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.579.392.000	1.107.330.800
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
36.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.579.392.000	1.107.330.800
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	688.330.000	664.000.634
F.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.849.707.000	6.386.814.430
37.	INSPEKTORAT DAERAH	6.849.707.000	6.386.814.430
	Inspektorat Daerah	6.849.707.000	6.386.814.430
G.	UNSUR KEWILAYAHAN	54.514.884.000	51.401.955.498
38.	KECAMATAN	54.514.884.000	51.401.955.498
39.	Kecamatan Pekalongan Utara	10.802.728.000	10.154.353.050
40.	Kecamatan Pekalongan Selatan	9.093.363.000	8.451.096.344
41.	Kecamatan Pekalongan Barat	9.854.556.000	9.303.321.398
42.	Kecamatan Pekalongan Timur	11.084.321.000	10.245.339.874
	Kelurahan Kandang Panjang	513.041.000	502.988.040
	Kelurahan Panjang Wetan	536.617.000	522.908.540
	Kelurahan Degayu	408.505.000	397.252.640

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Kelurahan Bandengan	352.247.000	350.886.840
	Kelurahan Krapyak	761.293.000	740.502.040
	Kelurahan Padukuhan Kraton	521.599.000	513.603.040
	Kelurahan Jenggot	473.932.000	455.325.040
	Kelurahan Buaran Kradenan	445.517.000	432.589.640
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	366.739.000	353.988.040
	Kelurahan Kuripan Yosorejo	470.742.000	466.065.615
	Kelurahan Soko Duwet	410.441.000	393.301.104
	Kelurahan Medono	572.210.000	553.244.200
	Kelurahan Podosugih	426.867.000	415.946.985
	Kelurahan Tirto	493.681.000	471.728.640
	Kelurahan Sapuro Kebulen	490.749.000	480.136.890
	Kelurahan Bendan Kergon	638.169.000	574.460.140
	Kelurahan Pasirkratonkramat	636.631.000	600.664.488
	Kelurahan Kauman	587.347.000	579.163.640
	Kelurahan Poncol	631.383.000	608.465.770
	Kelurahan Klego	460.272.000	440.602.640
	Kelurahan Gamer	372.227.000	357.733.940
	Kelurahan Noyontaansari	550.787.000	540.864.450
	Kelurahan Setono	516.024.000	515.663.640
	Kelurahan Kalibaros	419.734.000	399.432.540

No.	Urusan Pemerintahan Daerah	Alokasi Anggaran Belanja	Realisasi Belanja
	Kelurahan Pringrejo	616.605.000	599.778.540
	Kelurahan Panjang Baru	561.291.000	553.460.240
	Kelurahan Banyurip	445.266.000	427.087.510
H.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	16.944.889.000	16.360.125.010
43.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	16.944.889.000	16.360.125.010
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.944.889.000	16.360.125.010

Sumber : BPKAD Kota Pekalongan, 2024

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah juga dapat diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.10 dibawah ini

Tabel 1. 10 Permasalahan Pembangunan Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Masih rendahnya capaian SPM pendidikan
	Belum optimalnya kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas
	Masih rendahnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Masih rendahnya jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Belum optimalnya RS Rujukan tingkat kota yang terakreditasi
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek
	Belum optimalnya tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan
	Belum optimalnya sarana farmasi yang memenuhi standar

	Masih rendahnya jumlah produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran
	Masih rendahnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
	Masih rendahnya jumlah rumah tangga sehat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum optimalnya sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik
	Masih rendahnya cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah
	Masih rendahnya ketersediaan sarana persampahan regional
	Masih rendahnya persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
	Masih rendahnya rasio kepatuhan PBG Kab/Kota
	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan
	Masih rendahnya rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Masih rendahnya ketersediaan rumah layak huni
	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh
	Masih rendahnya kawasan permukiman tidak kumuh
	Masih rendahnya jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Masih rendahnya persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
	Masih rendahnya persentase korban bencana alam yang ditangani
	Belum optimalnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Masih rendahnya persentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
	Masih rendahnya persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
	Masih rendahnya persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial
	Belum optimalnya korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial
	Belum optimalnya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Masih rendahnya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
	Masih rendahnya persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota

	Belum optimalnya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Masih rendahnya persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Masih tingginya rasio kekerasan terhadap perempuan
	Masih rendahnya persentase kelurahan layak anak
	Belum optimalnya pengaduan kasus anak yang terlayani
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Masih rendahnya persentase cadangan pangan daerah
	Belum optimalnya kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan
	Belum optimalnya pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya permasalahan pertanahan yang tertangani
	Belum optimalnya tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Belum tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya pengolahan limbah
	Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau
	Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan
	Masih tingginya jumlah usaha/kegiatan yang belum memenuhi syarat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH
	Belum optimalnya masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup
	Belum adanya perolehan penghargaan bidang LH
	Belum optimalnya tindaklanjut atas pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat
	Belum optimalnya pengelolaan sampah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Masih rendahnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Masih rendahnya jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Masih rendahnya ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan
	Belum optimalnya kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang
	Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga
	Masih tingginya angka perkawinan di bawah 21 tahun
	Masih tingginya unmeet need KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Masih rendahnya ketersediaan fasilitas LLAJ
	Belum optimalnya kinerja lalu lintas Kab/Kota
	Masih rendahnya jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum optimalnya penyelesaian permohonan informasi publik
	Belum tercapainya Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
	Masih rendahnya persentase koperasi yang mengikuti pelatihan
	Masih rendahnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum tersedianya peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
	Belum optimalnya penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
	Masih rendahnya penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal
	Masih rendahnya nilai investasi baru pertahun
	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintergrasi pada tingkat daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Masih rendahnya pembinaan organisasi kepemudaan
	Masih rendahnya ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Masih rendahnya Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum adanya sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum adanya event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan
	Masih rendahnya persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi
	Belum optimalnya pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya
	Masih rendahnya pelestarian cagar budaya
	Masih rendahnya jumlah pengunjung museum batik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya pengunjung perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Belum optimalnya nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik
	Belum tersedianya arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional
	Masih rendahnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Masih rendahnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Masih rendahnya peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI
	Masih rendahnya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI

	Masih rendahnya peningkatan produksi perikanan budidaya
	Masih rendahnya peningkatan jumlah pengusaha perikanan
	Masih rendahnya jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
	Belum optimalnya pertumbuhan jumlah wisatawan domestik
	Belum optimalnya pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi
	Masih rendahnya persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih rendahnya nilai produksi pertanian pertahun
	Masih rendahnya nilai produksi peternakan pertahun
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian
	Masih tingginya kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular
	Masih rendahnya pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Masih rendahnya persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
	Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Masih rendahnya persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko
	Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya pemantauan terhadap obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Masih rendahnya persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
	Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Belum optimalnya penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu

	Masih rendahnya persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif
	Masih rendahnya capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat
	Belum optimalnya kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan,
	Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan
	Masih tingginya deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
	Masih rendahnya persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa
SEKRETARIAT DPRD	Masih rendahnya persentase Perda yang ditetapkan
	Belum tercapainya pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya dokumen perencanaan tepat waktu
	Belum tercapainya ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu
	Belum optimalnya penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu
	Belum tersedianya dokumen perencanaan bidang Pemsosbud
	Belum tercapainya ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian
	Belum tercapainya dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah
KEUANGAN	Masih tingginya rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
	Belum optimalnya Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan)
	Belum optimalnya realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya PNS yang berkembang karier
	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN
	Belum optimalnya keterisian jabatan
	Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Masih rendahnya PNS yang berkembang kompetensinya
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Masih rendahnya hasil litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD
	Masih rendahnya tingkat pemberdayaan stakeholder kelitbangan
	Belum optimalnya Skor Capaian Nilai RiDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Masih rendahnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
	Belum optimalnya level kapabilitas APIP
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Masih rendahnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik di wilayah utara

	Masih rendahnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan
	Masih rendahnya tingkat pemberdayaan masyarakat di kelurahan
	Masih rendahnya tingkat kinerja trantibum
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum optimalnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan
	Belum optimalnya parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik
	Masih rendahnya persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan
	Masih rendahnya persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
	Belum optimalnya penanganan kejadian terkait konflik sosial
Non Urusan	
Non Urusan	Masih rendahnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD
	Masih rendahnya ketersediaan laporan capaian kinerja
	Masih rendahnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Masih rendahnya persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2022

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021 – 2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan **Tahta Untuk Rakyat** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberi penjelasan.

1) Gambaran Kota Pekalongan

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2016–2021 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *branch image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu – waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih dan menghasilkan limbah yang cukup banyak. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk meng-eksploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri. Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 – 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi

sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan berkurang secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

2) Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005- 2025. Oleh karena itu, pemaknaan sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipasi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta penargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3) Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

4) Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJP-D Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJP-D yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang agamis, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlakul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

2. Misi Kepala Daerah

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan diatas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian Ibu, Bayi dan Balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan aktif dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Pendidikan.

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan Teknologi Informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3) Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman.

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadai.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4) Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota Yang Berkelanjutan.

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau land subsidence. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat.

Pembangunan – pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu Optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan sasaran meliputi : menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya tutupan hutan/RTH, dan Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Dasar, dengan sasaran meliputi : Optimalnya layanan air minum, Optimalnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan, dan Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan.

5) Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal.

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini

adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6) Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah.

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi Sedekah Laut (Nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan Islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujudkan melalui upaya mendorong peningkatan intensitas event budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Goods Governance* dan *Clean Government*.

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Unggulan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang merupakan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 11 Program Unggulan Daerah Tahun 2021-2026

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Pelaksana
1	Jaminan akses layanan kesehatan bagi setiap warga;	Program ini dilakukan sebagai upaya dalam rangka pencapaian Universal Health Coverage, serta optimalisasi peran Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	- Pemberian Jaminan Kesehatan bagi masyarakat. - Validasi - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan memberdayakan fasilitator di tingkat kelurahan.	Pengampu Urusan Kesehatan
2	Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, manula dan kelompok rentan lain)	Program ini dilakukan dalam upaya peningkatan layanan kesehatan promotif dan preventif bagi kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil, manula dan kelompok rentan lain)	Penambahan jumlah Puskesmas dalam rangka peningkatan upaya promotif dan preventif dengan mendekatkan layanan kesehatan bagi masyarakat	Pengampu Urusan Kesehatan
3	Jaminan akses pendidikan bagi setiap warga	Program ini dilakukan dalam rangka menjamin akses pendidikan masyarakat dan menaikkan angka Rata-Rata Lama Sekolah sebagai komposit indeks pembangunan manusia	Pemberian beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan perguruan tinggi yang tidak mampu dan atau berprestasi	Pengampu Urusan Pendidikan
4	Memberikan fasilitasi kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas warga	Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas masyarakat, dengan memberikan fasilitasi bagi lembaga pendidikan keagamaan	Pemberian fasilitasi sarana transportasi bagi lembaga Pendidikan keagamaan.	- Sekretariat Daerah - Pengampu Fungsi Keuangan
5	Membangun sistem database infrastruktur permukiman;	Program ini dilakukan dalam upaya digitalisasi database infrastruktur permukiman, sebagai dasar pemberian layanan infrastruktur perumahan dan permukiman	Pembangunan aplikasi android database infrastruktur permukiman berbasis RT	- Pengampu Urusan Perumahan dan Permukiman. - Pengampu urusan Komunikasi dan Informatika
6	Membangun sistem pengelolaan sampah dan limbah di tingkat permukiman dan kota	Program ini dilakukan dalam upaya mengurangi sampah pada sumber sampah sehingga meminimalisir sampah yang dibawa ke TPA.	- Revitalisasi TPS3R (pengadaan sarpras TPS3R, pendampingan dan movev. - Peningkatan peran tokoh agama tentang kesadaran mengelola sampah mandiri. - Pemberian edukasi oleh Wali Kota & Forkompinda mengenai "tidak membuang sampah di sungai" dengan menyusuri sungai	Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
7	Penanganan rob dan banjir	Program ini dilakukan dalam upaya penanganan rob dan banjir melalui sinkronisasi program pusat, provinsi dan Kota Pekalongan	Pembangunan stasiun pompa, rehab stasiun pompa, operasional stasiun pompa	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Menata dan menambah jumlah ruang publik untuk kegiatan kreativitas dan kegiatan rekreasi warga	Program ini dilakukan dalam upaya memberikan ruang publik bagi kegiatan kreatif dan rekreasi warga Kota Pekalongan.	- Penataan ruang publik agar lebih instagramable, ramah difabel dan ramah lingkungan. - Penataan Monumen dengan sentuhan Artistik) - Penambahan ruang publik di wilayah Pekalongan selatan	- Pengampu Urusan Pariwisata. - Pengampu Urusan Kebudayaan, dan - Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
9	Menambah sarana olahraga dan kesenian;	Program ini dilakukan dalam upaya memberikan sarana olahraga dan kegiatan seni budaya masyarakat Kota Pekalongan secara merata.	- Pembangunan sport center. - Pengadaan pelataran-pelataran untuk kegiatan kesenian di tiap wilayah kecamatan dengan memberdayakan pemuda/karang taruna	- Pengampu Urusan Pemuda dan Olah Raga. - Pengampu Urusan Kebudayaan

10	Menambah jumlah pasar tradisional dengan konsep modern;	Program ini dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pasar tradisional bagi warga Kota Pekalongan secara merata	Pembangunan pasar tradisional berkonsep modern pada tiap kecamatan	Pengampu Urusan Perdagangan
11	Membangun ekonomi kreatif dan digitalpreneurship bagi kalangan muda;	Program ini dilakukan dalam rangka peningkatan pemasaran produk ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media social	- Meningkatkan/ memperluas pasar UMKM agar mengenal penjualan secara online. - Mengenalkan bisnis digital ke kalangan muda (konten kreatif melalui media sosial). - Mengenalkan ekonomi kreatif (meningkatkan harga jual produk dengan kreatifitas pada kemasan, pada promosi)	- Pengampu Urusan Perdagangan. - Pengampu Urusan Koperasi-UKM - Pengampu Urusan Perindustrian. - Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
12	Penyediaan jaringan internet gratis;	Program ini dilakukan dalam rangka penyediaan internet gratis bagi masyarakat Kota Pekalongan	Pengadaan access point di tiap kelurahan	Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
13	Penataan kawasan pedagang kaki lima sebagai pusat <i>street food</i>	Program ini dilakukan dalam rangka penataan kawasan pedagang kaki lima dengan konsep modern sekaligus sebagai destinasi wisata kuliner	Pembangunan satu kawasan <i>street food street food</i>	- Pengampu Urusan Perdagangan - Pengampu Urusan Pariwisata
14	Mengembangkan kegiatan wisata religius dan kegiatan wisata lain;	Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan destinasi wisata religious	Penataan akses jalan pada tempat wisata religius makam Sapuro, meliputi ruas Jalan Irian dan Jalan Madura	Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Mengembangkan Pekalongan sebagai pusat kuliner pesisir;	Program ini dilakukan dalam rangka mengenalkan makanan khas Kota Pekalongan kepada wisatawan	Pengelenggaraan festival kuliner khas Kota Pekalongan	Pengampu Urusan Koperasi-UKM
16	Peningkatan kesejahteraan guru madrasah, sekolah swasta, TPQ, madrasah diniyah dan pondok pesantren	Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas dan religiusitas masyarakat, dengan memberikan fasilitasi bagi pelaku pendidikan keagamaan	Fasilitasi bagi takmir masjid, takmir mushola, guru ngaji non formal, lebe non PNS, guru TPQ, dan guru madrasah diniyah	Sekretariat Daerah
17	Peningkatan kesejahteraan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kompetensi dan kinerja	Program ini dilakukan dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan publik	Peningkatan kesejahteraan bagi SDM Pemerintah Kota Pekalongan berdasarkan kompetensi dan kinerja	- Pengampu Fungsi Keuangan - Pengampu Fungsi Kepegawaian

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan, 2021

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan rencana program pembangunan daerah yang menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Program Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Program Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan.

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan partisipasi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal/kesetaraan, pengelolaan pendidikan, peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase capaian SPM pendidikan sebesar 100 persen.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 92 Persen, Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) sebesar 100 Persen, persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 90 Persen, dan persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 72,5 persen.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 95,5 persen dan persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 60 persen.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kebersihan dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 Persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 100 Persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 97 Persen

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase rumah tangga sehat sebesar 95 Persen.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob (penurunan luas genangan), serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 93,10 Persen.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 92,11 Persen.

3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Fokus program adalah penyediaan sarana persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan sarana persampahan regional sebesar 100 persen.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) sebesar 12,87 persen.

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 71,49 persen.

6) Program Penataan Bangunan Gedung.

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 18,74 persen.

7) Program Penyelenggaraan Jalan.

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kemantapan jalan Kab/Kota (IKK Outcome) sebesar 86,57 persen.

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 21,20 persen.

9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota sebesar 100 persen.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Warga sebesar 92,35 persen.

2) Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas RTLH dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu luas kawasan permukiman kumuh sebesar 0 hektar.

3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) hektar. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 2147,88 hektar.

4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) sebesar 14,55 persen.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Outcome) sebesar 70 persen.

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome) sebesar 100 Persen.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 75 Persen.

2) Program Rehabilitasi Sosial.

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK Outcome) sebesar 100 Persen.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial sebesar 52,49 Persen.

4) Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 Persen.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100 Persen.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja melalui pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome) sebesar 0,55 persen.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) sebesar 29,93 persen

3) Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome) sebesar 49,02 persen

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pug kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 11,09 Persen.

2) Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) sebesar 23,99 Persen.

3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Dekelara (desa/kelurahan layak anak) sebesar 55,56 Persen.

4) Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah perlindungan khusus terhadap anak. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 Persen.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,8 persen.

2) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 88 persen.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian.

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase permasalahan pertanian yang tertangani sebesar 100 persen.

2) Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.

Fokus program adalah koordinasi dan tindak lanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 50 persen.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai sampai dengan tahun 2026 yaitu Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebesar 100 persen.

2) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terutama pencemaran air. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase limbah yang diolah sebesar 49,01 persen.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,949 persen.

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 100 persen.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi atas hukum lingkungan termasuk izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 100 persen.

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Manusia

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50 persen

7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 75 persen.

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

9) Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah termasuk pengelolaan sampah di TPS3R. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,31 persen.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 88,75 persen.

2) Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 94 persen.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) sebesar 14 OPD.

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 100 Persen

2) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang" sebesar 70,37 Persen

3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 96,92 Persen.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengendalian Penduduk.

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 persen.

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana.

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 7.2 Persen.

3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Unmet need KB sebesar 12 Persen.

i. Urusan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe c, pengelolaan penerangan jalan umum (PJU) dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 100 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) dengan ratio sebesar 0,44, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang lulus uji KIR sebesar 0,74 persen.

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 Persen

2) Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerintah, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 3,30.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) sebesar 33,23 persen.

2) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026

yaitu Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 59,68 persen.

3) Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan UMKM yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) sebesar 12,37 persen.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Penambahan peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota sebesar 6 Dokumen.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 2500 dokumen.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Nilai Investasi Baru pertahun sebesar Rp.40,53 Miliar.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Pengelolaan data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang terintergrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 95,24 Persen.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan sarpras olahraga sesuai jenis cabor sebesar 42,86 persen.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 Persen.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan sebesar 3,74 Persen.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya termasuk penyelenggaraan event budaya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3) Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pembinaan pelestarian sejarah menuju perkembangan obyek wisata budaya sebesar 100 Persen.

4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome) sebesar 97,52 Persen.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan

penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 4,8 Persen.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu rasio pengunjung perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 16,58.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Indikator yang akan dicapai yaitu regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan sejumlah 1 regulasi.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Arsip.

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 66,67 persen dan tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK Outcome) dengan indeks sebesar 52,5.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah Penilaian penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) sebesar 100 Persen.

3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Fokus program adalah penyusunan dan penetapan SOP penggunaan arsip yang bersifat tertutup. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK sebesar 100 persen.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 6,15 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 6,15 persen

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 6,15 persen

3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu peningkatan jumlah pengusaha perikanan sebesar 12,2 persen dan pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.

Fokus program adalah pengelolaan destinasi serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome) sebesar 12,5 persen.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) sebesar 46,98 persen.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 59,52 persen.

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 100 persen.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55,84 miliar dan nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 203,65 miliar.

2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5) Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 100 persen.

6) Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

d. Urusan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome) sebesar 77,70 persen.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan, termasuk pembangunan pasar tradisional yang diawali kajian untuk mendekatkan pelayanan serta penataan pedagang dan pedagang kaki lima. Indikator yang akan

dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 100 persen.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauannya sebesar 100 persen

4) Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 8,19 persen.

5) Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase Alat-Alat Ukur, Timbang, Takar Dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) sebesar 83,99 persen.

6) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) sebesar 7,5 persen.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) sebesar 21,04 persen.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) sebesar 26 persen.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) sebesar 100 persen.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2) Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, pertanian, perikanan, kelautan, ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 Persen, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) sebesar 6 persen, dan persentase keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100 persen.

b. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitas anggota legislatif dan fasilitasi penjangkauan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 Persen, persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen.

2) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan dokumen

perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100 Persen, persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100 persen, dan persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur wilayah sebesar 100 persen.

b. Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi, Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) sebesar 7,26 Persen.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan barang milik daerah termasuk optimalisasi aset daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Indeks pengelolaan aset baik (persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome) sebesar 100 persen.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome) sebesar 5,00 Persen.

c. Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan Assesment Center, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase PNS berkembang karier sebesar 50 persen, tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, persentase Keterisian Jabatan sebesar 90 persen, dan persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80 Persen.

d. Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

e. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah implementasi Sistem Inovasi Daerah, pelaksanaan unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbang, fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta penelitian pengembangan, dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase Litbang yang sesuai dengan arah kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 76 dan Persentase pemberdayaan stakeholder kelitbang sebesar 100 persen.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai 3.

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah

utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik wilayah timur sebesar 100 persen.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah selatan sebesar 100 Persen, tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan di wilayah timur sebesar 100 persen, serta persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3) Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja trantibum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja trantibum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja trantibum wilayah timur sebesar 100 Persen.

4) Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah utara sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah selatan sebesar 100 persen, tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah barat sebesar 100 persen, dan tingkat kinerja pemerintahan umum wilayah timur sebesar 100 persen

8. Urusan Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya sebesar 100 persen.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

9. Non Urusan

a. Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sebesar 100 persen, persentase pelaksanaan keprotokoleran sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen, serta persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100 persen.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 ditujukan untuk ***"Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian"***, dengan arah kebijakan meliputi:

1. Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program, dengan fokus pada:

- a. Mendorong upaya konvergensi dan sinergitas lintas sektor yang disertai peningkatan layanan dan fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, percepatan penurunan angka stunting serta pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - b. Mendorong peran berbagai pihak/stakeholder dalam meningkatkan percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC);
 - c. Penggerakan masyarakat melalui posyandu dan pemberdayaan Germas di berbagai tatanan masyarakat;
 - d. Peningkatan efektivitas jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan fasilitas kesehatan pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan, dengan fokus pada perluasan kesempatan pelatihan keterampilan bagi warga miskin dan perluasan kesempatan kerja dan berusaha.
 3. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan partisipasi pendidikan guna menurunkan angka ATS (anak tidak sekolah), disertai upaya perluasan akses, peningkatan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta penguatan sarana prasarana pendidikan secara bertahap;
 - b. Peningkatan penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.
 4. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak, dengan fokus pada peningkatan koordinasi dengan dunia usaha dalam upaya perlindungan tenaga kerja dan penghapusan pekerja anak.
 5. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan peran serta perempuan dalam bidang politik dan pemerintahan guna meningkatkan kesetaraan gender;
 - b. Peningkatan dan optimalisasi kelurahan layak anak serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu, ramah dan inklusif bagi anak, difabel dan lansia.
 6. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi.
 7. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:
 - a. Penguatan sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan peran masyarakat dalam rangka percepatan penanganan banjir/rob;
 - b. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha yang menghasilkan limbah, serta pengendalian kualitas lingkungan hidup;
 - c. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau melalui alih fungsi lahan milik pemerintah dan penambahan taman kota serta pengendalian pemanfaatan ruang kota.

8. Peningkatan peran serta stakeholder potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan fokus pada:
 - a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi serta optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
 - b. Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat;
 - c. Lanjutan pengembangan kawasan Pekalongan Baru dan mendorong penambahan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.
9. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif, dengan fokus pada pengembangan sektor pariwisata yang inklusif dengan sektor industri, jasa, perdagangan dan UMKM berbasis ekonomi kreatif melalui:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata disertai dengan promosi, penguatan pelaku industri pariwisata serta kemudahan akses;
 - b. Pengembangan destinasi wisata baru dengan menyiapkan sarana prasarana pendukung dalam rangka penguatan ekonomi lokal.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya, dengan fokus pada mengembangkan kesenian dan budaya lokal melalui kolaborasi antar kelompok dan masyarakat dalam rangka memperkaya substansi penyelenggaraan event budaya.
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
12. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN, dengan fokus pada:
 - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan domain SPBE;
 - b. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan terukur serta penguatan keterbukaan informasi publik;
 - c. Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - d. Pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta implementasi roadmap merit system;
 - e. Penguatan sistem pengendalian internal pemerintah sekaligus mendorong upaya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2024 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 - 5,8 persen;
- b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
- c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,3 - 5,93 persen;
- d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,70;
- e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5 – 4,7 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2024. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 1. 12 Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
DINAS PENDIDIKAN			242.671.101.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			242.671.101.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			242.671.101.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	161.879.801.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	94.784.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	4.250.000	DINAS PENDIDIKAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	87.034.000	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	160.227.276.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1376 Orang /bulan	159.689.576.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	533.800.000	DINAS PENDIDIKAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.900.000	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 persen	105.303.000	DINAS PENDIDIKAN
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	186 Laporan	105.303.000	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	570.992.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	123.322.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	13.117.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	89.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.550.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan	190.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	127.003.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	674.873.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	290.997.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	376.876.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	201.573.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	28 Unit	72.073.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	109 Unit	54.500.000	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen	65.798.339.000	
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)	99.00 persen	29.209.371.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	483.821.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	0 Unit	38.777.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	255.323.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	87.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	75.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	71 Paket	88.750.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	42 Paket	143.650.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	9 Paket	760.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	10882 Peserta Didik	375.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1091 Orang	2.768.076.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	103 Satuan Pendidikan	183.818.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	103 Satuan Pendidikan	18.064.401.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	309 Orang	37.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2 Ruang	541.177.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	309 Orang	67.230.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	400.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah	7 Unit	395.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Prasarana dan Utilitas Sekolah	Direhabilitasi Sedang/Berat			
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	103 Satuan Pendidikan	133.098.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	41 Ruang	4.061.250.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)	95 persen	23.233.166.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	101.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	81.950.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	19 Ruang	3.424.480.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	461.928.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Ruang	1.059.314.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	350.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Unit	829.262.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	17 Paket	34.400.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	34 Paket	212.500.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	3 Unit	132.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1325 Paket	182.350.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3 Paket	220.450.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1035 Peserta Didik	373.960.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	105 Orang	293.470.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	30 Satuan Pendidikan	309.656.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	30 Satuan Pendidikan	13.215.802.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	90 Orang	20.920.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang	38.830.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	30 Satuan Pendidikan	117.338.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	877.657.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)	99 persen	9.095.233.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	190.301.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Unit	1.126.416.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	4 Paket	10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket	25.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	13 Paket	329.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	10159 Peserta Didik	231.119.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	2 Orang	55.440.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	268 Satuan Pendidikan	440.217.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	266 Satuan Pendidikan	6.021.600.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	798 Orang	82.055.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang	424.085.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	750 Paket	100.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	4 Unit	35.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)	65 persen	4.260.569.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	4 Unit	967.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13 Orang	328.692.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	101.762.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	13 Satuan Pendidikan	2.467.900.000	DINAS PENDIDIKAN
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	26 Orang	20.203.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	300 Paket	50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1554 Peserta Didik	185.012.000	DINAS PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang	0	DINAS PENDIDIKAN
Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	60 Paket	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit	20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit	0	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen	272.429.000	
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar	100 persen	191.129.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	8.350.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	1785 Buku	150.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	10 Orang	21.246.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	11.533.000	DINAS PENDIDIKAN
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF	100 persen	81.300.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	10.600.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	500 Buku	60.000.000	DINAS PENDIDIKAN
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen	10.700.000	DINAS PENDIDIKAN
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	14.720.532.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF	86.75 persen	14.720.532.000	DINAS PENDIDIKAN
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	25 Dokumen	1.043.393.000	DINAS PENDIDIKAN
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan PenataanPendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15 Laporan	13.677.139.000	DINAS PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN			111.225.673.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			111.225.673.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			111.225.673.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	64.963.817.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	21.985.000	DINAS KESEHATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.500.000	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.485.000	DINAS KESEHATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15.000.000	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	62.319.490.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	484 Orang/bulan	62.232.865.000	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	83.395.000	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.230.000	DINAS KESEHATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS KESEHATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	437.626.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	132.067.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	96.559.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	26.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan	168.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.161.987.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	600.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	625.383.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	536.004.000	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.017.729.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	41 Unit	252.024.000	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	700.705.000	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	91 Unit	65.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91 persen	42.758.561.000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)	100 persen	11.685.201.000	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	6 Unit	3.367.515.000	DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	3 Unit	536.444.000	DINAS KESEHATAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Unit	283.295.000	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6 Unit	802.840.000	DINAS KESEHATAN
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	94 Unit	303.201.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket	6.326.906.000	DINAS KESEHATAN
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	12 Paket	65.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	30.981.185.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6006 Orang	125.000.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5462 Orang	196.795.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18314 Orang	156.413.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	45000 Orang	99.142.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	210465 Orang	163.173.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36783 Orang	27.053.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	76872 Orang	6.576.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14148 Orang	6.291.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1013 Orang	11.520.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6836 Orang	62.734.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	16169 Orang	73.286.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2.178.944.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	49.125.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	171.150.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.085.106.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3 Dokumen	357.789.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	24.400.049.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	47.237.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen	1.731.814.000	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	31.988.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi	100 persen	22.500.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	22.500.000	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu	100 persen	69.675.000	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	52 Unit	69.675.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	50 persen 94,5 persen	713.406.000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu	100 persen	713.406.000	DINAS KESEHATAN
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	713.406.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 persen 96 persen 100 persen	600.676.000	
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan	100 persen	48.495.000	DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	2 Dokumen	48.495.000	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan	100 persen	503.431.000	DINAS KESEHATAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	5 Dokumen	503.431.000	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan	95 persen	48.750.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	48.750.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Sehat	93 persen	2.189.213.000	
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri	33 persen	2.127.518.000	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	2.127.518.000	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan	100 persen	61.695.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2 Dokumen	61.695.000	DINAS KESEHATAN
RSUD BENDAN			112.048.118.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			112.048.118.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			112.048.118.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	105.273.259.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	8.485.000	DINAS KESEHATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	0	DINAS KESEHATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	57.370.000	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	0	DINAS KESEHATAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	570.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	28.000.000	DINAS KESEHATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28.000.000	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	105.179.404.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	0	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen 85 persen 91 persen 100 persen	6.709.813.000	
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan	100 persen	6.594.500.000	DINAS KESEHATAN
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	22 Unit	0	DINAS KESEHATAN
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	32.813.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	500 Orang	32.813.000	DINAS KESEHATAN
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan	100 persen	82.500.000	DINAS KESEHATAN
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	27 Unit	0	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	50 persen 100 persen	65.046.000	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase perawat dan bidan yang terakreditasi	100 persen	48.921.000	DINAS KESEHATAN
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi	100 persen	16.125.000	DINAS KESEHATAN
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	92 Orang	0	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PUSKESMAS BENDAN			3.530.529.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.530.529.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.530.529.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	2.734.804.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	2.734.804.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.734.804.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen 85 persen 91 persen 100 persen	795.725.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	795.725.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	795.725.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KRAMATSARI			1.847.222.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.847.222.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.847.222.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.167.662.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.167.662.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.167.662.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	67,5 persen 100 persen 85 persen	679.560.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	679.560.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	679.560.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TIRTO			2.497.654.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.497.654.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.497.654.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.642.301.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.642.301.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.642.301.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	100 persen 85 persen 67,50 persen 91 persen	855.353.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama	100 persen	855.353.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	855.353.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MEDONO			2.108.729.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.108.729.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.108.729.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.283.491.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.283.491.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.283.491.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91 persen	825.238.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	825.238.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	825.238.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS NOYONTAAN			1.784.848.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.784.848.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.784.848.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.277.246.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.277.246.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.277.246.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	100 persen 67,50 persen 100 persen 85 persen	507.602.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	507.602.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	507.602.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TONDANO			2.000.017.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.000.017.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.000.017.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.341.108.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.341.108.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.341.108.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	91 persen 85 persen 100 persen 67,5 persen	658.909.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	658.909.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	658.909.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KLEGO			1.987.034.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.987.034.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.987.034.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.215.888.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.215.888.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.215.888.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91 persen	771.146.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	771.146.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	771.146.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SOKOREJO			2.580.957.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.580.957.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.580.957.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.918.571.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.918.571.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.918.571.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	85 persen 100 persen 91 persen 67,5 persen	662.386.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	662.386.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	662.386.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS DUKUH			1.994.854.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.994.854.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			1.994.854.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.348.039.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.348.039.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.348.039.000	DINAS KESEHATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91 persen	646.815.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	646.815.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	646.815.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL			2.364.201.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.364.201.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.364.201.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.788.284.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.788.284.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.788.284.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91 persen	575.917.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	575.917.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	575.917.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KUSUMA BANGSA			3.138.468.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.138.468.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.138.468.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	2.301.883.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	2.301.883.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.301.883.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91 persen	836.585.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	836.585.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	836.585.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JENGGOT			2.442.802.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.442.802.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.442.802.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.791.169.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.791.169.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.791.169.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	91 persen 85 persen 100 persen 100 persen	651.633.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	651.633.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	651.633.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN			3.208.865.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.208.865.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			3.208.865.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	2.322.819.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	2.322.819.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	2.322.819.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	85 persen 100 persen 100 persen	886.046.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	886.046.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	886.046.000	DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BUARAN			2.168.845.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			2.168.845.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			2.168.845.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	1.434.845.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	1.434.845.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1.434.845.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	91,00 persen	734.000.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP	100 persen	734.000.000	DINAS KESEHATAN
Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	4 Dokumen	734.000.000	DINAS KESEHATAN
BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU			443.315.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			443.315.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			443.315.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen	214.719.000	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD	100 persen	214.719.000	DINAS KESEHATAN
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	214.719.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen 91 persen 85 persen 100 persen	228.596.000	
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Ketercapaian SPM Bidang Kesehatan Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP Persentase layanan kesehatan RS tipe C	100 persen	228.596.000	DINAS KESEHATAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	228.596.000	DINAS KESEHATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			70.646.869.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			70.646.869.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			70.646.869.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	13.282.811.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan	100 persen	16.950.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	evaluasi kinerja perangkat daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.050.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.926.651.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62 Orang/bulan	6.824.951.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	99.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.900.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100 Persen	35.578.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	35.578.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	17.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang	12.800.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	608.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	250.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	6.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	114.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	4.871.291.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4.423.250.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	445.041.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	806.541.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	48 Unit	620.541.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	10 Unit	86.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	16.582.011.000	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik	34 unit	14.892.100.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	5 Unit	5.700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	7 Unit	2.555.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	34 Unit	3.830.950.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,46 KM	600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	2,79 KM	2.206.150.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)	83,39 persen	1.689.911.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0,9 KM	1.689.911.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	89,66 persen	1.581.070.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan	100 persen	1.581.070.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	212 SR	1.581.070.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	60,00 persen	952.450.000	
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota	60 Persen	952.450.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0,112 Ton/hari	952.450.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	17,23 persen	3.669.141.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)	59851 unit	3.669.141.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	5,44 M³/Hari	3.669.141.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,48 persen	4.542.015.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	180841 meter	4.542.015.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	8 Sistem Drainase Perkotaan	4.059.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	8 Sistem Drainase Perkotaan	483.015.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,14 persen	1.537.749.000	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)	330 Dokumen	1.537.749.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	6 Bangunan Gedung	1.226.799.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen	100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	130 Dokumen	210.950.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	84,39 persen	27.850.932.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang	129,628 KM	27.850.932.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen	64.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	0,14 KM	499.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	4,3 KM	20.191.744.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	5 Jembata	302.280.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	153,607 KM	141.400.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0,65 KM	2.106.975.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	2,5 KM	4.544.333.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	15,87 persen	102.358.000	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	1 kali	65.278.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	36 Orang	65.278.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia	100 Persen	37.080.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	2 Dokumen	37.080.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	546.332.000	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR	100 Persen	183.862.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	1 Dokumen	117.292.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	350 Orang	66.570.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 kali	323.710.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Dokumen	323.710.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan	12 kali	38.760.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	2 Dokumen	38.760.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			44.178.402.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			43.255.584.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			43.255.584.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 persen	4.635.634.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	15.861.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.262.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.599.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	2.811.925.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.755.543.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	54.900.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.482.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	231.686.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	48.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	49.186.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73 Laporan	120.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	1.209.024.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	6.800.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	962.400.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	239.824.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	362.138.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	154.668.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	157.470.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 persen	2.167.825.000	
Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah pada kawasan rawan bencana yang disusun	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah	3 kegiatan	44.280.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan	Jumlah Orang/Sukarelawan	60 Orang	10.000.000	DINAS PERUMAHAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarela wan Tanggap Bencana	yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	6 Orang	25.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2 Orang	9.280.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase rumah layak huni bagi warga korban bencana dan relokasi program pemerintah (SPM/IKK Outcome)	100 Persen	232.061.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	6 Unit Rumah	132.061.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	2 Unit Rumah	100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100 Persen	1.831.484.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	3 Laporan	1.831.484.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase pelaksanaan penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100 Persen	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	0 Laporan	0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan permukiman kumuh	174,47 Hektar	22.677.236.000	
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Presentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun	100 Persen	146.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyusunan/Review/L egalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	33.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	113.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	117 Hektar	22.530.736.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	4 Laporan	446.034.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	3 Ha	22.084.702.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	1973,41 hektar	11.939.368.000	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan rumah tidak layak huni	0,78 persen	11.939.368.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	599 Unit Rumah	11.939.368.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	57,61 persen	1.835.521.000	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	persentase perumahan yang sudah menyerahkan PSU	57,61 persen	1.835.521.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	12 Dokumen	260.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	12 Lokasi	1.475.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	100.521.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			922.818.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			922.818.000	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani	100 persen	863.732.000	
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Luasan Bidang Tanah yang terselesaikan Ganti Ruginya	73,35 persen	863.732.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	863.732.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Presentase Tindakan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Tanah Absentee	50 persen	59.086.000	
Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	59.086.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen	59.086.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN			13.157.628.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.157.628.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			13.157.628.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	5.558.043.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	15.960.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.320.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.640.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.730.987.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	4.669.367.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	60.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.520.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	248.720.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.625.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.195.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	96.400.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	100.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	127.651.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.651.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	429.725.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	29 Unit	369.230.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.495.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 Unit	30.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	82 persen	6.587.360.000	
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)	95 persen	2.492.736.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40 Dokumen	1.976.146.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	102.270.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	155 Orang	21.100.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen	123.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	300 laporan	43.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2000 Laporan	213.480.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Laporan	13.240.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)	20 perda	4.092.693.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	51.699.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	4.025.994.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	48 Laporan	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	16 persen	1.931.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1.931.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGA N, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	1.012.225.000	
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran	100 persen	826.313.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulan gan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	4 Dokumen	24.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	250 Laporan	734.013.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	38 Orang	15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan	7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	3 Unit	11.250.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen	33.800.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya	100 persen	34.071.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	34.071.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran	100 persen	97.328.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	320 Orang	37.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	21 Desa/Kelurahan	59.828.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase penanganan kondisi membahayakan	100 persen	54.513.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	24 Laporan	54.513.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH			4.097.465.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.097.465.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			4.097.465.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	2.250.274.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	14.970.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.740.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.230.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	1.632.887.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.594.847.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.900.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.140.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	104.165.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	95.900.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	8.265.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	171.935.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.875.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.400.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	902.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	24.258.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	75.000.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	111.994.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.313.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.181.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	214.323.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	103.965.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	64.017.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	57 Unit	46.341.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen	1.847.191.000	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen	59.265.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 Dokumen	0	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	200 Orang	59.265.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen	173.711.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen	76.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	2 Unit	33.911.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	400 Kawasan	63.300.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)	100 persen	1.536.590.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1.369.840.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2500 Orang	166.750.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	100 persen	77.625.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	40.125.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	4 Kegiatan	37.500.000	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			12.663.988.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.532.500.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			8.532.500.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	3.652.369.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	21.606.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.552.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.614.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	16.440.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.593.658.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.550.136.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.850.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.672.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	249.718.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.867.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	5.625.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	76.726.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	99.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	351.026.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	162.561.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	186.065.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	431.361.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	230.725.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	181.736.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	18.900.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	67 persen	440.708.000	
Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	10 persen	182.395.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	340 Keluarga	182.395.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	75 persen	258.313.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	56.816.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Orang	132.747.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lembaga	68.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	2.027.812.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	100 Persen	1.194.058.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	365.520.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang	828.538.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	3.68 Persen	833.754.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Orang	672.578.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	29.378.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	37.036.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	41.551.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	145 Orang	53.211.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	55,12 persen	1.427.838.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase graduasi KPM PKH	10 Persen	1.427.838.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2000 Orang	612.094.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	950 Keluarga	815.744.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	718.467.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 persen	718.467.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1550 Orang	423.677.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	1666 Orang	277.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	2000Orang	17.790.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	100 persen	265.306.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	100 persen	265.306.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	200.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	65.306.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.131.488.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			4.131.488.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	254.523.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	100 persen	254.523.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	61.403.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	27 Laporan	145.120.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	12 persen	1.883.987.000	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)	8.73 perseribu	977.304.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	16 Laporan	196.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	48 Laporan	111.360.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	389.934.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	3 Organisasi	200.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	20.4 persen	906.683.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Unit	199.995.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 Laporan	216.489.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Unmeet need KB	14 persen	1.992.978.000	
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100 persen	1.992.978.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Organisasi	506.178.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	11 laporan	708.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP			32.247.270.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			32.247.270.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			32.247.270.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	15.580.271.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	15.960.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	2.320.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.640.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	10.275.130.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	101 Orang/bulan	10.162.042.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	111.568.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.520.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	23.417.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	23.417.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	374.205.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.275.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.820.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	131.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	32.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.560.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95 Laporan	147.100.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	566.589.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	267.960.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	296.229.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	4.324.970.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	173.149.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	57 Unit	4.014.800.500	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	112.020.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	43 Unit	25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase limbah yang diolah	45.02 persen	1.363.066.000	
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya	51.09 persen	906.527.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	572.126.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	35.110.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	299.291.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase upaya penanggulangan pencemaran air	50 persen	456.539.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	104.368.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	73 Titik	352.171.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,929 persen	4.248.163.000	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas RTH Publik	109.607 Ha	4.248.163.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	109,97 Ha	3.339.783.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	34,1 Unit	908.380.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	2.271.000	
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3	6 persen	2.271.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan	2.271.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	39.713.000	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan	10 kegiatan	39.713.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	14.250.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	67 Badan Usaha	25.463.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen	266.393.000	
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	5 komunitas	266.393.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	52.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	700 Orang	143.893.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	9 Lembaga	70.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	75 persen	60.750.000	
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat	3 penghargaan	60.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	60.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	13.875.000	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah kasus lingkungan yang ditangani	6 kasus	13.875.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	18 Pengaduan	12.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Perkara	1.875.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah terkelola di TPS 3R Persentase sampah terangkut ke TPA	24 persen 76 persen	10.672.768.000	
Pengelolaan Sampah	Persentase pengurangan sampah	17.69 persen	10.672.768.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	35 Kelompok	652.445.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	2.140.216.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/ kota atau TPA/TPST Regional	56324807 Ton	7.880.107.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.512.455.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.512.455.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			5.512.455.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah	100 persen	4.719.644.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	15.564.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.088.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.476.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.526.871.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	3.486.503.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.368.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	10.313.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	51 Orang	5.313.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	707.097.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3.525.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	526.312.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	36.360.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	93.900.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	287.436.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	136.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	147.936.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	172.363.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	94.283.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	26.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	42 Unit	51.580.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88 persen	339.175.000	
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	404772 Dokumen	339.175.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	46000 Dokumen	295.044.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	17.981.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2 Laporan	26.150.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,7 persen	355.308.000	
Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil	6981 Dokumen	355.308.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	9285 Dokumen	329.470.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan	25.838.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	10 OPD	98.328.000	
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyajian data kependudukan (IKK Output)	2 kali	98.328.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	27.230.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2 Laporan	28.600.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabk an	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabk an	1 Dokumen	42.498.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			6.662.868.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.662.868.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			711.420.000	
PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	7,39 persen	275.000.000	
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender	16.67 persen	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	35.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan	26.67 persen	220.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	220.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita	100 persen	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 persen	81.308.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Dokumen	20.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)	100 persen	61.308.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Layanan	61.308.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekelra (desa/kelurahan layak anak)	40,74 persen	277.022.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase forum anak yang aktif	28.13 persen	277.022.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Orang	124.841.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	113.291.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	38.890.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen	78.090.000	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	100 persen	12.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	1 Kegiatan	12.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)	100 persen	57.468.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	15 Orang	57.468.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 persen	8.322.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	50 Orang	8.322.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.951.448.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	3.271.420.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	15.762.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.204.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.558.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.593.541.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.552.347.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	39.750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.444.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	252.169.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.730.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	73.723.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.636.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	6.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	134.780.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	268.948.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	106.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	160.348.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	136.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	71.960.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	50.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	69 Unit	14.040.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase ketercapaian Fasilitas Kerjasama TNI dan kelurahan	66,67 persen	1.448.947.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan	11.11 persen	1.448.947.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.448.947.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	85,51 persen	56.020.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kinerja administrasi kelurahan	100 persen	56.020.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2 Dokumen	56.020.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,66 persen	1.175.061.000	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	100 persen	1.175.061.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	175.043.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	337.136.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	67.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	49.716.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	545.666.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PERHUBUNGAN			30.896.652.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			30.896.652.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			30.896.652.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	21.705.304.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	16.257.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.494.000	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.763.000	DINAS PERHUBUNGAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.446.325.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	4.351.706.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	92.985.000	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.634.000	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 persen	32.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	32.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	145.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	145.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	713.481.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	12.881.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	153.200.000	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	117.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	15.833.598.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	15.481.570.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	350.228.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	518.143.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	374.218.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	85.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	58.925.000	DINAS PERHUBUNGAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	0,75 persen 0,44 persen 95 persen	9.191.348.000	
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100 persen	3.005.080.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	31.800.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	38 Dokumen	2.973.280.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	4 jenis	4.897.512.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	67 Unit	335.735.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit	270.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	847 Unit	4.017.777.000	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	60 Unit	274.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 kali	45.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	45.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dilaksanakan	180 kali	325.850.000	DINAS PERHUBUNGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Laporan	325.850.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	65.19 persen	232.444.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	4 Unit	20.880.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3855 Dokumen	99.380.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	102.184.000	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92 persen	616.812.000	DINAS PERHUBUNGAN
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	117.253.000	DINAS PERHUBUNGAN
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	474.559.000	DINAS PERHUBUNGAN
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)	83 persen	15.750.000	DINAS PERHUBUNGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	4 Laporan	15.750.000	DINAS PERHUBUNGAN
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	2 kegiatan	27.900.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	18.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	9.400.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kab/Kota yang difasilitasi	3 jenis	25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Unit	15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			14.173.704.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.173.704.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			13.905.524.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	5.569.665.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	16.257.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.494.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.763.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	3.933.003.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.882.329.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	49.040.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.634.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	72.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	67.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	449.689.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.087.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	142.553.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.373.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	111.176.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	16.800.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	124.700.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	653.696.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	511.860.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	139.436.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	445.020.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	200.810.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	75.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75 Unit	169.210.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	5.482.210.000	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah	7 per 8	5.482.210.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	40.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	14 Dokumen	145.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	127.796.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	8 Dokumen	3.086.544.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	6 Dokumen	208.189.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	2 Layanan	1.317.510.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	2 Dokumen	45.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	12 Dokumen	396.512.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	115.159.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,10 indeks	2.853.649.000	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)	62.42 persen	1.710.845.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	5.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	181 Unit	1.705.595.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)	9.35 persen	1.142.804.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Dokumen	250.020.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	154.420.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	381.600.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	297.214.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	8 Dokumen	32.066.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	27.484.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			115.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	115.500.000	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik sektoral yang disusun	2 Dokumen	115.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	10 Dokumen	115.500.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			152.680.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	2,80 persen	152.680.000	
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik	9.35 persen	113.365.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2 Laporan	11.250.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	72.870.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	30 Perangkat Daerah	29.245.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi	100 persen	39.315.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	30 Perangkat Daerah	39.315.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			6.448.253.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.448.253.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			6.448.253.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	4.789.485.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	15.869.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.598.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.271.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.156.369.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	3.112.291.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42.900.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.178.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	753.247.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	527.147.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	33.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	120.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	685.504.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.127.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	435.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	243.377.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	173.496.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	134.357.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	17.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	22.139.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	77.882.000	
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah audit ISO yang dilaksanakan Jumlah peraturan penanaman modal yang disusun	1 kali 1 peraturan	37.057.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2 Dokumen	37.057.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen peta potensi penanaman modal yang disusun	1 Dokumen	40.825.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	40.825.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	39.630.000	
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal	1 Kegiatan	39.630.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	39.630.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2750 dokumen	781.256.000	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun	12 bulan	781.256.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2750 Pelaku Usaha	446.292.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120 Pelaku Usaha	91.700.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	60 Kegiatan Usaha	228.264.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Baru pertahun	6,96 Miliar Rupiah	657.656.000	
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal	150 Perusahaan	657.656.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	3 Kegiatan Usaha	116.789.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	360 Pelaku Usaha	358.373.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	120 Kegiatan Usaha	182.494.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	102.344.000	
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota yang disajikan	6 aplikasi	102.344.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	102.344.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			5.155.285.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.155.285.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			936.762.000	
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	28 indeks	926.762.000	
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)	1.66 persen	506.082.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	800 Layanan	111.690.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	86.067.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	130 Orang	44.140.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	1 Layanan	144.185.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	200 Eksemplar	120.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kenaikan Nilai Budaya Baca	33.77 persen	420.680.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	1 Lokus	30.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	45.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	6 Orang	27.680.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	300.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 Orang	18.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	1 regulasi	10.000.000	
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) (IKK Output)	5 koleksi	10.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	1 Eksemplar	10.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			4.218.523.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	100 persen	3.727.161.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	29.882.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.863.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	3.009.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	23.010.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2.621.523.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	2.576.279.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	43.800.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.444.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	245.492.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.690.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.285.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	1.686.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.831.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	8.900.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	90.600.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	572.996.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.200.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	414.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	157.296.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	252.268.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	106.496.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	118.172.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	39 Unit	27.600.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	97 persen indeks 75 persen indeks	322.924.500	
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya	32.26 persen	255.375.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	6 Berkas	182.165.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Laporan	73.210.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip	16 persen	41.600.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3 Arsip	41.600.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan	80 persen	25.949.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	25.949.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	168.437.500	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)	100 persen	108.813.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2500 Arsip	82.913.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas	25.900.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	100 persen	59.624.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1300 Arsip	59.624.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			9.153.844.000	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			9.153.844.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			9.153.844.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	5.935.115.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	17.640.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.088.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.476.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	14.076.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	3.627.149.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.567.161.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	58.620.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.368.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	5.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	508.292.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	13.348.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	235.663.400	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	58.568.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	181.213.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	559.853.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.700.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	181.375.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	376.778.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.217.180.600	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	143.251.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.025.816.600	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56 Unit	48.113.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen	2.471.915.000	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 persen	389.863.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	40.083.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	1 Unit	168.430.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	1 Unit	181.350.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nelayan Kecil yang dibina	100 persen	56.358.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	34.503.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	19 Kelompok	21.855.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI	1 persen	2.025.694.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	351 Layanan	2.025.694.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 persen	257.536.000	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan	100 persen	257.536.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	12.998.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	24.861.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	165.206.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	4 Dokumen	19.688.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30 Orang	34.783.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	2 pelaku usaha persen 12,2 pelaku usaha persen	489.278.000	
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	16.67 persen	54.935.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	285 Unit Usaha	54.935.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70 persen	434.343.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	2 Pelaku Usaha	434.343.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			27.835.468.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.796.134.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			10.696.309.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,31 persen	1.300.520.000	
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)	0.76 Persen	540.520.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	30 Orang	50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	48 Orang	100.520.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	300 Orang	390.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)	0.505 Persen	760.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	760.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	34,29 persen	9.395.789.000	
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan	76.19 Persen	2.007.553.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	2.007.553.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota	38.1 Persen	3.843.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	6 Dokumen	3.467.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	71 Orang	376.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi	39 orang	3.261.829.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	215.380.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	1 Pelatda	100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	150 Orang	2.946.449.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	4 Event	282.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	282.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	7.146.096.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	987.076.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Paket	0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		3000 Orang	0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			4.099.825.000	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1.457.098.000	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan	6 Event	1.022.598.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1 Objek	1.022.598.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan	8 Event	434.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek	434.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	209.560.000	
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	26 komunitas	209.560.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	209.560.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	40.000.000	
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi	100 Persen	40.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen	40.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	93,97 persen	177.500.000	
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Diduga Cagar Budaya yang didaftarkan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pemberian tanda bukti kepemilikan dan keaslian cagar budaya Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.48 Persen 3 Buah 3 obyek	177.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	3 Objek	177.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum batik	8,29 persen	2.215.667.000	
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung museum batik	28000 Orang	2.215.667.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1310 Unit	240.597.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	4 Unit	1.106.894.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	9 Unit	868.176.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			13.039.334.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			13.039.334.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pengadaan/pemeliha raan barang milik daerah	100 persen	7.146.096.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	18.121.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.538.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.583.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	4.279.507.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.207.213.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	63.300.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.994.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	987.076.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	5.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3000 Orang	982.076.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	1.048.988.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	788.688.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.300.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	19.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230 Laporan	168.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	607.600.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	349.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	256.200.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	204.804.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	113.980.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	70.824.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	11,5 persen	3.935.956.000	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi	100 Persen	326.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	217.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan	109.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase destinasi wisata yang berkembang	100 Persen	3.599.956.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1 Lokasi	20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2 Unit	671.056.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Lokasi	2.908.900.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi	100 Persen	10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	3 Dokumen	10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	36,98 persen	682.020.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	25 Persen	682.020.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	350.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	207.020.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan	100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Promosi	25.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	41,67 persen	453.262.000	
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO	1 event	428.262.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit	428.262.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	100 Persen	25.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	25 Produk	25.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	60,00 persen	822.000.000	
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar	16.67 Persen	792.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	400.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	50 Orang	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100 Persen	300.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	30 Orang	50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan	12.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Ketercapaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	100 Persen	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	60 Orang	30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN			7.941.665.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			469.650.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			469.650.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan daerah	4,60 persen	388.650.000	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan	100 Persen	137.666.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	109.166.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	12 Dokumen	13.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah	5300 Kg	198.561.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1 Dokumen	11.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton	187.311.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan	3 kegiatan	52.423.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	52.423.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	26.500.000	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	4 kecamatan	26.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	26.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	85,8 persen	54.500.000	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	25 sample	54.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	54.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.472.015.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			7.472.015.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	5.929.093.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	16.554.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.668.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.886.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	5.017.539.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/b ulan	4.964.741.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.050.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.748.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	5.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	262.715.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	84.694.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.771.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	122.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	337.495.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	210.495.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	289.790.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	68.290.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	211.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Nilai produksi peternakan pertahun Nilai produksi pertanian pertahun	195,75 55,73 Miliar Rupiah Miliar Rupiah	845.943.000	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian	100 Persen	627.770.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	7 Laporan	455.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan	172.770.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota	100 Persen	70.213.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	17.300.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	52.913.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 kali	70.960.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	6 Laporan	70.960.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kenaikan pelayanan ULIB	5 persen	77.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	200 Laporan	77.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	262.018.000	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)	100 Persen	262.018.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0 Unit	0	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	174.518.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	1 Unit	87.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 persen	326.376.000	
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani	800 kasus	58.836.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	58.836.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak	100 Persen	11.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	6 laporan	11.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN	500 ekor	26.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	26.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha	100 Persen	230.040.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	37.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	12 Unit Usaha	192.540.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGA N BENCANA PERTANIAN	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	30.752.000	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan	4 kali	30.752.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1 Ha	16.750.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2 laporan	14.002.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase usaha pertanian/peternaka n yang memiliki ijin	75,00 persen	30.968.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin	5 persen	30.968.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	1 Laporan	30.968.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	46.865.000	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani	100 Persen	46.865.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	15.865.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	31.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
DINAS PERDAGANGAN,KO PERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			19.841.510.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			1.670.372.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			1.670.372.000	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	31,49 persen	110.667.000	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota	63.64 persen	110.667.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	110.667.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	58,77 persen	606.707.000	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0.98 persen	606.707.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	225 Orang	606.707.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,16 persen	952.998.000	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha	4.85 UMKM	952.998.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	209 Unit Usaha	952.998.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			18.171.138.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			18.171.138.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen	8.960.297.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 Persen	15.663.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.146.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.517.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	7.054.313.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan	6.985.107.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	67.800.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.406.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 Persen	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 Persen	509.003.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	5.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	79.351.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.850.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	61.302.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.500.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	272.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	809.055.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	319.300.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	487.355.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	567.263.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	44 Unit	496.163.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30.000.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	76 Unit	41.100.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,17 persen	8.660.000	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan	100 Persen	6.200.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	6.200.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan	100 Persen	2.460.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	2.460.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	93,75 persen	7.607.730.000	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional	12.5 persen	7.384.980.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	587.075.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	12 Unit	6.797.905.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5	45.98 Persen	222.750.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	222.750.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen	138.663.000	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok	72.73 persen	130.148.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19 Laporan	130.148.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)	100 Persen	8.515.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	8.515.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan volume ekspor	7,79 persen	125.831.000	
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir	25 pelaku usaha	125.831.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	30 Produk	125.831.000	DINAS PERDAGANGAN,KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (IKK Outcome)	79,99 persen	315.984.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)	79.99 persen	315.984.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5038 Unit	281.874.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	85 Orang	34.110.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	5,34 persen	1.013.973.000	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya	100 Persen	1.013.973.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	160 UMKM	902.033.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	55 UMKM	111.940.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA			12.746.305.000	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.835.065.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			4.835.065.000	
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,1 persen	3.684.570.000	
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100 Persen	3.511.399.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1693 Orang	3.025.939.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	1 Lembaga	249.999.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	29 Unit	235.461.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80 persen	67.214.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	67.214.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan	6 tenant	79.126.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	6 Perusahaan	79.126.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	40 persen	26.831.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2 Dokumen	26.831.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	25,93 persen	709.293.000	
Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	11.86 persen	414.033.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	120 Orang	18.750.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	210 Orang	32.072.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	20 Orang	8.625.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	162 Orang	354.586.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12 buku	238.020.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	31.140.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	700 Orang	110.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang	96.380.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI yang terlayani secara legal	44 orang	57.240.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	25 Orang	28.130.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	102 Orang	29.110.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	50 persen	441.202.000	
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	40.17 persen	324.057.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	19.150.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	30 Perusahaan	11.184.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	11 Laporan	293.723.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	72.45 persen	117.145.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	25 Perkara	11.534.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	6 Perkara	6.240.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	80 Asosiasi dan Serikat Pekerja	15.258.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	73.150.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	40 Orang	10.963.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.911.240.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			7.911.240.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	7.468.250.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	17.148.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.016.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.132.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6.217.341.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan	6.163.965.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.976.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	313.873.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.250.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	135.873.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3.750.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	59.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	7.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	3.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	616.588.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.400.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	260.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	353.688.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	298.300.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	98.300.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	180.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36 Unit	20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	338.389.000	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan	3.5 persen	338.389.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	13.800.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	106.846.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	135.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	66.523.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	16.220.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25,00 persen	10.221.000	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	28 persen	10.221.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	10.221.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100 persen	94.380.000	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	30 persen	94.380.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	90.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	4.380.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH			14.773.886.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			14.773.886.000	
SEKRETARIAT DAERAH			14.773.886.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	14.773.886.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	14.773.886.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	14.773.886.000	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEMERINTAHAN			702.223.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			702.223.000	
SEKRETARIAT DAERAH			702.223.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	702.223.000	
Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	100 persen	582.549.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	74.770.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	260.428.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2 Dokumen	247.351.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase efektivitas kerja sama daerah	100 persen	119.674.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	20 Dokumen	119.674.000	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM			716.807.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			716.807.000	
SEKRETARIAT DAERAH			716.807.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen	716.807.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	100 persen	716.807.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	9 Dokumen	183.657.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	21 Kasus	416.259.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	1500 Dokumen	116.891.000	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ORGANISASI			327.453.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			327.453.000	
SEKRETARIAT DAERAH			327.453.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen	327.453.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penataan Organisasi	Indeks Kelembagaan Kota	79 Indeks	327.453.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	91.396.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	139.367.000	SEKRETARIAT DAERAH
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	46 Dokumen	96.690.000	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA			356.263.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			356.263.000	
SEKRETARIAT DAERAH			356.263.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome) Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	6 persen 100 persen	356.263.000	
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100 persen	271.263.000	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	57.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	117.360.000	SEKRETARIAT DAERAH
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	96.903.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT	12 bulan	85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	85.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			647.186.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			647.186.000	
SEKRETARIAT DAERAH			647.186.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen	647.186.000	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100 persen	76.626.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	37.450.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	39.176.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan	100 persen	570.560.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen	203.020.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen	367.540.000	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			18.067.329.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			18.067.329.000	
SEKRETARIAT DAERAH			18.067.329.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen	18.067.329.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	100 persen	18.067.329.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	92 Dokumen	16.784.265.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Pengelolaan Bina Mental Spiritual			
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	22 Dokumen	391.229.800	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	68 Dokumen	891.834.200	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN UMUM			20.084.716.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			20.084.716.000	
SEKRETARIAT DAERAH			20.084.716.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	20.084.716.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	56.851.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.842.000	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.009.000	SEKRETARIAT DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	52.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	242.312.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	240.450.000	SEKRETARIAT DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.862.000	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	82.337.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	82.337.000	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	10.442.239.000	SEKRETARIAT DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	70.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.380.258.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	144.500.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.429.627.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	101.961.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	77.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	1.685.258.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3000 Laporan	5.553.235.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	2.668.010.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	27.600.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.139.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.501.410.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	4.261.248.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	74 Unit	1.808.996.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	2.061.552.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	190 Unit	390.700.000	SEKRETARIAT DAERAH
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah	100 persen	891.719.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	851.719.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	40.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	100 persen	1.440.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	840.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	600.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			1.482.330.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			1.482.330.000	
SEKRETARIAT DAERAH			1.482.330.000	

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen	1.482.330.000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan	100 persen	1.482.330.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan	277.400.000	SEKRETARIAT DAERAH
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	191 Laporan	877.186.000	SEKRETARIAT DAERAH
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan	327.744.000	SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD			66.951.287.000	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			66.951.287.000	
SEKRETARIAT DPRD			66.951.287.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	37.296.700.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	14.661.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.262.000	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.599.000	SEKRETARIAT DPRD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	10.800.000	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	3.363.522.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/b ulan	3.299.440.000	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	62.600.000	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.482.000	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100 persen	4.813.710.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	40.350.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	750.109.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	7.200.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	773.151.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	160.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	32.900.000	SEKRETARIAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	2.750.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 persen	1.366.563.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.800.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	347.125.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.017.638.000	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	1.521.661.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit	690.936.000	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	143 Unit	230.725.000	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen	24.986.383.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	23.961.645.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	509.275.000	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang	515.463.000	SEKRETARIAT DPRD
Layanan Administrasi DPRD	Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD	100 persen	1.225.200.000	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	625.200.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket	600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	29.654.587.000	
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD	100 persen	6.422.631.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9 Dokumen	4.374.663.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	8 Dokumen	2.047.968.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah pembahasan dokumen anggaran dan evaluasi	5 Dokumen	300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	148.648.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	146.902.000	SEKRETARIAT DPRD
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	4.450.000	SEKRETARIAT DPRD

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD	100 persen	3.006.405.000	SEKRETARIAT DPRD
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	268.915.000	SEKRETARIAT DPRD
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	1.442.100.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	20 Dokumen	232.390.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	65.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	998.000.000	SEKRETARIAT DPRD
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100 persen	1.193.795.000	SEKRETARIAT DPRD
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	40 Laporan	259.655.000	SEKRETARIAT DPRD
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2 Dokumen	934.140.000	SEKRETARIAT DPRD
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD	100 persen	18.731.756.000	SEKRETARIAT DPRD
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	18.731.756.000	SEKRETARIAT DPRD
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			7.447.029.000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.447.029.000	
PERENCANAAN			6.738.799.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	5.603.585.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	15.366.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.972.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	1.394.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	12.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	4.743.375.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	4.706.083.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	36.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.292.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 persen	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	5.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	535.698.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.700.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	85.902.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	2.914.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.473.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.577.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2.580.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325 Laporan	373.552.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	170.310.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1.362.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	75.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	93.948.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	133.836.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	107.036.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	26.800.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	546.544.000	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan	100 persen	452.754.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen	452.754.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data	100 persen	17.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	17.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	100 persen	76.590.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	8 Laporan	76.590.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	588.670.000	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan	100 persen	188.420.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	11.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	45.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	30.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	102.420.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan	100 persen	153.690.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	153.690.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 persen	246.560.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	186.110.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	60.450.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			708.230.000	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	708.230.000	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan	100 persen	228.555.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	4 Laporan	152.750.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	75.805.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial	100 persen	145.875.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	145.875.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Pagu	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Dokumen	33.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	33.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)	100 persen	300.600.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	289.100.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	11.500.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH			26.811.880.000	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			26.811.880.000	
KEUANGAN			26.811.880.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	17.957.674.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 persen	17.742.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3.364.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.378.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Sumber: RKPD Perubahan Tahun 2024

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 18, disampaikan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Guna mendukung terlaksananya pelayanan dasar, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran Pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria saja tetapi SPM harus dapat menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut adalah :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat; dan
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.

c. Kebijakan Umum

Kebijakan umum memerlukan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka Pembangunan jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Perumusan kebijakan umum dan program Pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan Umum RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan kunci dari Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Visi Kota Pekalongan dalam RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah **"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten, dan produktif guna tantangan era perubahan;
3. Mewujudkan lingkungan permukiman yang nyaman;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;
5. Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
6. Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

Tema Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 ditujukan untuk "Evaluasi Dan Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan Aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian", dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dan intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program.

- b. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan.
- c. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak.
- f. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- g. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- h. Peningkatan peran serta stakeholderpotensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
- i. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif.
- j. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya.
- k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.
- l. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.

Guna mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Pekalongan, misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Daerah yang mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan

Misi yang mendukung pencapaian SPM Pendidikan adalah misi kedua, yaitu **"Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Tantangan Era Perubahan"**.

Tabel 1. 13 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2024

Misi Ke – 2	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan	Meningkatkan Akses Pendidikan	Meningkatnya capaian SPM Pendidikan dan Ketercukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	89,50
			Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Kesehatan.

Misi yang mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah misi kesatu, yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat"**.

Tabel 1. 14 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2024

Misi Ke – 1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya indeks keluarga sehat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	91

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

3. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum.

Misi yang mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah misi keempat, yaitu **"Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan"**.

Tabel 1. 15 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

Misi Ke – 4	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
Misi ke – 4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan	Meningkatkan layanan air bersih perpipaan	Meningkatnya layanan air bersih perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola Pemerintah	89,66
	Pemenuhan layanan limbah domestik dan jalan lingkungan	Meningkatnya cakupan layanan pengelolaan limbah domestik dan jalan/jembatan lingkungan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)	11,67

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, 2024

4. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman.

Misi yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah misi ketiga, yaitu “*Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman*”.

Tabel 1. 16 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024

Misi Ke – 3	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang nyaman	Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni	91,68

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan, 2024

5. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

- a. Misi yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah misi keenam, yaitu “*Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah*”

Tabel 1. 17 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

Misi Ke – 6	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah.	Menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	66

Sumber : SATPOLP3KP Kota Pekalongan, 2024

- b. Misi yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran adalah misi ketujuh, yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government*”.

Tabel 1. 18 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran Tahun 2024

Misi Ke – 7	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya penanganan bencana kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100

Sumber : SATPOLP3KP Kota Pekalongan, 2024

- c. Misi yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana adalah misi ketujuh, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*”.

Tabel 1. 19 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024

Misi Ke – 7	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya upaya penanggulangan bencana	Program Penanggulangan bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, 2024

6. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial

Misi yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah misi kesatu, yaitu **"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat"**

Tabel 1. 20 Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

Misi Ke -1	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program (%)
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100
			Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekalongan,2024

d. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, arah kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 ditujukan untuk **"Evaluasi Dan Akselerasi Pencapaian Target-Target Pembangunan dengan Lebih Mengedepankan aspek Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian"**, dengan arah kebijakan meliputi :

- a. Peningkatan sinergisme lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program.
- b. Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan.
- c. Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan.
- d. Peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui penerapan norma kerja dan keselamatan kesehatan kerja, perlindungan terhadap pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.
- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, jabatan publik dan pengambilan keputusan serta peningkatan akses layanan dasar yang terpadu ramah dan inklusif bagi anak.

- f. Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- g. Peningkatan pembangunan sistem penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup, dengan lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- h. Peningkatan peran serta *stakeholder* potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.
- i. Peningkatan kolaborasi dalam penciptaan iklim pariwisata dan ekonomi kreatif yang kondusif.
- j. Peningkatan kualitas dan kuantitas event seni dan budaya.
- k. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.
- l. Peningkatan kapasitas dan kualitas manajemen ASN.

Arah kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal dapat digambarkan sebagai berikut :

1. SPM Bidang Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024 adalah Program Pengelolaan Pendidikan. Fokus Program adalah peningkatan partisipasi pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan non formal/kesetaraan, pengelolaan pendidikan, peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah. Indikator yang akan dicapai pada tahun 2026 yaitu Persentase capaian SPM pendidikan sebesar 100 persen. Dan target tahun 2024 adalah sebesar 89,60%.

Tabel 1. 21 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam penguatan pendidikan karakter berlandaskan nilai-nilai religiusitas dengan tetap meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan disertai penguatan sarana prasarana pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatkan pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi peserta didik	- Pemerataan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan. - Pemerataan partisipasi pendidikan pada semua jenjang pendidikan. - Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai standar Nasional Pendidikan secara bertahap. - Pemenuhan jumlah pendidik yang

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
			bersertifikasi dan memenuhi kualifikasi.

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2. SPM Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam mendukung capaian SPM Kesehatan adalah :

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 91 Persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome) sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 85 Persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 67,50 Persen, Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 91 persen.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 94 persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 45 persen.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 persen, persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran sebesar 96 persen, dan persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 96 persen.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga sehat sebesar 92 persen.

Tabel 1. 22 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan sinergitas lintas sektor, pusat dan daerah, untuk menuju konvergensi dalam intervensi sasaran prioritas dan program prioritas bidang kesehatan, termasuk integrasi lintas program	Persentase capaian SPM kesehatan	Peningkatan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotive, serta keluarga berencana	Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP, serta mensinergikan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yang ada.

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

3. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan prioritas Urusan Pekerjaan Umum dalam mendukung capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah :

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Fokus program adalah penguatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kota, untuk memperluas pelayanan Sambungan Rumah (SR). Indikator yang akan dicapai yaitu cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 89,66 persen.
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Fokus program adalah pembangunan, penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah dalam rangka menaikkan cakupan layanan layak dan cakupan layanan aman, serta pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelola air limbah di tingkat masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome) sebesar 17,23 persen.

Tabel 1. 23 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Peningkatan peran serta <i>stakeholder</i> potensial/ swasta/ masyarakat untuk pengembangan layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan.	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum.	Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Perkotaan

Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Peningkatan sarana Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, 2024

4. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Program prioritas pembangunan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Program Pengembangan Perumahan. Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), masyarakat terdampak bencana dan terdampak pembangunan infrastruktur kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan rumah layak huni sebesar 68,78 persen.

Tabel 1. 24 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Pelaksanaan pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Persentase jumlah rumah layak huni	▪ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh ▪ Menyusun rencana aksi penanganan Kawasan permukiman kumuh.	▪ Membuat perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh dengan melibatkan semua stakeholder yang terkait ▪ Menetapkan data kawasan permukiman kumuh

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekalongan, 2024

5. SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Bidang Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kebakaran dan Bencana.

1) Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program prioritas pembangunan untuk mendukung capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketertiban Umum adalah Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase perda dan perkara yang ditegakkan (IKK Outcome) sebesar 97,56 persen.

Tabel 1. 25 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan SPM	Meningkatkan pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan SPM	▪ Meningkatkan penanganan gangguan trantibum ▪ Meningkatkan penegakan Perda dan Perwal ▪ Meningkatkan kualitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Sumber : Sat.Pol.P3KP Kota Pekalongan, 2024

2) Sub Urusan Kebakaran

Program prioritas pembangunan untuk mendukung capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran adalah Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome) sebesar 100 persen.

Tabel 1. 26 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Persentase Penanganan Bencana Kebakaran	Meningkatkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	▪ Meningkatkan pelayanan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran ▪ Penyediaan hasil analisis sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang akurat ▪ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaraan ▪ Meningkatkan pelayanan penanganan kondisi membahayakan

Sumber : Sat.Pol.P3KP Kota Pekalongan, 2024

3) Sub Urusan Bencana

Program prioritas pembangunan untuk mendukung capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana adalah Program Penanggulangan Bencana. Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

Tabel 1. 27 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Optimalisasi peran serta <i>stakeholder</i> dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Persentase korban bencana yang ditangani	Peningkatan upaya pengurangan risiko bencana	Pemantapan penyelenggaraan pelayanan korban bencana

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, 2024

6. SPM Bidang Urusan Sosial

Program prioritas pembangunan untuk mendukung capaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah:

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK Outcome) sebesar 126,14 persen.
- b. Program Penanganan Bencana
- Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 persen.

Tabel 1. 28 Arah Kebijakan Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2024

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Penguatan kapasitas dan pembinaan usaha bagi penduduk miskin melalui peningkatan keterampilan ekonomis produktif dan kemudahan akses permodalan	Persentase penurunan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) di luar Panti	Peningkatan pelayanan sosial bagi PPKS (Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis)
		Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah	Optimalisasi fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan

Prioritas Kota Pekalongan	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
		tanggap darurat bencana (SPM)	

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pekalongan,2024

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Capaian Kinerja Makro Kota Pekalongan

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	76,71	77,21	0,652
2	Angka Kemiskinan	6,81	6,71	-1,468
3	Angka Pengangguran	5,02	4,91	-2,191
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,34	-1,838
5	PDRB Perkapita	43,29	45,99	6,237
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio) Jawa Tengah	0,369	0,367	-0,002
7	Ketimpangan Pendapatan (Gini ratio) Kota Pekalongan	0,321	0,330	2,804

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2024

Keterangan :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks Pembangunan manusia daerah yang bersangkutan. Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang meliputi umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak.
2. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin daerah yang bersangkutan.
3. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase laju pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan.
4. Angka Pengangguran Terbuka adalah persentase pengangguran daerah yang bersangkutan.
5. PDRB per kapita adalah perbandingan jumlah output yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dari tahun sekarang dengan jumlah penduduk dengan satuan rupiah.
6. Ketimpangan pendapatan yang diukur dengan gini ratio adalah nilai gini ratio daerah yang bersangkutan.

7. Rumus yang digunakan untuk penghitungan kolom perubahan berdasarkan manual penyusunan LPPD tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Capaian Kinerja Makro Tahun Pelaporan} - \text{Capaian Kinerja Makro Tahun Sebelumnya} \times 100\%}{\text{Capaian Kinerja Makro Tahun Sebelumnya}}$$

Capaian kinerja makro ekonomi Kota Pekalongan dapat dilihat dari Pembangunan manusia. IPM berperan penting dalam Pembangunan perekonomian modern karena pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu dimaksimalkan. Mutu penduduk yang baik akan mampu untuk berinovasi mengembangkan faktor-faktor produksi yang ada. Capaian IPM pada tahun 2023 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2024 sebesar 77,21. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan capaian IPM pada tahun 2023 sebesar 76,71, mengalami kenaikan 0,652 point. Point IPM Kota Pekalongan termasuk kategori “tinggi” (IPM diatas 70). IPM Kota Pekalongan pada tahun 2023 berada di peringkat 10 tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Namun demikian terkait capaian Indikator Makro yang dihitung berdasarkan fundamental ekonomi seperti angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan PDRB per Kapita. Capaian kinerja indikator makro Kota Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persentase angka kemiskinan di Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,468% dari 6,81% di tahun 2023 menjadi 6,71% di tahun 2024. Tingkat angka kemiskinan di Kota Pekalongan sejak tahun 2021 selalu mengalami penurunan.
- b. Persentase angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 2,191% dari angka pengangguran 5,02% di tahun 2023 menjadi 4,91% di tahun 2024.
- c. Persentase angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,838%, dari angka 5,44 % pada tahun 2023 menjadi 5,34% pada tahun 2024.
- d. PDRB per kapita mengalami peningkatan sebesar 6,237%. Dari 43,29 juta per tahun di tahun 2023 menjadi 45,99 juta per tahun di tahun 2024.
- e. Ketimpangan pendapatan (gini ratio) Kota Pekalongan mengalami kenaikan sebesar 2,804%. Dari 0,321 di tahun 2023 menjadi 0,330 di tahun 2024.

Keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan atau sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pusat serta stakeholder akan mempengaruhi tingkat ketercapaian indikator secara makro.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 **Indikator Kinerja Kunci Hasil**

Tabel 2. 2 Indiaktor Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	101,289%	DINDIK	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	102,492%	DINDIK	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	99,052%	DINDIK	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	54,398%	DINDIK	
2	KESEHATAN	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	2,520	DINKES	
		Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	DINKES	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan keshatan bayi baru lahir	99,533%	DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,294%	DINKES	
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,251%	DINKES	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan palayanan kesehatan sesuai standar	81,677%	DINKES	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	DINKES	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	DINKES	
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	80,072%	DPUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100%	DPUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	DPUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	86,671%	DINPERKIM	
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	DINPERKIM	
		Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	DPUPR	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	84,501%	DPUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	18,996%	DPUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPR	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	DINPERKIM	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	DINPERKIM	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	12,138%	DINPERKIM	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,642%	DINPERKIM	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	54,832%	DINPERKIM	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,326%	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
		Persentase pelayanan dan evakuasi korban kebakaran	100%	SATPOL PP	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,41	SATPOL PP	
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	DINSOSPPKB	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	DINSOSPPKB	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
7	KETENAGA KERJAAN	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	DINPERINAKEK	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	5,238%	DINPERINAKEK	
		Tingkat produktivitas tenaga kerja	36,854%	DINPERINAKEK	
		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/ LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	11,585%	DINPERINAKEK	
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	32,951%	DINPERINAKEK	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8,234%	DPMPPA	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100%	DPMPPA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	18,457	DPMPPA	
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	45,455%	DINPERPA	
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DINPERKIM	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	DINPERKIM	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	88,734%	DINPERKIM	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	0	DINPERKIM	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	DINPERKIM	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Penanganannya sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	DINPERKIM	
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota	59,15	DLH	
		Terlaksananya pengolahan sampah di wilayah Kab/Kota	94,773%	DLH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	76,119%	DLH	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	97,77%	DISDUKCAPIL	
		Persentase anak usia 0-7 tahun kurang (satu) hari yang memiliki KIA	68,763%	DISDUKCAPIL	
		Kepemilikan akta kelahiran	99,315%	DISDUKCAPIL	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	33,333%	DISDUKCAPIL	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	DPMPPA	
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0	DPMPPA	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran TOTAL	1,64	DINSOP2KB	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,671%	DINSOSPPKB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,475%	DINSOSPPKB	
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	1	DISHUB	
		V/C Ratio di jalan kabupaten/kota	0,44	DISHUB	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DINKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DINKOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	29,46%	DINKOMINFO	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	57,419%	DINDAGKOP UKM	
		Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	32,001%	DINDAGKOP UKM	
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-62,678%	DPMPSTP	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,555%	DINPARBUD PORA	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	20,586%	DINPARBUD PORA	
		Peningkatan Prestasi Olahraga	28	DINPARBUD PORA	
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DINKOMINFO	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DINKOMINFO	
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	74,884%	DINKOMINFO	
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	DINPARBUD PORA	
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	80,67	DINARPUS	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	94,37	DINARPUS	
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional Pasal 40 dan Pasal 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	73,63	DINARPUS	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan	33,33	DINARPUS	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		publik dan kesejahteraan rakyat			
25	PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/Kota (sumber data: one data KKP)	82,70%	DKP	
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	70,89%	DINPARBUD PORA	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	0,78%	DINPARBUD PORA	
		Tingkat Hunian Akomodasi	60,248%	DINPARBUD PORA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6,384%	DINPARBUD PORA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	11,192%	DINPARBUD PORA	
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	722,096%	DINPERPA	
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-2,235%	DINPERPA	
28	KEHUTANAN		100	DLH	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0	SETDA (BAGIAN PEMERINTAHAN)	
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	89,247%	DINDAGKOP UKM	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	68,98%	DINDAGKOP UKM	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	69,7999%	DINDAGKOP UKM	
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	13,834%	DINPERINAKER	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dlam RPIK	60,32%	DINPERINAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	DINPERINAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DINPERINAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0	DINPERINAKER	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100%	DINPERINAKER	
32	TRANSMIGRASI		100%		

Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran I

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2. 3 Indiaktor Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	27,7%	BPKAD	
		Rasio PAD	26,677%	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	89,064%	BPKAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
		(dikurangi transfer expenditures)			
		Opini Laporan Keuangan	9	BPKAD	
2	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	BAG PBJ MINBANG	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukukan Dengan Metode Kompetitif	41,268%	BAG PBJ MINBANG	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	100%	BAG PBJ MINBANG	
		Prosentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintahan daerah	-18,792%	BAG PBJ MINBANG	
3	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	69,656%	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	21,056%	BKPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	47,908%	BKPSDM	
4	KEUANGAN	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	1,149%	BPKAD	
		Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	9,137%	BPKAD	
		Assets Management	4	BPKAD	
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,349%	BPKAD	
5	TRANSPARASI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	94,299%	DINKOMINFO	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	DINKOMINFO	

Capaian Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian informasi capaian keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam pelaksanaan visi dan misi secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Wali Kota Pekalongan.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja Utama

- 1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja Utama = $\frac{Realisasi}{Target}$ x 100%

- 2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja Utama = $\frac{Target}{Realisasi}$ x 100%

- 3. Rumus Efisiensi

Efisiensi = $(\frac{Capaian\ Kinerja}{Capaian\ Anggaran}) - 1 \times 100$

Capaian Indikator Kinerja

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 2. 4 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut:

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

2.2.3.1. Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja

2.2.3.1.1 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Meningkatnya indeks keluarga sehat	1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.35
		2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	104.14
		3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7.60
		4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9.61
2	Meningkatnya penanganan kemiskinan	1	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2.50
3	Meningkatnya akses pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.59
4	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100.00
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59.59
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	1	Kategori Kota Layak Anak	kategori	Madya
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70.81
8	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	1	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	96.24
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	909

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	1	Indeks Kualitas Air	indeks	35.37
11	Optimalnya Kualitas Lahan	1	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23.60
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7.00
13	Optimalnya layanan air minum	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100.00
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	1	Persentase pelayanan sampah	persen	71.12
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	1	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B
		2	Persentase keterhubungan jalan	persen	100.00
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan ekonomi	persen	3.32
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang Diselenggarakan	1	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	93.33
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	1	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100.00
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	1	Indeks SPBE	indeks	3.05
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	1	IKM Kota	persen	83.79
		2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97.00
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	Indeks Merit System	indeks	250.00
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1	Nilai SAKIP Kota	skor	75.07
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Maturitas SPIP	skor	3.60
		2	Jumlah OPD yang menyangad predikat WBK/WBBM	OPD	6.00

Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Wali Kota Pekalongan Tahun 2024

2.2.3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Pekalongan dan Indikator Tujuan ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 6 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya indeks keluarga sehat	1	Indeks Sehat Keluarga	indeks	0.35	0.38	108.57	Sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kategori
		2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	104.14	129.70	80.29	Berhasil
		3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7.60	10.89	69.76	Cukup Berhasil
		4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9.61	16.86	56.99	Tidak Berhasil
2	Meningkatnya penanganan kemiskinan	1	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	2.50	5.69	227.59	Sangat berhasil
3	Meningkatnya akses pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.59	9.34	97.39	Sangat berhasil
4	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	59.59	Na	Na	Belum rilis dari BPS
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	1	Kategori Kota Layak Anak	kategori	Madya	Na	Na	Belum rilis dari Kementerian PPA
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70.81	76.06	107.41	Sangat berhasil
8	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	1	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	96.24	94.12	97.80	Sangat berhasil
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	909	379.02	239.83	Sangat berhasil
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	1	Indeks Kualitas Air	indeks	35.37	50.56	142.95	Sangat berhasil
11	Optimalnya Kualitas Lahan	1	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23.60	26.14	110.76	Sangat berhasil
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7.00	3.00	42.86	Sangat Tidak Berhasil
13	Optimalnya layanan air minum	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	1	Persentase pelayanan sampah	persen	71.12	71.85	101.03	Sangat berhasil
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	1	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	100.00	Sangat berhasil
		2	Persentase keterhubungan jalan	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kategori
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan ekonomi	persen	3.32	5.87	176.81	Sangat berhasil
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	1	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	93.33	146.67	157.15	Sangat berhasil
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	1	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	1	Indeks SPBE	indeks	3.05	3.76	123.28	Sangat berhasil
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	1	IKM Kota	persen	83.79	91.37	109.05	Sangat berhasil
		2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97.00	96.03	99.00	Sangat berhasil
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1	Indeks Merit System	indeks	250.00	327.00	130.80	Sangat berhasil
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1	Nilai SAKIP Kota	skor	75.07	73.02	97.27	Sangat berhasil
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	Na	Na	Belum rilis dari BPK
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1	Maturitas SPIP	skor	3.60	3.01	83.61	Berhasil
		2	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	6.00	3.00	50.00	Sangat Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) 21 indikator (70.00 %) dikategorikan Sangat berhasil;
- 2) 2 indikator (6.67 %) dikategorikan Berhasil;
- 3) 1 indikator (3.33 %) dikategorikan Cukup Berhasil;
- 4) 1 indikator (3.33 %) dikategorikan Tidak Berhasil;
- 5) 2 indikator (6.67 %) dikategorikan Sangat Tidak Berhasil;
- 6) 3 indikator (10,00%) belum dapat dikategorikan karena data belum tersedia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 116.79 % dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel 2. 7 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2022	2023	2024	
1		1 Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.28	0.35	0.38	▲

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
					2022	2023	2024	
	Meningkatnya indeks keluarga sehat	2	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	123.87	122.77	129.70	▼
		3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	9.91	13.71	10.89	▲
		4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	12.21	18.42	16.86	▲
2	Meningkatnya penanganan kemiskinan	1	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	1.42	4.40	5.69	▲
3	Meningkatnya akses pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.20	9.29	9.34	▲
4	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100.00	100.00	100.00	●
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	61.37	65.31	Na	Belum tersedia
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	1	Kategori Kota Layak Anak	kategori	Madya	Nindya	Na	Belum tersedia
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70.35	73.95	76.06	▲
8	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	1	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	93.97	95.09	94.12	▼
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	980.14	880.83	379.02	▲
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	1	Indeks Kualitas Air	indeks	45.33	48.86	50.56	▲
11	Optimalnya Kualitas Lahan	1	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23.77	24.39	26.14	▲
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	1.00	2.00	3.00	▲
13	Optimalnya layanan air minum	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100.00	100.00	100.00	●
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	1	Persentase pelayanan sampah	persen	72.36	71.45	71.85	▲
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	1	Tingkat pelayanan jalan (<i>Level Of Service</i>)	kategori	B	B	B	●
		2	Persentase keterhubungan jalan	persen	100.00	100.00	100.00	●

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			Ket
				2022	2023	2024	
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 Pertumbuhan ekonomi	persen	5.76	5.44	5.87	▲
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	1 Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	95.56	111.11	146.67	▲
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	1 Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	●
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	1 Indeks SPBE	indeks	3.14	3.29	3.76	▲
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	1 IKM Kota	persen	90.44	90.69	91.37	▲
		2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	90.01	96.62	96.03	▼
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1 Indeks Merit System	indeks	264.50	327.00	327.00	●
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1 Nilai SAKIP Kota	skor	73.31	72.83	73.02	▲
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	WTP	WTP	Na	Belum tersedia
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Maturitas SPIP	skor	3.02	3.00	3.01	▲
		2 Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2.00	3.00	3.00	●

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

Tabel 2. 8 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir RPJMD 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir RPJMD 2026	Tingkat Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya indeks keluarga sehat	1 Indeks Keluarga Sehat	indeks	0.38	0.50	76.00	Berhasil
		2 Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	129.70	80.01	61.68	Tidak Berhasil
		3 Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	10.12	7.00	64.27	Cukup Berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir RPJMD 2026	Tingkat Capaian (%)	Kategori
		4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	16.08	9.00	53.38	Tidak Berhasil
2	Meningkatnya penanganan kemiskinan	1	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	5.69	3.00	189.67	Sangat berhasil
3	Meningkatnya akses pendidikan	1	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9.34	9.92	94.15	Sangat berhasil
4	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil
5	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	Na	61.00	Na	Belum tersedia
6	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	1	Kategori Kota Layak Anak	kategori	Na	Madya	Na	Belum tersedia
7	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76.06	71.34	106.62	Sangat berhasil
8	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	1	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	94.12	100.00	94.12	Sangat berhasil
9	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	1	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	379.02	565.00	67.08	Cukup Berhasil
10	Menurunnya tingkat pencemaran air	1	Indeks Kualitas Air	indeks	50.56	35.39	142.86	Sangat berhasil
11	Optimalnya Kualitas Lahan	1	Indeks Kualitas Lahan	indeks	26.14	23.61	110.71	Sangat berhasil
12	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	3.00	7.00	42.86	Sangat Tidak Berhasil
13	Optimalnya layanan air minum	1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil
14	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	1	Persentase pelayanan sampah	persen	71.85	73.12	98.26	Sangat berhasil
15	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	1	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	B	100.00	Sangat berhasil
		2	Persentase keterhubungan jalan	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil
16	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan ekonomi	persen	5.87	4.55	129.01	Sangat berhasil

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir RPJMD 2026	Tingkat Capaian (%)	Kategori
17	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	1 Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	146.67	100.00	146.67	Sangat berhasil
18	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	1 Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil
19	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>Smart Governance</i>)	1 Indeks SPBE	indeks	3.76	3.25	115.69	Sangat berhasil
20	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (<i>Smart Governance</i>)	1 IKM Kota	persen	91.37	84.09	108.66	Sangat berhasil
		2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	96.03	97.50	98.49	Sangat berhasil
21	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1 Indeks Merit System	indeks	327.00	260.00	125.77	Sangat berhasil
22	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	1 Nilai SAKIP Kota	skor	73.02	76.07	95.99	Sangat berhasil
23	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	1 Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	kategori	Na	WTP	Na	Belum tersedia
24	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	1 Maturitas SPIP	skor	3.01	4.00	75.25	Berhasil
		2 Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	3.00	8.00	37.50	Sangat Tidak Berhasil

2.2.3.1.3. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan yaitu :

Tabel 2. 9 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1 Usia Harapan Hidup	tahun	74.57	74.79	100.30	Sangat berhasil
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1 Angka Kemiskinan	persen	6.29	6.71	93.74	Sangat berhasil
3	Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	1 Indeks Pembangunan Manusia	indeks	75.71	77.21	101.98	Sangat berhasil
		2 Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	6.31	4.91	128.51	Sangat berhasil

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Kategori
4	Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	1 Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	77.78	100.00	128.57	Sangat berhasil
5	Menurunkan luas genangan banjir dan rob	1 Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	persen	19.58	8.17	239.65	Sangat berhasil
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50.88	59.15	116.25	Sangat berhasil
7	Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar	1 Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	90.37	91.95	101.75	Sangat berhasil
8	Menumbuhkan tingkat Perekonomian masyarakat	1 PDRB perkapita	persen	37.82	Na	Na	Belum tersedia
9	Melestarikan seni budaya	1 Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100.00	100.00	100.00	Sangat berhasil
10	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	1 Jumlah konflik sosial	kasus	0.00	0.00	100.00	Sangat berhasil
11	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	73.69	Na	Na	Belum tersedia

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) 10 indikator (83.33 %) dikategorikan Sangat berhasil
- 2) 2 indikator (16.67 %) belum dapat dikategorikan karena data belum tersedia

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 121.09 % dengan kategori Sangat Berhasil.

2.2.3.1.4. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya indeks keluarga sehat

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 82,5 % dengan kategori Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Indeks Keluarga Sehat	0,22	indeks	0.28	0.35	0.35	0.38	108.57	0,50
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	152,41	per 100.000 KH	123.87	122.77	104.14	129.70	80.29	80,01

3	Angka Kematian Bayi (AKB)	8,81	per 1.000 KH	9.91	13.71	7.60	10.89	69.76	7,00
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	10,84	per 1.000 KH	12.21	18.42	9.61	16.86	56.99	9,00

1. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan kedua belas (12) indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8. Indeks keluarga sehat Kota Pekalongan tahun 2024 sebesar 0,38 melebihi target RPJMD yang telah ditetapkan, serta lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2. 11 Perbandingan Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan dengan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

No	Daerah	Indeks Keluarga Sehat
	Provinsi Jawa Tengah	0.32
1	Kota Semarang	0.846
2	Kota Surakarta	0.644
3	Kabupaten Kudus	0.635
4	Kota Salatiga	0.468
5	Kota Tegal	0.468
6	Kabupaten Jepara	0.455
7	Kabupaten Purbalingga	0.449
8	Kabupaten Kendal	0.39
9	Kota Magelang	0.383
10	Kabupaten Pati	0.381
11	Kabupaten Demak	0.378
12	Kota Pekalongan	0.376
13	Kabupaten Rembang	0.371
14	Kabupaten Sukoharjo	0.346
15	Kabupaten Grobogan	0.318

Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah, 2025

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa capaian indeks keluarga sehat tahun 2024 Kota Pekalongan lebih besar dari capaian Provinsi Jawa Tengah dan berada pada urutan 12 dari Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Faktor – faktor yang mendukung tercapainya target Indeks Keluarga Sehat:

- a. *Updating* data PISPK secara berkesinambungan;
- b. Terjalannya kerjasama yang baik dengan Lintas Sektor;
- c. Adanya integrasi dari tiap program.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung

sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.696.892.000	30.783.348.000	28.673.029.385
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.127.518.000	2.127.518.000	2.124.597.450
Jumlah		25.824.410.000	32.910.866.000	30.797.626.835

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 93,58%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 108,57%. maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 16,02% pada sasaran ini.

Pencapaian indikator pada sasaran ini didukung melalui 2 program sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena kolaborasi Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat Kota Pekalongan terjalin sangat baik program ini diwujudkan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian layanan UKM dan UKP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena masyarakat mudah dalam mengakses layanan kesehatan dan juga didukung peran tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara optimal.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan target untuk indikator ini adalah 93% dan realisasi 97,22% sehingga capaiannya 104,54%. Indikator program ini dapat terealisasi karena kolaborasi Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat Kota Pekalongan terjalin sangat baik program ini diwujudkan dalam pelaksanaan Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri dengan target 33% dan realisasi 48,8% sehingga capaiannya 147,89%. Indikator ini tercapai karena peran tenaga kesehatan dalam melakukan promosi kesehatan dan pemberdayaan kader yang didukung dengan adanya pelatihan, baik pelatihan untuk tenaga kesehatan maupun kader kesehatan yang bersumber dari DAK Nonfisik.

2. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) mencerminkan risiko yang dihadapi para ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan dan *obstetric*.

Kejadian meninggalnya ibu maternal biasanya disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang mana melatarbelakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan dan terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. Selain itu penyebab kematian ibu maternal juga tidak lepas dari kondisi ibu itu sendiri, yaitu terlalu tua (>35 tahun) dan terlalu muda (<20 tahun) pada saat melahirkan, terlalu banyak anak (>4 anak) dan terlalu rapat jarak kelahiran/paritas (<2 tahun).

Tabel 2. 12 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

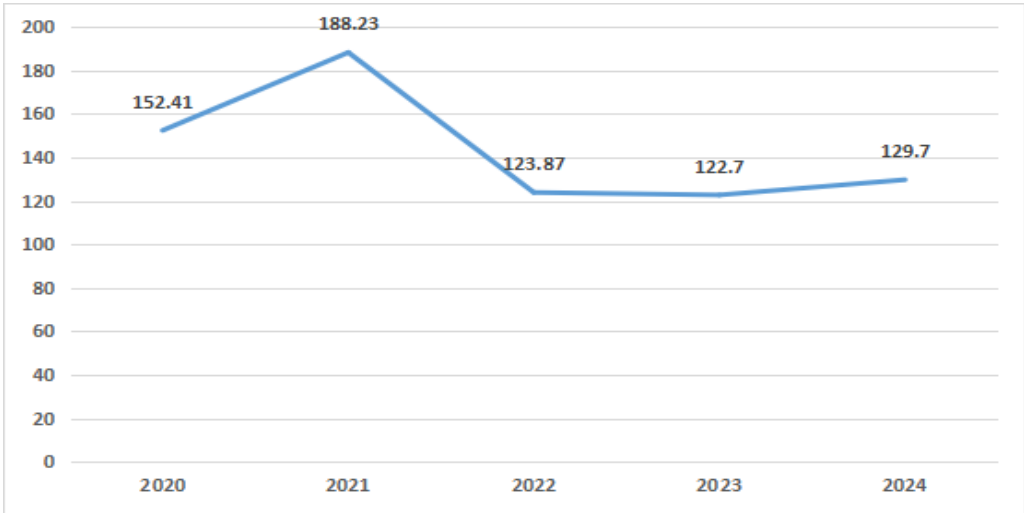
Tahun	Jumlah Kasus Kematian	Jumlah Kelahiran	AKI per 100.000 KH
2021	11	5844	188,23
2022	7	5651	123,87
2023	6	4887	122,77
2024	5	3855	129,70

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kematian ibu di Kota Pekalongan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan. Namun untuk capaian AKI di tahun 2024 nampaknya masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan jumlah kelahiran hidup yang merupakan angka pembanding cenderung mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Sehingga di tahun 2024 AKI kembali meningkat dengan capaian 129,70 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu Maternal di Kota Pekalongan dalam lima tahun terakhir (2020-2024) mengalami fluktuasi, dimana dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan penurunan pada tahun 2022 dan 2023, dan naik lagi pada tahun 2024, seperti terlihat pada grafik berikut:

Gambar 2. 1 Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2020-2024



Faktor – faktor ketidak tercapainya target Angka Kematian Ibu :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya skrining resiko kehamilan;
- b. Keterlambatan keluarga dalam pengambilan keputusan untuk sampai ketempat pelayanan kesehatan;
- c. Belum optimalnya peran lintas sektor/masyarakat dalam melakukan pendampingan pada ibu hamil resiko tinggi yang memerlukan tatalaksana rujukan;
- d. Tingginya kasus ibu hamil dengan faktor resiko sehingga meningkatkan tingginya komplikasi kebidanan;
- e. Kurangnya pengetahuan ibu akan bahaya & resiko kehamilan;
- f. Belum optimalnya peran suami siaga.

Upaya yang dilakukan guna menurunkan Angka Kematian Ibu :

- a. Fasilitasi pembiayaan pemeriksaan kehamilan & persalinan dengan UHC;
- b. Peningkatan kualitas ANC terpadu;
- c. Pemeriksaan dan skrining penyakit penyerta pada ibu hamil;
- d. Peningkatan SDM kesehatan melalui OJT gawat darurat maternal neonatal di Rumah Sakit;
- e. Skrining/ deteksi resiko kehamilan dan tatalaksananya oleh dokter Spesialis kebidanan di wilayah kecamatan/puskesmas;
- f. Pertemuan lintas sektor dan jejaring dalam percepatan penurunan angka kematian ibu.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	117.635.000

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,11%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 80,29% maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di fasilitas kesehatan primer. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang juga didukung dengan peran aktif masyarakat dalam

memanfaatkan pelayanan kesehatan.

3. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal, yang merupakan masalah yang kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan kongenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan beberapa faktor ibu selama hamil dan ibu melahirkan, seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan, dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Tabel 2. 13 Kasus Kematian Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Kasus Kematian	Jumlah Kelahiran	AKB per 1.000 KH
2021	52	5844	8,9
2022	56	5651	9,91
2023	67	4887	13,71
2024	42	3855	10,89

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

Angka Kematian Bayi dari tahun 2022 sampai 2024 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2022 adalah 9,91 dengan jumlah kasus kematian sejumlah 56 kasus. Sedangkan pada tahun 2023, Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan menjadi 13,71 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sejumlah 67 kasus, dan di tahun 2024 Angka Kematian Bayi sebesar 10,89 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 42 kasus.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan kongenital, kelainan saluran pencernaan, pneumonia, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

Faktor – faktor ketidak tercapainya target Angka Kematian Bayi :

- a. Masih tingginya ibu hamil dan ibu bersalin dengan resiko tinggi;
- b. Masih tingginya bayi dengan resiko tinggi;
- c. Masih adanya mitos di masyarakat yang tidak sesuai bagi kesehatan bayi;
- d. Belum optimalnya sistem rujukan yang ada;
- e. Kurang optimalnya tatalaksana petugas dalam menangani bayi beresiko;
- f. Keterlambatan keluarga dalam pengambilan keputusan untuk dilakukan tatalaksana/rujukan ke FKL;
- g. Masih kurangnya pemahaman keluarga tentang tanda bahaya BBL;
- h. Kondisi ekonomi/kemiskinan sehingga keluarga tidak dapat melakukan perawatan kesehatan/pemenuhan gizi secara optimal;
- i. Masih kurangnya pemenuhan fasilitas rujukan yang lengkap di FKTL;
- j. Masih kurangnya alat penunjang kesehatan yang dibutuhkan di FKTL bagi tatalaksana bayi beresiko.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

- a. Deteksi resiko pada ibu hamil dan ibu bersalin;
- b. Deteksi resiko pada bayi;
- c. Optimalisasi sistem rujukan;
- d. Edukasi tentang tanda bahaya bayi berisiko tinggi;
- e. Peningkatan kapasitas petugas dalam menangani bayi berisiko;
- f. Fasilitasi jaminan pembiayaan UHC bagi BBL berisiko/sunting;
- g. Pemenuhan sarana penunjang tatalaksana BBL di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
- h. Peningkatan kualitas ANC terpadu;
- i. Penguatan lintas sektor/jejaring dalam skrining dan deteksi bayi, balita dengan risiko tinggi.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	117.635.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,11%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 69,76%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di fasilitas kesehatan primer.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang juga didukung dengan peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.

4. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.

Tabel 2. 14 Kasus Kematian Balita dan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Tahun	Jumlah Kasus Kematian	Jumlah Kelahiran	AKABA per 1.000 KH
2021	60	5844	10,27

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2025

Capaian AKABA dalam kurun waktu tahun 2022-2024 cenderung fluktuatif. AKABA dari tahun 2022 ke tahun 2023 meningkat dari 12,21 per 1.000 KH pada tahun 2022 dengan 69 kasus kematian menjadi 18,42 per 1.000 KH pada tahun 2023 dengan 65 kasus kematian. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 16,86 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sebanyak 65.

Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit.

Tantangan/hambatan pada capaian Angka Kematian Balita (AKABA) :

- a. Masih tingginya balita dengan resiko tinggi;
- b. Masih tingginya kasus stunting dan permasalahan gizi lainnya, baik gizi kurang maupun gizi buruk;
- c. Adanya mitos di masyarakat yang kurang mendukung bagi kesehatan.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

- a. Kegiatan deteksi resiko pada balita melalui saber AKB;
- b. Optimalisasi posyandu dalam skrining awal kesehatan balita;
- c. Edukasi ke masyarakat tentang pentingnya gizi bagi kesehatan balita;
- d. Edukasi ke masyarakat tentang tanda bahaya bagi balita;
- e. Fasilitasi jaminan pembiayaan UHC bagi BBL beresiko/stunting;
- f. Pemenuhan sarana penunjang tatalaksana BBL di poned;
- g. Peningkatan kualitas ANC terpadu;
- h. Penguatan lintas sektor/jejaring dalam skrining dan deteksi bayi, balita risiko tinggi.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	117.635.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,11%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 56,99%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Angka Kematian Balita (AKABA) tidak mencapai target karena dipengaruhi oleh jumlah kematian balita dan jumlah kelahiran hidup yang mana dua hal tersebut tidak dapat diprediksi. Meskipun demikian, indikator sasaran ini didukung melalui program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di fasilitas kesehatan primer. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Program ini mengedepankan pelayanan kesehatan yang diberikan, yang meliputi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan layanan kesehatan, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, dan penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya peran aktif tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam memberikan promosi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang juga didukung dengan peran aktif masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan.

SASARAN 2 : Meningkatnya penanganan kemiskinan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % berdasarkan skala ordinal dengan kategori **Sangat Berhasil**. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	1,00	%	1.42	4.40	2.50	5.69	227.59	3.00

Indikator Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) adalah penurunan warga miskin berdasarkan penurunan dari data DTKS tahun sebelumnya dengan tahun N. Sedangkan DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang databasenya di Kementerian Sosial. Data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial, serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Pada tahun 2024, Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS) Kota Pekalongan sebesar 5.69 % dan mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.

Hal ini didukung oleh faktor-faktor dibawah ini:

- 1. Verifikasi dan Validasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang terus dilaksanakan
- 2. Berkoordinasi kepada petugas SLRT dan Faskel untuk mengupdate DTKS
- 3. Upaya komitmen antara pemangku kepentingan untuk penurunan DTKS

Kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi antara lain:

- 1. Meningkatkan akses bantuan kemensos RI melalui Sentra Terpadu Kartini berupa Program Atensi (Asistensi Rehabilitasi Sosial) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar

- masyarakat, memberikan perawatan sosial, memberikan dukungan keluarga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu masyarakat kembali berfungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Bantuan atensi yang sudah disalurkan di tahun 2024 antara lain alat bantu untuk disabilitas (kursi roda, kaki palsu, alat bantu dengar, alat bantu jalan), bantuan kewirausahaan berupa bantuan barang modal usaha untuk lansia disabilitas, serta bantuan pemenuhan hidup layak untuk lansia disabilitas;
2. Bekerjasama dengan Rumah BUMN menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan dengan tujuan melatih ketrampilan berwirausaha bagi masyarakat miskin agar dapat mengembangkan usaha melalui ketrampilan yang diberikan;
 3. Literasi keuangan dan digital melalui sosialisasi untuk penerima PKH tentang strategi agar lebih bijak dalam berhutang dan memanfaatkan uang dengan lebih baik.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	184.825.000	182.395.000	175.541.446
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	305.953.000	258.313.000	242.368.617
Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.194.633.000	1.244.173.000	1.181.358.653
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	865.849.000	843.754.000	815.335.298
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.526.198.000	1.427.838.000	1.390.295.980
Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	720.967.000	448.352.000	378.014.351
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	265.306.000	265.306.000	254.982.585
Jumlah		5.063.731.000	4.670.131.000	4.437.896.930

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,02 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 227.59 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator program Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan. Target untuk indikator ini adalah 67% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 149.25%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya sharing kegiatan dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang telah

diselesaikan pada Triwulan 4 tahun 2024 dan diikuti oleh semua Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) dilaksanakan dengan indikator Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan dengan target 10 persen dan terealisasi 77,30 persen dengan tingkat capaian 772,96%. Indikator ini tercapai karena banyak nya data DT Jateng yang sudah terverifikasi dan validasi.
 - 2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif dengan target 75 persen dan terealisasi 89,44 persen dengan tingkat capaian 119,25 %. Indikator ini tercapai karena banyaknya LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang sudah mempunyai Surat Tanda Daftar dan beberapa juga sudah bersertifikat dari Kementerian Hukum dan Ham
- b. Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator program Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome). Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 126.14% sehingga capaiannya 126.14%. Indikator program ini dapat terealisasi karena banyaknya kelayan yang terlayani berasal dari luar Kota Pekalongan baik itu disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan gepeng. Jumlah Kelayan yang dilayani terdiri dari disabilitas terlantar sebanyak 207 orang, anak terlantar sebanyak 26 orang, lansia terlantar sebanyak 39 orang, gelandangan pengemis sebanyak 32 orang dengan jumlah yang dilayani sebanyak 304 orang. Data jumlah PMKS di Kota Pekalongan sebanyak 241 orang, terdiri dari anak terlantar 1 orang, lansia terlantar sebanyak 122 orang, gelandangan pengemis sebanyak 7 orang dan disabilitas mental sebanyak 111 orang. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dilaksanakan dengan indikator Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan dengan target 100 persen dan terealisasi 132,89 persen dengan tingkat capaian 132,89 %. Indikator ini tercapai karena jumlah yang terlayani melebihi jumlah yang seharusnya dilayani, hal ini dikarenakan jumlah pelayanan kelayan pada RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat) melebihi jumlah data pada PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial).
- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial dilaksanakan dengan indikator Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial dengan target 3,68 persen dan terealisasi 8,80 persen dengan tingkat capaian 239,13 %. Indikator ini tercapai karena pelaksanaan tepat dalam memberikan pelayanan, seperti pemberian alat bantu dan bantuan kepada lansia disabilitas, pelaksanaan reunifikasi, nikah massal, dan kegiatan pelatihan untuk WRSE (Wanita Rawan Sosial Ekonomi).

- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan indikator program Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial. Target untuk indikator ini adalah 55.12% dan realisasi 27.64% sehingga capaiannya 50.15%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinsos P2KB dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan indikator Persentase graduasi KPM PKH dengan target 10 persen dan terealisasi 2,25 persen dengan tingkat capaian 22,52 %.
- d. Program Penanganan Bencana dengan indikator program Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM). Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinsos P2KB dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan target 100 persen dan terealisasi 102,33 persen dengan tingkat capaian 102,33 %. Indikator ini tercapai karena adanya koordinasi antar bidang dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dalam penanganan bencana alam.
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator program Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinsos P2KB dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
- 1) Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan dengan target 100 persen dan terealisasi 100 persen dengan tingkat capaian 100 %.

SASARAN 3 : Meningkatnya akses pendidikan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 16 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Rata-Rata Lama Sekolah	8.96	tahun	9.18	9.29	9.59	9.34	97.39	9.92

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen pembentuk indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yaitu pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Rata-rata lama sekolah Kota Pekalongan tahun 2024 sebesar 9,34 tahun. Meskipun belum memenuhi target, capaian rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 sebesar 8,96, tahun 2022 sebesar 9,18 serta tahun 2023 sebesar 9,20.

Tabel 2. 17 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024

No	Daerah	Rata-rata Lama Sekolah
1	Nasional	8.85
2	Provinsi Jawa Tengah	8.02
3	Kota Pekalongan	9.34
4	Kabupaten Batang	7.08
5	Kabupaten Pekalongan	7.48
6	Kota Tegal	9.28

Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, Kota Pekalongan memiliki Rata-rata Lama Sekolah sebesar 9,34 yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Nasional sebesar 8,85 dan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,02. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat pendidikan di Kota Pekalongan lebih baik jika dibandingkan dengan Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pada tingkat Kabupaten/Kota, Kabupaten Pekalongan memiliki Rata-rata Lama Sekolah 7,48 lebih rendah dari Rata-rata Lama Sekolah Kota Pekalongan. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Batang sebesar 7,08 lebih rendah lagi jika dibandingkan Kabupaten Pekalongan maupun Kota Pekalongan. Namun untuk Kota Tegal memiliki Rata-rata Lama Sekolah yang hampir setara dengan Kota Pekalongan hanya selisih lebih rendah, yaitu 9,28. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pendidikan antara di Kota dan Kabupaten. Secara keseluruhan, Kota Pekalongan memiliki prestasi yang cukup baik dalam tingkat pendidikan, dengan Rata-rata Lama Sekolah yang lebih tinggi dari Rata-rata Lama Sekolah tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan maupun Kota tegal.

Faktor pendukung keberhasilan pada sasaran ini sebagai berikut :

1. Dilakukan sosialisasi pada berbagai macam kebijakan maupun program pemerintah yang berkaitan dengan upaya menumbuhkan minat dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada jenjang pendidikan formal maupun non formal;

2. Peningkatan akses layanan pendidikan berupa kemudahan menjangkau lokasi sekolah dan biaya pendidikan oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Peningkatan mutu layanan pendidikan berupa pemenuhan sarana prasarana maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang layak serta memenuhi standar nasional pendidikan.

Tantangan/hambatan dalam mencapai sasaran ini adalah masih banyaknya penduduk usia muda di Pekalongan yang cenderung lebih memilih bekerja daripada harus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Lebih mengintensifkan sosialisasi maupun publikasi seputar informasi pendidikan di Kota Pekalongan serta memberikan insentif dan keringanan/ pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk terus bersekolah dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dalam hal mengakses data maupun informasi seputar jenjang pendidikan menengah sehingga akan memudahkan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam menentukan jenis kontribusi yang tepat guna dan tepat sasaran bagi peningkatan partisipasi pendidikan menengah di Kota Pekalongan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	28.747.931.000	29.136.918.000	28.833.876.855
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.258.164.000	23.527.821.000	23.489.264.071
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	9.122.233.000	9.097.976.000	9.062.246.167
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.250.569.000	4.260.569.000	4.162.726.121
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	16.173.622.000	14.720.532.000	14.040.102.491
Jumlah		81.552.519.000	80.743.816.000	79.588.215.705

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,57%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 97.39 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan, target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 99,12% sehingga capaiannya 99,12%. Indikator program ini tidak memenuhi target karena ada beberapa capaian indikator mutu pada SPM yang belum mencapai target, yaitu APS 5-6 tahun, APM, APS 7-12 tahun, Indeks Iklim Inklusivitas SD, APS 13-15 tahun, Kemampuan Numerasi SMP, dan APS 7-18 tahun. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar. Kegiatan ini diukur dengan indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome/ SPM), dengan target 99%, untuk realisasinya belum tersedia (menunggu rilis dari rapor pendidikan).
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Kegiatan ini diukur dengan indikator tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome/SPM), dengan target 95% untuk realisasi nya belum tersedia (menunggu rilis dari rapor pendidikan).
 - c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Kegiatan ini diukur dengan indikator tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome/SPM), dengan target 99% untuk realisasi nya belum tersedia (menunggu rilis dari rapor pendidikan).
 - d. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Kegiatan ini diukur dengan indikator tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome/SPM), dengan target 65% untuk realisasi nya belum tersedia (menunggu rilis dari rapor pendidikan).
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan, target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 60% sehingga capaiannya 60%. Indikator program ini tidak terealisasi karena keterbatasan alokasi kuota peserta sertifikasi pendidik yang disediakan oleh pemerintah pusat. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF, dengan target 86,75% realisasi 49,41%. Indikator tersebut tidak tercapai karena keterbatasan alokasi kuota peserta sertifikasi pendidik yang disediakan oleh pemerintah pusat.

SASARAN 4 : Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran

indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 18 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021	Tahun 2023			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100	persen	100	100	100	100	100	100

Indikator Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi**.

Pendidikan karakter dan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD, SMP, dan pusat kegiatan belajar masyarakat). Jumlah seluruh sekolah yang telah mengimplementasikan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan adalah 489 sekolah.

Faktor pendukung keberhasilan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan anggaran yang memadai dalam pembangunan Pendidikan karakter siswa dari jenjang anak usia dini sampai dengan Pendidikan dasar;
2. Adanya program dan kegiatan yang tepat sasaran dalam pengembangan dan pembinaan Pendidikan karakter, seperti pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar dan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi antara lain:

1. Mendorong satuan pendidikan untuk memasukkan Pendidikan karakter dan keagamaan di dalam Kurikulum Operasional Sekolah (KOS);
2. Pengembangan kurikulum mulok pendidikan karakter di satuan pendidikan salah satunya kurikulum mulok kebencanaan;
3. Penguatan peran Guru, dengan memberikan bimbingan teknis terkait pendidikan karakter, sehingga guru mampu menjadi fasilitator dalam pembelajaran berbasis karakter dan keagamaan;
4. Sosialisasi dan FGD tentang Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH) yang merupakan program prioritas Kemendikdasmen dalam penguatan pendidikan karakter.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	191.129.000	191.129.000	182.791.000
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan	81.300.000	81.300.000	80.575.000

	Non Formal			
Jumlah		272.429.000	272.429.000	263.366.000

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,67%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,44% pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Kurikulum. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Pendidikan dalam pengembangan dan penyediaan kurikulum muatan lokal sesuai dengan regulasi dan kebutuhan. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen Dinas Pendidikan untuk pengembangan dan penyediaan kurikulum muatan lokal sesuai dengan regulasi dan kebutuhan salah satunya melalui penyusunan kurikulum mulok kebencanaan jenjang SD dan SMP.
2. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF, dengan target 100% realisasi 100%. Indikator ini tercapai karena komitmen Dinas Pendidikan untuk pengembangan dan penyediaan kurikulum muatan lokal sesuai dengan regulasi dan kebutuhan salah satunya melalui penyusunan kurikulum mulok kebencanaan jenjang PAUD.

SASARAN 5 : Optimalnya Pengarusutamaan Gender

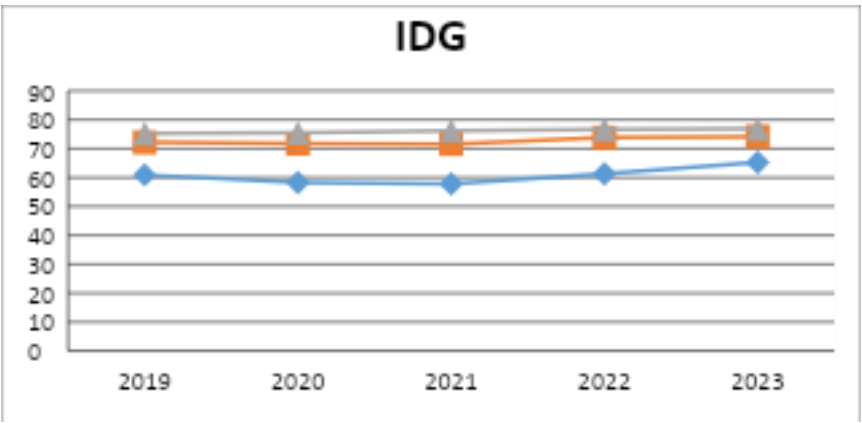
Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja belum dapat diketahui karena data belum dirilis. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. 19 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJM D 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	58,29	indeks	61.37	65.31	65.31	Na	Na	65.31

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) diukur berdasarkan angka Indeks Pemberdayaan Gender IDG yang dikeluarkan BPS. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan tahun 2024 masih belum tersedia karena menunggu rilis dari BPS. Sedangkan selama periode tahun 2015 sampai dengan 2021, nilai IDG Kota Pekalongan mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami penurunan. IDG Kota Pekalongan jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional masih di bawah rata-rata, dapat dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2. 2 IDG Kota Pekalongan dibandingkan dengan IDG Provinsi Jawa Tengah dan IDG Nasional



Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Dukungan dari Pemimpin Daerah, DPRD, dan Ketua TP PKK Kota Pekalongan dalam upaya optimalisasi pengarusutamaan gender;
2. Potensi masyarakat untuk menjadi bagian dalam upaya peningkatan IDG cukup besar khususnya dari sisi SDM (lembaga/organisasi kemasyarakatan, RT/RW, organisasi perempuan, Forum Anak, Karang Taruna, PKK, LPM, BKM, Lebe, dan dunia usaha);
3. Sinergitas dan kolaborasi antar lembaga dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan cukup baik dalam mensinergikan program optimalisasi pengarusutamaan gender.

Tantangan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Budaya patriarki cukup besar di Kota Pekalongan sehingga untuk membangun paradigma responsif gender membutuhkan usaha yang intens dan membutuhkan waktu;
2. Masih terdapat tokoh agama/tokoh masyarakat yang belum sejalan dengan upaya optimalisasi pengarusutamaan gender.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh upaya/strategi:

1. Optimalisasi Pengarusutamaan Gender melalui advokasi PUG dengan sasaran yang lebih luas khususnya tokoh agama/tokoh masyarakat;
2. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender menjadi salah satu upaya untuk optimalisasi pengarusutamaan gender;
3. Meningkatkan sinergitas dan optimalisasi peran OPD terkait dalam upaya peningkatan sumbangan pendapatan perempuan yang menjadi salah satu indikator komposit IDG dan menjadi target kinerja.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000	35.000.000	34.221.500
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	220.000.000	220.000.000	202.814.800
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Program Perlindungan Perempuan	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	20.000.000	20.000.000	19.302.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	61.308.000	61.308.000	48.185.862
Jumlah		356.308.000	356.308.000	324.524.162

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 91.08 %. Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilihat dikarenakan capaian kinerja belum dirilis oleh BPS.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender adalah indikator yang diukur dengan membandingkan Jumlah akumulasi sub kegiatan yang responsif gender pada tahun-n dengan target seluruh sub kegiatan yang akan di meresponsifkan gender selama periode 5 tahun (dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026). Target untuk indikator ini adalah 7,39% dan realisasi 19,15% sehingga capaiannya 259,14%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen semua stakeholder dalam perwujudan kesetaraan gender. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan dengan indikator kinerja persentase sub kegiatan yang responsif yaitu dengan membandingkan jumlah sub kegiatan yang responsif gender pada tahun n dengan target sub kegiatan yang akan meresponsifkan gender sampai dengan tahun 2026 sebanyak 372 sub kegiatan yaitu 2 sub kegiatan dari tiap OPD setiap tahunnya. Target indikator ini 16,67% realisasi 16.67% sehingga capaiannya 100% yaitu 62 sub kegiatan yang responsif gender. Indikator ini dapat terealisasi karena adanya komitmen OPD

- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase organisasi masyarakat/lembaga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi/advokasi pemberdayaan perempuan adalah indikator kinerja yaitu dengan membandingkan jumlah organisasi masyarakat/lembaga masyarakat yang dilatih dengan jumlah seluruh organisasi masyarakat/lembaga masyarakat.

Target indikator ini 26,67% realisasi 26,67% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai adanya komitmen antar stakeholder sehingga sampai dengan tahun 2024 telah terlatih 8 (delapan) organisasi masyarakat/lembaga masyarakat dari total keseluruhan Organisasi masyarakat/lembaga masyarakat Kota Pekalongan sebanyak 30 (tiga puluh) Lembaga. Ke 8 (delapan) organisasi masyarakat/lembaga masyarakat tersebut adalah Nasyiatul 'Aisyiyah dan Fatayat NU (tahun 2021), Bhayangkari dan Persit (tahun 2022), Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Ikatan Bidan Indonesia (IBI) (tahun 2023), dan tahun 2024 Muslimat NU dan GWKP (Gabungan Wanita Kristen Pekalongan).

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita adalah indikator kinerja yaitu dengan membandingkan jumlah DWP yang melaksanakan kegiatan dengan jumlah seluruh dharma wanita yang ada. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen dari seluruh DWP unit dan pelaksana yang ada di Kota Pekalongan untuk meningkatkan program kerja dalam mewujudkan Indonesia emas 2045

2. Program Perlindungan Perempuan

Program ini diukur dengan indikator rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) adalah indikator yang diukur dengan membandingkan Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan dengan jumlah penduduk perempuan dikalikan seratus ribu. Target indikator ini 15,01 realisasi 18,46 sehingga capaiannya 81,31%. Capaian kinerja ini terkait dengan kasus yang dilaporkan di LP-PAR sehingga tidak dapat di target dan diprediksi. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota adalah indikator kinerja yaitu dengan membandingkan jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya komitmen stakeholder dalam program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output) yaitu dengan membandingkan Jumlah perempuan korban kekerasan yang ditangani dengan jumlah kasus kekerasan pada perempuan yang masuk ke LPPAR. Target indikator ini 100% realisasi 100%

sehingga capaiannya 100%. Indikator kegiatan ini tercapai karena adanya komitmen stakeholder dalam kegiatan pelayanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan.

SASARAN 6 : Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 6 dengan 1 belum dapat diketahui karena data belum dirilis. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Kategori Kota Layak Anak	Madya	kategori	Madya	Nindya	Nindya	Na	Na	3.00

Kategori Kota Layak Anak adalah indikator yang diukur berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PPPA RI tentang Kota Layak Anak. Capaian kinerja Indikator Kategori Kota Layak Anak Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah belum dapat diketahui karena belum dirilis oleh Kementerian PPPA.

Tahun 2023, Kota Pekalongan dalam mewujudkan Kota Layak Anak telah diapresiasi oleh Kementerian PPPA RI berupa penghargaan Kota Layak Anak dengan Kategori Nindya meningkat dari tahun sebelumnya dengan kategori Madya. Peningkatan kategori dari Madya ke Nindya tidak terlepas dari komitmen bersama Walikota Pekalongan dengan OPD terkait dan stakeholder dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai Kota Layak Anak.

Tabel 2. 21 Perbandingan Kategori Kota Layak Anak dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah Tahun 2023

No.	Daerah	Kategori
1.	Kabupaten Brebes	Nindya
2.	Kabupaten Batang	Madya
3.	Kabupaten Pemalang	Nindya
4.	Kabupaten Tegal	Nindya
5.	Kota Tegal	Nindya
6.	Kota Pekalongan	Nindya

Sumber data : Berita Daerah Online, 2024

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Dukungan dari Pemimpin Daerah (Walikota dan Wakil Walikota), DPRD , Ketua TP PKK Kota Pekalongan dalam upaya optimalisasi pengarusutamaan Hak Anak di Kota Pekalongan cukup tinggi;
2. Potensi masyarakat untuk menjadi bagian dalam upaya mewujudkan Kota Pekalongan Menuju Layak Anak cukup besar;
3. Kolaborasi dan sinergi lembaga/instansi terkait dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di klaster KLA cukup baik.

Tantangan dalam pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Indikator-indikator di tiap klaster Kota Layak Anak dengan cakupan yang sangat luas dan harus terstandarisasi;
2. Adanya perubahan sumber daya manusia baik dikarenakan mutasi atau pergantian personil tim Kota Layak Anak;
3. Peran dunia usaha belum optimal.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh upaya/strategi:

1. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi kegiatan antar OPD dan stakeholder terkait pemenuhan hak anak;
2. Mengoptimalkan gugus tugas Kota Layak Anak;
3. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan OPD teknis terkait perencanaan dan penganggaran dana kelurahan agar tepat sasaran dan sesuai dengan maksud dan tujuan program dana kelurahan yaitu memberdayakan masyarakat kelurahan;

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	277.022.000	277.022.000	270.460.900
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.300.000	12.300.000	11.650.000
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.468.000	7.468.000	28.547.000
Program Perlindungan Khusus Anak	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.322.000	8.322.000	8.320.700
	Jumlah	55.112.000	355.112.000	318.978.600

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 89.82 %. Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilihat dikarenakan capaian kinerja belum dirilis oleh Kementerian PPPA.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diukur dengan indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) yaitu dengan membandingkan jumlah akumulasi kelurahan yang mengikuti evaluasi dekela dengan jumlah kelurahan yang ada. Target 2024 40,74% realisasi

40,74% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen stakeholder untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak anak dalam semua aspek kehidupan. Sampai dengan tahun 2024 telah ditetapkan 11 (sebelas) kelurahan layak anak yaitu Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Podosugih, Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Noyontaansari, Kelurahan Kalibaros dan Kelurahan Banyurip (tahun 2020), Kelurahan Jenggot (tahun 2021), Kelurahan Klego (tahun 2022), Kelurahan Tirta (tahun 2023), Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Medono (tahun 2024). Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase forum anak yang aktif yaitu dengan membandingkan Jumlah forum anak yang aktif dengan jumlah forum anak se kota Pekalongan. Target indikator ini 28,13% realisasi 28,13% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena komitmen stakeholder untuk memberikan kesempatan kepada anak berpartisipasi dalam pembangunan. Tahun 2024 terdapat 9 (sembilan) forum anak terdiri dari 1 (satu) forum anak Kota, 4(empat) forum anak kecamatan (Kecamatan Barat, Kecamatan Utara, Kecamatan Selatan dan Kecamatan Timur), 4 (empat) Forum Anak Kelurahan (Podosugih, Panjang Wetan, Kuripan Kertoharjo dan Kandang Panjang) dari 32 (tiga puluh dua) forum anak se Kota Pekalongan.

2. Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diukur dengan indikator persentase pengaduan kasus anak yang terlayani yaitu dengan membandingkan jumlah pengaduan kasus kekerasan anak yang ditangani/jumlah kasus kekerasan anak yang masuk ke LPPAR. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Program ini dapat terealisasi karena komitmen stakeholder untuk memberikan layanan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) anak korban kasus kekerasan terdiri dari 7 (tujuh) anak laki-laki dan 11 (sebelas) anak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dapat terlayani di LP PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja). Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yaitu dengan membandingkan Jumlah kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan target kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena adanya komitmen stakeholder untuk meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak.

- b. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome) yaitu dengan membandingkan jumlah anak (penduduk usia < 18th) korban kekerasan yang ditangani dengan jumlah kasus kekerasan pada anak yang masuk ke LPPAR. Target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena karena adanya komitmen stakeholder untuk memberikan pelayanan maksimal kepada anak yang yang Memerlukan Perlindungan.

Tahun 2024 terdapat 18 (delapan belas) anak korban kekerasan terdiri dari 7 (tujuh) anak laki-laki dan 11 (sebelas) anak perempuan yang mengalami tindak kekerasan dapat terlayani di LP PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja).

- c. Kegiatan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yaitu dengan membandingkan Jumlah kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Target indikator ini 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena komitmen stakeholder meningkatkan Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

SASARAN 7: Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 22 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66,45	persen	70,35	73,95	70.81	76.06	107.41	71,34

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun keatas. TPAK berguna untuk mengetahui seberapa banyak angkatan kerja yang ikut andil dalam perekonomian, karena dengan melihat TPAK dapat diketahui sejauh mana angkatan kerja yang aktif dalam pasar kerja. Dengan menggunakan tiga variabel bebas yaitu upah minimum, penduduk usia prima dan penduduk usia tua.

Pada tahun 2024, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, Dimana pada tahun 2022, TPAK sebesar 70.35 %, tahun 2023 sebesar 73.95 %, dan tahun 2024 sebesar 76.06 %. Perbandingan TPAK Kota Pekalongan dengan Daerah lain, Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 23 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

No.	Daerah	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1.	Nasional	67,80	68,63	69,48	66,52
2.	Jawa Tengah	69,58	70,84	71,72	73,74
3.	Kota Pekalongan	75,77	70,35	73,95	76,06
4.	Kabupaten Batang	71,40	74,90	76,62	77,91

5.	Kabupaten Pekalongan	71,46	70,40	70,46	76,38
6.	Kabupaten Pemalang	65,90	69,91	69,58	72,24

Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah, 2025

Faktor – faktor yang mendukung tercapainya sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD terkait, *stakeholder* dan masyarakat sebagai penerima manfaat;
2. Meningkatnya partisipasi perusahaan dalam mengikuti kegiatan;
3. Adanya Kerjasama yang baik dari Manajemen / HRD Perusahaan;
4. Adanya komunikasi yang dapat dilakukan dengan mudah;
5. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Kerjasama dan koordinasi antar bidang dalam ketepatan waktu pelaksanaan;
7. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang/UPTD BLK / LPKS/ Instansi/ Lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
8. Kerjasama yang baik antar tim dan staf terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
9. Adanya koordinasi yang baik dari beberapa pihak baik internal maupun eksternal;
10. Adanya penghematan anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

1. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih luas antar sektor maupun stakeholder baik dalam hal pelatihan kerja maupun penempatan alumni siswa pelatihan;
2. Perlunya teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/ kegiatan;
3. Adanya upaya Sarana dan prasarana komunikasi harus memadai;
4. Mengusahakan adanya bantuan alat dan modal bagi peserta pelatihan kerja;
5. Mengusahakan bantuan modal bagi masyarakat yang akan berwirausaha pasca pelatihan;
6. Pelaksanaan kegiatan lebih dicermati dan tepat waktu agar pencapaian target lebih maksimal;
7. Melakukan sinkronisasi program agar relevan dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai;
8. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan capai;
9. Penetapan Indikator Kinerja Individu yang mengacu pada Indikator kinerja organisasi.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	3.315.449.000	3.551.399.000	3.263.885.728
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	67.214.000	67.214.000	61.865.000

	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	79.126.000	79.126.000	77.412.704
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.301.000	26.831.000	25.472.500
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.	425.947.000	364.033.000	277.190.900
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.	265.740.000	238.020.000	219.555.363
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota.	104.110.000	57.240.000	48.062.800
Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	328.864.000	414.057.000	399.854.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.	121.505.000	117.145.000	116.721.500
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	359.669.000	338.389.000	325.174.514
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.221.000	10.221.000	10,221,000
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	94.380.000	94.380.000	78.998.000
Jumlah		5.217.526.000	5.358.055.000	4.904.414.009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 91,53%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 107.41 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,35% pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 6 program sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Target untuk indikator ini adalah 1,10% dan realisasi 1,41% sehingga capaiannya 128,42%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan dengan target 100% dengan realisasi 101,18% sehingga capaiannya 101,18%.
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan target 80% dengan realisasi 90,91% sehingga capaiannya 113,64%.
 - c. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan dengan target 6 tenant dengan realisasi 6 tenant sehingga capaiannya 100%.
 - d. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 40% dengan realisasi 56,82% sehingga capaiannya 142,05%.
2. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota, adapun target untuk indikator ini adalah 25,93% dan realisasi 33,81% sehingga capaiannya 130,39%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini diukur dengan indikator persentase kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan target 11,86% dengan realisasi 68,09% sehingga capaian nya 574,08%.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun dengan target 12 buku dengan realisasi 12 buku sehingga capaiannya 100%.
 - c. Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini diukur dengan indikator persentase CPMI yang terlayani secara legal dengan target 44% dengan realisasi 59,21% sehingga capaiannya 134,57%.
3. Program Hubungan Industrial, dengan indikator Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), adapun target untuk indikator ini adalah 50% dan realisasi 50,93% sehingga capaiannya 101,86%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

- untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 40,17% dengan realisasi 64,52% sehingga capaian nya 160,63%.
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 72,45% dengan realisasi 100,71% sehingga capaiannya 139%.
4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dengan indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP, adapun target untuk indikator ini adalah 75,34% dan realisasi 82,71% sehingga capaiannya 109,78%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 3,50% dengan realisasi 44,44% sehingga capaiannya 1.269,84%.
5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait, adapun target untuk indikator ini adalah 25% dan realisasi 19,65% sehingga capaiannya 78,60%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) Kegiatan, yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota dengan target 28% dengan realisasi 73,33% sehingga capaiannya 261,90%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh beberapa Sub Kegiatan yaitu ada 1 (satu) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini, adapun target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 95% sehingga capaiannya 95%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 30% dengan realisasi 63,78% sehingga capaiannya 212,60%.

SASARAN 8 : Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 8 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 2. 24 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	89,26	Persen	86.84	95.09	96.24	94.12	97.80	100,00

Indikator Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh dapat dikatakan sebagai pengejawantahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di pemukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di kawasan perkotaan. Sedangkan kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh merupakan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Luasan kawasan Kota Pekalongan adalah sebesar 1.628,91 hektar dan luas kawasan kumuh tahun 2024 sebesar 126,31773 hektar. Jumlah kawasan kumuh yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena sarpras permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob.

Tantangan dalam mencapai sasaran kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kota Pekalongan;
2. Belum Optimalnya pengembangan perumahan dan ketersediaan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jalan lingkungan permukiman dan penanganan kawasan permukiman kumuh.

Oleh Karena itu kedepan dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi:

1. Penyusunan rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berkualitas;
2. Penetapan legalisasi rencana penanganan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	12,539,368,000	12.119.368.000	11,922,031,435

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98,37 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 97.80 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Target untuk indikator ini adalah 1,973.41 Ha dan realisasi 2,021.56 Ha sehingga capaiannya 102,44%. Indikator program ini dapat terealisasi karena
 - a. Melakukan perencanaan dan advokasi penganggaran yang matang dan akurat;
 - b. Kualitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan, penerapan dan pencapaian penganggaran serta kinerja yang baik;
 - c. Pemenuhan sarana Prasarana untuk menunjang kegiatan.

Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada daerah Kab/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh dengan target 0,78 realisasi 0,89 % sehingga capaiannya 113,65%. Indikator ini tercapai karena adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan seluruh *stakeholder* yang ada.

SASARAN 9 : Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 9 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 25 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 9

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Luas Genangan Banjir dan Rob	1.730	hektar	980.14	880.83	909	379.02	239.83	565

Indikator Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Secara topografi, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (DPL) pada wilayah bagian Utara dan

6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata – rata antara 0 – 5%. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan Saluran Drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat sehingga perlu adanya perhatian dari Pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.

- Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 hektar.
- Kondisi awal luas genangan rob 1.920 hektar.
- Pada tahun 2024 luas genangan yang tersisa adalah 379.02 Hektar

Apabila dilihat dari target yang ditentukan pada tahun 2024 yaitu sebesar 909 hektar, sedangkan realisasi capaian kinerja adalah 379.02 hektar, maka dapat dikatakan mencapai target. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung capaian kinerja sebagai berikut :

1. Pengadaan pompa skala wilayah (rumah pompa) dan lingkungan;
2. Pengurusan saluran drainase yang menyebabkan terjadinya penyumbatan aliran air;
3. Normalisasi sungai;
4. Peninggian jalan;
5. Pembangunan Tanggul sungai.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi yaitu dengan menyelesaikan pekerjaan pembangunan 5 stasiun pompa, pemeliharaan dan operasional 34 stasiun pompa, 10 pekerjaan rehab dan normalisasi saluran drainase, 11 pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan tanggul/talud, 9 pekerjaan normalisasi dan pemeliharaan saluran irigasi, dan 7 pekerjaan rehabilitasi stasiun pompa banjir. Sejumlah pekerjaan tersebut dapat mengurangi jumlah luasan genangan banjir dan rob yang ada di wilayah Kota Pekalongan, sehingga akan meningkatkan persentase wilayah kota yang bebas dari genangan banjir/rob dan mencapai pada target sasaran. Selain itu juga, perlu meningkatkan koordinasi dengan provinsi dalam hal ini Dinas Pusdataru Provinsi Jateng serta pusat (BBWS Pemali Juwana & Kementrian Pekerjaan Umum) untuk merealisasikan rencana pembangunan bangunan pengendali banjir di hilir sungai Bremsi & Meduri.

Untuk mewujudkan pencapaian kinerja sasaran ini didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	14.573.100.000	15.117.100.000	14.335.909.132
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.832.320.000	1.714.911.000	1.614.320.521
Program Pengelolaan Dan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	4.270.800.000	4.542.015.000	4.346.580.637

Pengembangan Sistem Drainase	Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
Jumlah		20.676.220.000	21.374.026.000	20.296.810.290

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94.96 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 239.83 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini. Hal ini dikarenakan:

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 program sebagai berikut:

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan indikator Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Jumlah sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebanyak 34 unit dibagi jumlah Sarpras pengendali banjir dan rob keseluruhan sebanyak 34 unit. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut :
 - Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik dengan target 27 unit realisasi 34 unit sehingga capaian nya 125.39 %. Indikator ini tercapai karena adanya penambahan beberapa jumlah stasiun pompa pengendali banjir dan rob.
 - Kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota ini diukur dengan indikator Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output) dengan target 83.39 % dengan realisasi 83.39 % sehingga capaiannya 100 %. indikator ini tercapai karena adanya penambahan antara lain:
 - ✓ Normalisasi dan pengerukan sungai asem binatur RW 1, 2, 3, dan 7 pada Kelurahan Podosugih
 - ✓ Normalisasi saluran ASB bendung kesetu ke hilir
 - ✓ Normalisasi saluran irigasi BPT 7 ke hilir
 - ✓ Normalisasi saluran irigasi larangan 4 ke hilir
 - ✓ Pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi 5 sistem (Podo Timur, Grabyak, Asem Binatur, Larangan, dan Baros)
- Program Pengelolaan dan pengembangan sistem Drainase dengan indikator Persentase drainase dalam kondisi baik Target untuk indikator ini adalah 69.48% dan realisasi 69.48 % sehingga capaian nya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena Total Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik 180.841 meter dibagi Total Panjang Drainase Keseluruhan 260.277 meter. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik Panjang Saluran Drainase dalam Kondisi Baik pada

Tahun N dengan target 172,142.18 m2 dengan realisasi 180,841,14 m2 sehingga capaian nya adalah 105.05 % indikator ini tercapai karena adanya penambahan jumlah saluran sistem drainase dalam kondisi baik.

SASARAN 10 : Menurunnya tingkat pencemaran air

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 10 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 26 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 10

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Indeks Kualitas Air	5.33	indeks	45.33	48.86	35.37	50.56	142.95	5.39

Kualitas air sungai merupakan salah satu parameter dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks Kualitas Air dihitung dari hasil konversi Pollution Index (PI). Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Indeks Kualitas Air atau IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Air Kota Pekalongan sebesar 50,56, lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMD dan capaian tahun sebelumnya. Pemantauan kualitas air sungai di Kota Pekalongan dilakukan terhadap 3 sungai yaitu Sungai Pekalongan, Sungai Meduri dan Sungai Banger pada masing-masing bagian hulu, tengah dan hilir sungai. Pemantauan kualitas air dilakukan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun dengan ketentuan mewakili musim kemarau (asumsi debit air sungai rendah) dan mewakili musim hujan (asumsi debit air sungai tinggi).

Tabel 2. 27 Perbandingan Indeks Kualitas Air dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Air
1.	Provinsi Jawa Tengah	52,01
2.	Kabupaten Batang	58,68
3.	Kabupaten Pekalongan	46,36
4.	Kabupaten Pemalang	48,33
5.	Kabupaten Tegal	49,41
6.	Kota Pekalongan	50,56
7.	Kota Tegal	50,00

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2025

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja:

1. Sosialisasi pengelolaan limbah terhadap usaha dan kegiatan di Kota Pekalongan;
2. Kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan kegiatan di kota Pekalongan yang menghasilkan limbah;

- 3. Pengawasan hasil uji laboratorium untuk hasil olahan Ipal usaha/ kegiatan dan rekomendasi untuk ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup;
- 4. Pembangunan IPAL batik secara komunal di 4 lokasi, yaitu Kelurahan Kauman, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Pringrejo;
- 5. Adanya layanan sedot limbah industri bagi usaha dan kegiatan yang belum memiliki IPAL.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi antara lain:

- 1. Menyusun DE Pembangunan IPAL Jenggot II;
- 2. Memberikan layanan sedot limbah industri bagi usaha dan kegiatan yang belum memiliki IPAL.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	883.342.000	906.527.000	890.975.090
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	833.539.000	456.539.000	448.856.404
Jumlah		1.716.881.000	1.363.066.000	1.339.831.494

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98.30 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 142.95 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 45.42 % pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yaitu program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Target untuk indikator ini adalah 45.02 % dan realisasi 108.23 % sehingga capaian nya 240.40 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena jumlah limbah yang dapat diolah masih tetap sesuai dengan kemampuan IPAL eksisting.

SASARAN 11 : Optimalnya Kualitas Lahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 11 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 28 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 11

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Indeks Kualitas Lahan	3,60	indeks	3,77	24.39	23.60	26.14	110.76	23,61

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat IKTL adalah nilai yang

menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan seperti semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, Ruang Terbuka Hijau dan area rehabilitasi hutan dan lahan. Indeks kualitas tutupan lahan sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau.

Pada tahun 2024, indeks kualitas lahan sebesar 26.14, melebihi target RPJMD yang telah ditentukan dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan Indeks Kualitas Lahan Kota Pekalongan dengan daerah sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 29 Perbandingan Indeks Kualitas Lahan dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Daerah	Nilai Indeks Kualitas Lahan
1.	Provinsi Jawa Tengah	49,26
2.	Kabupaten Batang	44,58
3.	Kabupaten Pekalongan	60,47
4.	Kabupaten Pemalang	50,39
5.	Kabupaten Tegal	40,42
6.	Kota Pekalongan	26,14
7.	Kota Tegal	23,84

Sumber data : Ekspose IKLH Provinsi Jawa Tengah, 2025

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja:

1. Penambahan luasan ruang terbuka hijau dengan pembangunan taman, rehabilitasi taman dan penanaman pohon di Kota Pekalongan;
2. Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan kebersihan dan persampahan.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi antara lain:

1. Melakukan penanaman pohon di area-area kosong sempadan jalan dan tanah bengkok yang sudah tidak produktif dengan menggunakan bibit hasil kompensasi penebangan pohon;
2. Memberikan kontribusi bibit kepada pihak-pihak peduli lingkungan;
3. Melakukan upaya mangrovisasi baik secara mandiri maupun kolaborasi dengan komunitas, akademisi, dan NGO.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	4.680.999.000	4.248.163.000	4.199.432.276
JUMLAH		4.680.999.000	4.248.163.000	4.199.432.276

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah

sebesar 98.85 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 110.76 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12.05 % pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Target indikator ini 2.93 %, realisasi 2.94 % sehingga capaiannya 100.42 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya penambahan RTH Publik baru seluas 0,12 Ha dari pengalihan lahan eks bengkok di Kelurahan Klego (Seruni Grand Park).

SASARAN 12 : Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 12 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 25 % dengan kategori Sangat Tidak Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 30 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 12

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	4,00	Regulasi	1,00	2,00	7,00	4,00	42,86	7,00

Indikator Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Pekalongan, menyebabkan kebutuhan akan ruang semakin meningkat. Sementara ketersediaan ruang terbatas dan tidak bertambah, serta terdapatnya kawasan-kawasan yang tidak bisa dibangun dikarenakan adanya banjir rob. Untuk itu setiap elemen di dalam ruang harus saling bersinergi dan harus ada pengaturan, tanpa adanya pengaturan akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Bertambahnya penduduk juga akan meningkatkan kebutuhan akan ruang, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan ruang. Pemanfaatan ruang dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut disebabkan oleh banyak faktor sehingga untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang tertib ruang diperlukan tindakan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan tata ruang dapat berjalan sesuai dengan rencana tata ruang.

Dengan ditetapkannya Peraturan terkait dengan Perencanaan Tata Ruang dan pemanfaatan Ruang diharapkan pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga dapat meminimalisir /mengurangi dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Dari 7 (tujuh) regulasi yang ditargetkan sampai dengan akhir RPJMD 2026, sampai dengan tahun 2024, terdapat 4 (empat) regulasi yang telah ditetapkan yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Garis Sempadan;
2. Peraturan Wali Kota Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pokok dan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
3. Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Pekalongan Tahun 2024-2044;

4. Peraturan Wali Kota tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Terdapat 3 (tiga) regulasi yang masih dalam proses dan belum ditetapkan antara lain

1. Raperda Bangunan Gedung
 - Penyusunan materi teknis baru selesai pada Triwulan III 2024.
 - Target penetapan bergeser ke Triwulan I tahun 2025.
2. Perwal Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik, penyusunan perwal telah selesai saat ini masih dalam tahap pembahasan di bagian hukum sebelum ditetapkan.
3. Perwal Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, merupakan penjabaran dari Perda Bangunan Gedung. Pelaksanaan akan dilakukan setelah Perda Bangunan Gedung ditetapkan.

Kendala dalam pencapaian target ini disebabkan oleh tahapan penyusunan materi teknis dan ketergantungan antara regulasi satu dengan yang lain, terutama dalam hal penjabaran dari Peraturan Daerah ke Peraturan Wali Kota. Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi yaitu penyusunan Raperda Bangunan Gedung Tahun 2025 dan akan ditindaklanjuti dengan Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	160.210.000	183.862.000	181.811.900
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	364.860.00	323.710.000	315.217.367
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	38.760.000	38.760.000	38.700.000
Jumlah		197.970.000	546.332.000	535.729.267

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98.05 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 42,86 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yaitu program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 14.29%. Indikator program ini dapat terealisasi karena baru terdapat 4 regulasi yang telah ditetapkan. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata

- Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan RTRW/RRTR dengan target 100% realisasi 112.50% sehingga capaian nya 112.50%. Indikator ini tercapai karena adanya kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang;
2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan dengan target 12 kali realisasi 12 kali sehingga capaiannya 100% indikator ini tercapai karena terdapat beberapa koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang, koordinasi Penyiapan data spasial 2024, dan koordinasi penyampaian laporan forum penataan ruang.
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota diukur dengan indikator Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan dengan target 12 kali realisasi 12 kali sehingga capaiannya 100% indikator ini tercapai karena tersusunnya Dokumen koordinasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang.

SASARAN 13 : Optimalnya layanan air minum

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 13 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 31 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 13

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100	persen	100	100	100	100	100	100

Indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, guna mencapai salah satu visi yaitu mewujudkan kemajuan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan sinergitas dalam pengelolaan kawasan, tata ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Peningkatan peran pelayanan dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana perkotaan. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan adalah penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Hingga saat ini peningkatan infrastruktur masih terus dilakukan tanpa mengenyampingkan kualitasnya.

Pada tahun 2024, persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum di Kota Pekalongan telah mencapai 100%. Artinya, seluruh penduduk di Kota Pekalongan telah mendapatkan akses terhadap air minum yang memadai. Kebutuhan air bersih Penduduk Kota Pekalongan dipenuhi dari sumber PAMSIMAS dan PDAM yang berasal dari sumber Air Bawah tanah (ABT) dan air permukaan (bekerjasama dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang melalui SPAM Petanglong).

Faktor pendukung tercapainya persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum di Kota Pekalongan antara lain :

1. Dukungan infrastruktur dari pemerintah kota, provinsi maupun pusat;
2. Optimalnya penyediaan sarana dan prasarana air bersih;
3. Adanya pembangunan perluasan perpipaan di Perkotaan sepanjang 10.245 meter;
4. Penambahan jaringan Sambungan Rumah (SR) 741.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi koordinasi dengan Bappeda dan Perumda Tirtayasa untuk merumuskan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan air minum di Kota Pekalongan;
2. Inventarisasi permasalahan terkait sumber air minum beserta jaringannya;
3. Mengajukan pengusulan pendanaan melalui APBD dan sumber pendanaan lainnya untuk infrastruktur pemenuhan kebutuhan air minum di Kota Pekalongan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	1.662.400.000	1.545.081.000	1.469.355.614

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95.10 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5.15 % pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah. Target untuk indikator ini adalah 89.66 % dan realisasi 53.15% sehingga capaiannya 59.28%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Jumlah rumah yang terlayani JP (PDAM + Pamsimas) 41.025 dibagi jumlah rumah 77.189 dikali 100% Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kab/kota dilaksanakan dengan target 100% realisasi 102 % sehingga capaiannya 102 %. Indikator ini tercapai karena Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dibangunnya sebanyak 222 SR.

SASARAN 14 : Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 14 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 32 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 14

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Persentase pelayanan sampah	7.12	Persen	2.36	71.45	71.12	71.85	101.03	73.12

Indikator Persentase tingkat pelayanan sampah merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Persentase tingkat pelayanan sampah merupakan cakupan dari rumah tangga yang terlayani pengelolaan sampah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pekalongan. Pada tahun 2024, jumlah seluruh rumah tangga di Kota Pekalongan sebanyak 80.269 rumah tangga, sedangkan jumlah rumah tangga yang terlayani sampahnya sebanyak 57.675 rumah tangga.

Sehingga persentase pelayanan sampah dapat dihitung sebagai berikut =

(57.675 / 80.269) = 71,85 % rumah tangga yang terlayani.

Capaian diatas melebihi capaian tahun-tahun sebelumnya. Dimana tahun 2020 sebesar 68.12 % rumah tangga yang terlayani sampah, tahun 2021 sebesar 68.12 % rumah tangga yang terlayani sampah, tahun 2022 sebesar 72.36 % rumah tangga yang terlayani sampah, dan tahun 2023 sebesar 71.45 %. Hal ini didukung oleh faktor-faktor berikut :

- 1. Revitalisasi TPS 3R di Kota Pekalongan;
- 2. Penambahan sarpras pengelolaan kebersihan dan persampahan.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi antara lain:

- 1. Mengoptimalkan TPS3R dan TPST untuk melakukan pilah dan olah sampah.
- 2. Menambah sarana dan prasarana di TPS3R dan TPST agar dapat mengolah sampah.
- 3. Mengedukasi masyarakat agar memilah sampah dari sumbernya.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	10.673.668.000	10.908.768.000	10.437.338.489

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 95,68%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 101,03 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 5,6% pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui Program Pengelolaan Persampahan Target untuk indikator ini adalah 0.29% dan realisasi 0,30% sehingga capaiannya 105,01%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Jumlah sampah terkelola Th 2024 : 56.644 ton. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1(satu) kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Sampah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pengurangan sampah dengan target 17.69% realisasi 18.34% sehingga capaiannya 103.67%. Indikator ini tercapai karena Pengelolaan sampah yang terolah.

SASARAN 15 : Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 15 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 33 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 15

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	B	kategori	B	B	B	B	100	B
2	Persentase keterhubungan jalan	97,20	persen	100	100	100	100	100	100

1. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)

Tingkat pelayanan jalan adalah suatu ukuran kualitatif yang menjelaskan kondisi-kondisi operasional didalam suatu aliran lalu lintas dan persepsi dari pengemudi dan penumpang terhadap kondisi-kondisi tersebut. Faktor- faktor seperti kecepatan dan waktu tempuh, kebebasan bermanuver, perhentian lalu lintas, dan kemudahan serta kenyamanan adalah kondisi-kondisi yang mempengaruhi LoS. Setiap fasilitas dapat dievaluasi berdasarkan enam tingkat pelayanan, A sampai F, dimana A mempresentasikan kondisi operasional terbaik dan F untuk kondisi terburuk.

Tingkat pelayanan jalan Kota Pekalongan tahun 2024 telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Dimana berdasarkan hasil survei lalu lintas Kota Pekalongan tahun 2024 didapatkan hasil rata-rata Tingkat Pelayanan Jalan **B** yaitu dengan kriteria arus lalu lintas stabil dengan volume lalu lintas sedang dan kecepatan mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, kepadatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan dan pengemudi masih punya kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. Dari hasil diatas maka arus lalu lintas di dalam kota di Kota Pekalongan masih dalam kondisi yang baik.

Faktor – faktor yang mendukung tercapainya target kinerja :

- a. Melaksanakan Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di beberapa Ruas Jalan di Kota Pekalongan sebagai upaya pengurangan kepadatan arus lalu lintas di Kota Pekalongan;
- b. Melakukan Rekayasa Lalu Lintas pada kawasan yang memiliki kepadatan arus lalu lintas;
- c. Adanya patroli rutin di kawasan parkir yang tidak sesuai tempatnya dan pelanggaran pengguna jalan guna mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas;
- d. Melakukan sosialisasi ketertiban lalu lintas pada anak sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman tentang tata tertib lalu lintas dalam berkendara di jalan raya agar menjaga keselamatan berkendara di jalan.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

- a. Meningkatkan giat patroli lalu lintas di beberapa lokasi yang arus lalu lintasnya padat;
- b. Menambah jumlah Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Kota Pekalongan;

- c. Bekerjasama dengan stakeholder terkait sebagai upaya meningkatkan pemahaman tentang Tata Tertib Lalu Lintas dalam berkendara di jalan raya sejak dini agar mengurangi tingkat kecelakaan pada anak sekolah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.257.000	16.257.000	15.231.800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.631.280.000	4.446.325.000	4.092.792.775
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	32.000.000	32.000.000	29.121.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	145.500.000	145.500.000	143.170.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	652.581.000	754.877.000	746.614.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.352.028.000	15.713.598.000	15.512.362.535
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	492.991.000	569.143.000	538.775.645
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3.005.080.000	3.005.080.000	2.978.749.582
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.784.587.000	5.071.512.000	4.823.608.978
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	45.000.000	45.000.000	43.700.714
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	325.850.000	325.850.000	323.185.400
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	246.764.000	210.048.000	207.150.184
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	616.812.000	616.812.000	598.323.139
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	15.750.000	15.750.000	15.589.000
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	27.900.000	27.900.000	25.338.450
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	25.000.000	22.889.800

Jumlah	27.415.380.000	31.020.652.000	30.116.603.002

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 97.09%, Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100%. maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,99% pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 7 kegiatan sebagai berikut :
 - ✓ Kegiatan Perencanaan. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan survei pendataan aset Dinas Perhubungan yang berada diluar kantor sesuai yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah pada perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan pakaian dinas harian kantor yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah pada perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor sesuai yang ditetapkan.

- ✓ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan penyediaan kegiatan penunjang urusan kantor sesuai yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kendaraan dan urusan kantor telah sesuai yang ditetapkan.
- b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Target untuk indikator ini adalah 95% dan realisasi 103,28% sehingga capaiannya 108,71%, indikator Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome) target 0,44 rasio dan realisasi 0,44 sehingga capaiannya 100%, dan indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala target 0,75 persen dan realisasinya -8,33 persen sehingga capaiannya 1,11 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 9 kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota ini diukur dengan indikator persentase pelaksanaan kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan survei lalu lintas dan pelaksanaan kegiatan pengamanan kegiatan sesuai yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah penyediaan perlengkapan jalan dengan target 4 jenis dan realisasi 4 jenis sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target penyediaan PJU, marka, taman lalu lintas dan cermin tikung sesuai yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C. Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah penyediaan perlengkapan jalan dengan target 4 jenis dan realisasi 4 jenis sehingga capaiannya 100 %. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target penyediaan PJU, marka, taman lalu lintas dan cermin tikung sesuai yang ditetapkan.
 - ✓ Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.

Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah titik parkir baru yang diterbitkan izinnya dengan target 2 titik dan realisasi 2 titik sehingga capaiannya 100 %. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan sesuai dengan target (depan Pande Rasa dan depan Indomaret Gamer) sesuai yang ditetapkan.

- ✓ Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output) yang diterbitkan izinnya dengan target 65,19 % dan realisasi 39,88% sehingga capaiannya 61,1 %. Indikator ini belum tercapai karena karena belum sadarnya masyarakat untuk melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor, sehingga jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala menurun.
- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan dengan target 92% dan realisasi 92,39% sehingga capaiannya 100,43%. Indikator ini tercapai yaitu jumlah kegiatan penataan manajemen rekayasa lalu lintas tercapai sesuai target.
- ✓ Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) dengan target 83% dan realisasi 83,33% sehingga capaiannya 100,40%. Indikator ini tercapai yaitu pelaksanaan kegiatan tinjauan andalalin Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) tercapai sesuai target.
- ✓ Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan untuk Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan dengan target 2 kegiatan dan realisasi 2 kegiatan sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai dua kegiatan yaitu pembinaan pengemudi, kegiatan pembinaan dan monitoring perusahaan angkutan umum tercapai sesuai target.
- ✓ Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota untuk Jalan Kabupaten. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pembinaan awak angkutan umum yang dilaksanakan dengan target 30,73% dan realisasi 8,12% sehingga capaiannya 26,43%. Indikator ini tidak tercapai karena hanya terdapat penyediaan kegiatan fasilitasi bus sekolah sehingga tidak tercapai sesuai target.

2. Persentase keterhubungan jalan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa Sistem Jaringan Jalan merupakan Satu kesatuan jaringan jalan yang

terdiri dari Sistem Jaringan Jalan Primer dan Sistem Jaringan Jalan Sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Sistem Jaringan Jalan disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam Kawasan perkotaan, dan Kawasan perdesaan.

Persentase keterhubungan jalan Kota Pekalongan tahun 2024 sebesar 100% artinya seluruh jalan yang terbangun telah terhubung. Total panjang jalan di Kota Pekalongan sepanjang 153,607 dengan rincian kondisi sebagai berikut :

Tabel 2. 34 Rekapitulasi Persentase Kondisi Jalan Tahun 2024

KONDISI	% PANJANG	% PANJANG	KM PANJANG	KEMANTAPAN
BAIK	61.56	84.50	92.513	84.50
SEDANG	22.94		34.47	
RUSAK RINGAN	8.35	15.50	12.55	15.50
RUSAK BERAT	7.15		10.741	

Sumber data : DPUPR Kota Pekalongan, 2025

Dari tabel diatas, jalan Kota Pekalongan tahun 2024 dengan kondisi BAIK sebesar 61.56 %, SEDANG sebesar 22.94 %, RUSAK RINGAN sebesar 8.35 % dan RUSAK BERAT sebesar 7.15 %.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi yaitu dengan menyelesaikan 13 pekerjaan peningkatan jalan dan 6 pekerjaan rehabilitasi jalan sesuai dengan target panjang pekerjaan. Sejumlah pekerjaan ini akan menaikkan kondisi jalan dari kondisi rusak menjadi baik, sehingga hal ini dapat meningkatkan kemantapan jalan dan mencapai pada sasaran. Selain itu, pemeliharaan rutin jalan juga dilakukan sepanjang tahun dan dapat membantu meningkatkan kondisi jalan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	18.077.303.000	27.850.932.000	25.919.421.284

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 93.06 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,45 % pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yaitu Program penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) Target untuk indikator ini adalah 84.39 % dan realisasi 84.50 % sehingga capaiannya 100.13 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) 126.982 km/ Panjang Jalan Kota 150,274 km di kali 100% Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang dengan target 129.47 km realisasi 126.98 km sehingga capaian nya 98.08 %. Indikator ini tercapai karena ada beberapa peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan yang dikerjakan.

SASARAN 16 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 16 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 35 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 16

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Pertumbuhan ekonomi	1,87	Persen	5.76	5.44	3.32	5.87	176.81	4.55

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai dan jumlah produksi barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), modal, sosial budaya dan perkembangan teknologi. Sedangkan beberapa indikator dari adanya pertumbuhan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan.

Angka pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2024 tumbuh di angka 5.87 %, meningkat dari sebesar 5.76 % pada tahun 2022 dan 5.44 % pada tahun 2023. Salah satu faktor pendukung tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2024 adalah adanya tren penurunan tingkat pengangguran terbuka dari 5.02 % di tahun 2023, menjadi 4.91 % di tahun 2024.

Tabel 2. 36 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No.	Wilayah	Angka Pertumbuhan Ekonomi (%)
1.	Nasional	5.03
2.	Provinsi Jawa Tengah	4.97
3.	Kota Pekalongan	5.83

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2025

Dari tabel diatas, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 Kota Pekalongan lebih besar dari Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Sektor perdagangan dan industri menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi tersebut. Selain itu, peningkatan investasi, terutama melalui pembangunan infrastruktur di Kota Pekalongan, memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian daerah.

Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan sektor industri kreatif dan batik dengan meluncurkan program-program pengembangan batik yang melibatkan pelatihan kepada masyarakat dan pengusaha batik lokal, serta mendukung pemasaran produk melalui platform digital dan internasional. Selain itu juga menyelenggarakan event seperti Pekalongan Batik Festival yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional, serta menjadi sarana untuk mempromosikan produk batik Pekalongan ke pasar global;
2. Pendampingan dan Penguatan UMKM;
3. Promosi lebih intensif melalui platform digital dan menggandeng agen perjalanan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Pekalongan;

- 4. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal, terutama di bidang teknologi informasi, batik, pariwisata, dan industri kreatif lainnya;
- 5. Pengembangan program kewirausahaan di kalangan pemuda untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja baru.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini:

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	326.000.000	326.000.000	321.259.400
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.556.476.000	3.599.956.000	3.414.420.328
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	9.990.000
Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	682.020.000	682.020.000	673.124.781
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	428.262.000	428.262.000	422.818.250
	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	25.000.000	25.000.000	24.020.000
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	792.000.000	792.000.000	776.934.700
	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	30.000.000	30.000.000	26.679.500
Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	136.241.000	114.131.000	112.193.852
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.012.233.000	1.012.673.000	986.171.308

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	9.702.231.000	6.884.980.000	6.626.949.138
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	67.600.000	222.750.000	198.229.000
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	113.338.000	130.148.000	129.608.704
	Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kab/ Kota	8.515.000	8.515.000	6.988.900
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang	315.984.000	315.984.000	308.385.385
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	8.400.000	6.200.000	5.867.500
	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	8.400.000	2.460.000	2.460.000
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	110.667.000	110.667.000	109.688.404
Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	606.707.000	606.707.000	557.821.299
Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	952.998.000	952.998.000	925.898.400
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	392.263.000	215.163.000	211.282.653
	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	59.576.000	56.358.000	55.244.964
	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	2.463.694.000	2.005.694.000	1.971.591.807

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	246.498.000	257.536.000	254.343.542
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	68.939.000	54.935.000	54.297.000
	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	434.343.000	434.343.000	431.527.412
Jumlah		21.356.766.000	18.267.145.000	17.611.100.656

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96.40 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 176.81 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 83.39 % pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Target untuk indikator ini adalah 11,50 dan realisasi 12.24 sehingga capaiannya 106.41%. Indikator program ini dapat terealisasi karena branding daerah sebagai destinasi wisata unggulan serta pemanfaatan media sosial, website, dan platform digital untuk promosi. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase usaha pariwisata yang difasilitasi dengan target 100 realisasi 100 % sehingga capaiannya 100 %. Indikator ini tercapai karena sinergi yang baik antara dinas dan stakeholder kepariwisataan
 - b. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase destinasi wisata yang berkembang dengan target 100 realisasi 100 % sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena Pengalokasian anggaran yang tepat sesuai dengan prioritas kegiatan
 - c. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi dengan target 100 realisasi 300 % sehingga capaiannya 300 %. Indikator ini tercapai karena sinergi yang baik antara dinas dan stakeholder terkait.
2. Program Pemasaran Pariwisata Target untuk indikator ini adalah 36.98 dan realisasi 70.89 sehingga capaiannya 191.70%. Indikator program ini dapat terealisasi karena Branding daerah sebagai destinasi wisata unggulan dan pemanfaatan media sosial, website, dan platform digital untuk promosi Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) Kegiatan yaitu Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota dengan target 25% realisasi 120.93% sehingga capaiannya 483.71 %. Indikator ini tercapai karena Strategi pemasaran dan promosi yang efektif, terutama

dalam sektor pariwisata dan kebudayaan

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Target untuk indikator ini adalah 41.67 dan realisasi 73.83 % sehingga capaiannya 177.19%. Indikator program ini dapat terealisasi karena kerja sama yang baik antara dinas dengan *stakeholder* terkait. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Penyediaan Prasarana ruang kreatif dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100 %. Indikator ini tercapai karena Pengalokasian anggaran yang tepat sesuai dengan prioritas kegiatan.
 - b. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dengan target 100% realisasi 100 % sehingga capaiannya 100 %. Indikator ini tercapai karena sinergi yang baik antara dinas dan stakeholder terkait.
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Target untuk indikator ini adalah 60.00 dan realisasi 306.73 sehingga capaiannya 511.22%. Indikator program ini dapat terealisasi karena sinergi yang baik antara dinas, swasta, komunitas, dan masyarakat. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Kegiatan ini diukur dengan indikator Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar dengan target 16.67% realisasi 35 % sehingga capaiannya 209.96 %. Indikator ini tercapai karena sinergi yang baik antara dinas dan stakeholder terkait
 - b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena strategi pemasaran dan promosi yang efektif.
5. Program Pengembangan Ekspor. Target untuk indikator ini adalah 7,79 persen dan realisasi 7,50 persen sehingga capaiannya 96,25 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam meningkatkan skala usahanya yang berorientasi kepada pasar ekspor. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi eksportir dengan target 25 pelaku usaha. realisasi 41 pelaku usaha sehingga capaiannya 164 persen. Indikator ini tercapai karena adanya dukungan dari segenap stakeholder dalam rangka pendampingan kepada

para pelaku usaha untuk terus meningkatkan skala usaha dengan berorientasi pada ekspor. Dan juga adanya dukungan kepada para pelaku usaha berupa pemberian fasilitas pelatihan ekspor serta dukungan dalam peningkatan kompetensi termasuk fasilitasi dalam pengurusan dan pendampingan dalam perizinan berusaha.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri. Target untuk indikator ini adalah 5,34 persen dan realisasi 2,05 persen sehingga capaiannya 38,38 persen. Indikator program ini belum dapat terealisasi karena kurangnya sarana dan dukungan dalam memberikan fasilitasi pemasaran bagi pelaku usaha UMKM. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kegiatan ini diukur dengan indikator peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya dengan target 100 persen, realisasi 146,23 persen sehingga capaiannya 146,23 persen. Indikator ini tercapai karena adanya dukungan dari segenap stakeholder dalam rangka pendampingan kepada para pelaku usaha khususnya UMKM untuk terus meningkatkan skala usaha dengan aktif dalam mengikuti beberapa pameran. Dan juga adanya dukungan kemajuan teknologi yang saat ini dirasa semakin pesat, maka dukungan fasilitasi pemasaran produk UMKM dapat dilakukan melalui media online berupa pemasaran melalui *marketplace* yang dimiliki oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan berupa brayan market.
7. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi. Target untuk indikator ini adalah 31,49 persen dan realisasi 30,77 persen sehingga capaiannya 97,72 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan kepada koperasi yang berada di Wilayah Kota Pekalongan. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota dengan target 63,64 persen, realisasi 111,61 persen sehingga capaiannya 175,37 persen. Indikator ini tercapai karena adanya dukungan dari segenap stakeholder dalam rangka proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi sehingga proses akuntabilitas kinerja koperasi dapat berjalan dengan baik.
8. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian. Target untuk indikator ini adalah 58,77 persen dan realisasi 88,32 persen sehingga capaiannya 150,28 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya dukungan dari segenap stakeholder terkait dalam proses peningkatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian sehingga beragam kegiatan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi pengurus, anggota maupun manajemen koperasi dapat berjalan dan berhasil dengan baik. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota dengan target 0,98 persen dan realisasi 0,12 persen sehingga capaiannya 12,41 persen. Indikator ini tidak tercapai karena kurangnya dukungan dan kesempatan dalam rangka fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi koperasi khususnya bagi anggota koperasi, pengurus dan jajaran manajemen koperasi. Banyaknya jumlah anggota koperasi, pengurus koperasi dan manajemen koperasi belum sepenuhnya dapat diberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan guna mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi.

9. Program Pengembangan UMKM. Target untuk indikator ini adalah 12,16 persen dan realisasi 25,56 persen sehingga capaiannya 210,22 persen. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya dukungan dari segenap stakeholder terkait dalam proses pengembangan UMKM sehingga beberapa pelaku usaha UMKM dapat menjadi wirausaha melalui peningkatan kompetensi, tata kelola manajerial keuangan yang semakin meningkat, legalitas perizinan berusaha yang lengkap. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan ini diukur dengan indikator meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha dengan target 4,85 persen dan realisasi 5,52 persen sehingga capaiannya 113,85 persen. Indikator ini tercapai karena dukungan dari beberapa *stakeholder* dalam memberikan pendampingan bagi UMKM dalam rangka pengembangan usaha berupa pemberian fasilitasi pameran, pelatihan keterampilan dan beberapa bantuan hibah sarana pemasaran pemasaran. Juga adanya dukungan dalam pemberian sertifikasi halal kepada para pelaku usaha UMKM khususnya yang bergerak dalam jasa rumah potong hewan
10. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan dan 6 (Enam) Sub Kegiatan Mendukung dalam hal upaya peningkatan produksi perikanan tangkap. Produksi Perikanan Tangkap tahun 2024 adalah 12.124,508 ton dengan target 1% pada masing masing indikator berikut :
 - a. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI. Realisasi kinerja sebesar 26,51% sehingga capaiannya 2,651%. Indikator ini tercapai karena adanya peningkatan jumlah kapal, dimana Intensitas kapal Arek Ragan (Rembang) yang bersandar, bongkar dan lelang di TPI Kota Pekalongan. Program ini diwujudkan dalam 2 (dua) Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan target 5% realisasi 100% sehingga capaiannya 2000%. Capaian jauh melebihi target dikarenakan formulasi Jumlah realisasi sarpras yang diusahakan dibagi usulan sarpras Dimana usulan sarpras pada tahun 2024 adalah

hanya 1 yaitu Pembangunan Pos Jaga. Dengan realisasi 1 unit Pos Jaga.

- b. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Nelayan Kecil yang dibina dengan target 10% realisasi 63,26% sehingga capaiannya 632,65%. Capaian jauh melebihi target yang ditentukan dikarenakan formulasi Jumlah nelayan kecil yang dibina dibagi Jumlah nelayan kecil yang terdaftar, Dimana jumlah nelayan yang terdaftar sebesar 187 nelayan (data pada tahun 2023) Sedangkan nelayan yang di bina sebanyak 131 nelayan kecil. Dengan pembinaan berupa Sosialisasi penerapan E-BKP Nelayan Kecil, Sosialisasi Permen KP no 36/2023, Pembinaan penerima bantuan mesin KKP, Pembentukan 2 Kelompok baru, Pemberian Sembako terdampak kebakaran kapal dan Update administrasi data kapal dan nelayan. Pembinaan 131 nelayan kecil memungkinkan dilaksanakan berulang dengan tema pembinaan yang berbeda.
 - c. Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI. Realisasi kinerja sebesar - 2.04% sehingga capaiannya -203.63%. Indikator ini tidak tercapai karena formulasi Peningkatan pendapatan yang bersumber dari Lelang di TPI Kota Pekalongan dibandingkan tahun lalu. Hal ini berarti realisasi pendapatan tahun ini menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diketahui juga dari indikator sebelumnya bahwa jumlah produksi perikanan tangkap tidak berbanding lurus dengan pendapatan Lelang melalui Lelang ikan di TPI Kota Pekalongan. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian penerapan retribusi layanan Lelang yang baru dimana dalam penerapan yang baru menyamaratakan jenis dan kualitas ikan. Sesuai dengan Perda atas dasar Peraturan Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan retribusi dengan tahun sebelumnya yang mengenakan retribusi sebesar 3% dari nilai produksi. Program ini diwujudkan dalam 1 (satu) Kegiatan yaitu: Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kegiatan ini diukur dengan indikator Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI dibandingkan tahun sebelumnya dengan target 1% realisasi - 0,02% sehingga capaiannya -2,04%. Capaian tidak mencapai target yang ditentukan dikarenakan adanya penurunan nilai produksi perikanan tangkap melalui Lelang TPI hal ini disebabkan oleh menyesuaikan penerapan retribusi layanan baru yang menyamaratakan kelas dan kualitas ikan dan Faktor cuaca yang kurang mendukung sehingga nelayan tidak dapat berlayar.
11. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan yang mendukung dalam hal upaya peningkatan produksi perikanan tangkap Produksi Perikanan Budidaya tahun 2024 adalah 522,919 ton. Target 1% pada indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi kinerja sebesar -0,32% sehingga capaiannya -10,72%. Indikator ini tidak tercapai karena adanya penurunan produksi perikanan budidaya dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan produksi udang vaname mengalami gagal panen dikarenakan adanya penyakit pada budidaya udang. Meskipun pada komoditas lain seperti ikan bandeng, ikan

lele dan ikan nila mengalami kenaikan, namun produksi ini belum bisa mencapai target produksi tahun 2024. Program ini diwujudkan dalam 1 (satu) Kegiatan yaitu Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan terdiri dari 5 aspek yaitu dokumen budidaya (Dokumen Realisasi Statistik Budidaya Tahun N-1), Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan yang difasilitasi, bantuan saprodi (bantuan benih dan Pengujian Kualitas Air Hg, Pb dan Cd. pada pokdakan Clarias Gebang Asri, Pokdakan Bule, Pokdakan Bagas Damas *Catfish*, BBI Kota Pekalongan, Pintu Masuk Air Petambak di Sungai Kali Banger), Prasarana Pembudidaya yang tersedia (Penyediaan 2 unit waring di Degayu dan Normalisasi saluran tambak di Degayu dan Krapyak), Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Pembinaan 30 pembudidaya ikan)

12. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yang mendukung dalam hal upaya pembinaan masyarakat di bidang pengolahan hasil perikanan.
- a. Target 2 pelaku usaha pada indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant). Realisasi kinerja sebesar 3 pelaku usaha sehingga capaiannya 150%. Indikator ini melebihi target. Terdapat 3 Pelaku usaha UMKM pemula di bidang perikanan yang mengikuti pembinaan secara intensif yaitu Anisah Nur, Zahrotun dan Eta Retno Suwaryani.

b. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan target 70% realisasi 96,74% sehingga capaiannya 138,21%. Capaian melebihi target dikarenakan Formulasi Jumlah bahan baku yang disimpan di Cold Storage dibagi kapasitas Cold Storage selama 11 bulan. Sedangkan realisasi penyimpanan cold storage selama 12 bulan.

SASARAN 17 : Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 17 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 37 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 17

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	68.89	persen	95.56	111.11	93.33	146.67	157.15	100

Indikator Persentase Penyelenggaraan Event Budaya merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Penyelenggaraan Event Budaya merupakan salah satu kegiatan yang identik dengan budaya atau memiliki nilai sosial yang tinggi dalam tatanan masyarakat. Penyelenggaraan Event Budaya bertujuan untuk Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlakul Karimah.

Pada tahun 2024, telah terselenggara 10 event kebudayaan di Kota Pekalongan. *Event* tersebut diantaranya acara Sadranan, Syawalan, Festival Pintu Dalam (Jl. Blimbing), Ketoprak, Bubur Suro, 1 Muharram, Pajang Jimat, Pagelaran Wayang Kulit Hari Pahlawan, Pembuatan Tari 1 dan Pembuatan Tari 2.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.022.598.000	1.122.598.000	1.101.475.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	459.500.000	434.500.000	434.500.000
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	209.560.000	209.560.000	208.905.100
Program Pembinaan Sejarah	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	177.500.000	177.500.000	173.802.380
Program Pengelolaan Permuseuman	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	2.159.147.000	2.215.667.000	2.183.985.966
Jumlah		4.068.305.000	4.199.825.000	4.142.668.446

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 98.63 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 157.15 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 59.33 % pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 5 (lima) program sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100 % sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena kolaborasi pemerintah kota Pekalongan bersama masyarakat Kota Pekalongan terjalin sangat baik Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Event kesenian dan

kebudayaan yang dikembangkan dengan target 6 event realisasi 6 event sehingga capaiannya 100 % . Indikator ini tercapai karena Masyarakat memiliki minat besar dalam pengembangan budaya, sehingga banyak komunitas kebudayaan yang terlibat aktif dalam pengembangan kebudayaan.

- b. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan dengan target 10 event realisasi 10 event sehingga capaiannya 100 %.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional Target untuk indikator ini adalah 100 dan realisasi 100 % sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena masyarakat, terutama pelaku seni ikut terlibat aktif dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi dengan target 26.00 Komunitas realisasi 26.00 Komunitas sehingga capaiannya 100 %. Indikator ini tercapai karena pendataan yang baik terkait kelompok kesenian yang ada di Kota Pekalongan
3. Program Pembinaan Sejarah Target untuk indikator ini adalah 100 dan realisasi 100 % sehingga capaiannya 100 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena Program telah dirancang dengan baik, termasuk jadwal, alokasi anggaran, dan strategi pelaksanaan yang jelas. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi dengan target 100 % realisasi 100 % sehingga capaiannya 100 %. Indikator ini tercapai karena perencanaan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan baik sehingga target pelaksanaan bisa tercapai dengan baik
4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Target untuk indikator ini adalah 93.97 % dan realisasi 111.67 % sehingga capaiannya 118.83 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena Ketersediaan tenaga ahli, seperti arkeolog, sejarawan, dan konservator, yang mendukung pelaksanaan program. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan target 2.48 % realisasi 13.65 % sehingga capaiannya 550.50 %. Indikator ini tercapai karena Pemerintah daerah lebih aktif dalam mengajukan objek baru untuk ditetapkan sebagai cagar budaya dibandingkan target awal.
5. Program Pengelolaan Permuseuman Target untuk indikator ini adalah 8.29 dan realisasi 3.96 % sehingga capaiannya 47.77 %. Indikator program ini dapat terealisasi karena banyaknya pengunjung tempat wisata yang dikelola masyarakat di kota Pekalongan menyebabkan capaian program menjadi rendah. Program ini diwujudkan dalam

pelaksanaan 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah pengunjung museum batik dengan target 28,000 orang realisasi 50,380 orang sehingga capaiannya 179.93 %. Indikator ini tercapai karena Program P5 di satuan pendidikan mendorong banyak siswa untuk mengunjungi museum sebagai bagian dari kegiatan belajar membatik.

SASARAN 18 : Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 18 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 38 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 18

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2022	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100	persen	100	100	100	100	100	100

Indikator Pengelolaan Potensi Konflik Sosial merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

Pengelolaan Potensi Konflik Sosial merupakan salah satu bentuk perwujudan Misi ke enam Pemerintah Kota Pekalongan yaitu Melestarikan Budaya, Kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah, yang bertujuan agar tercipta kondisi masyarakat yang aman, tentram dan kondusif.

Pada tahun 2024, persentase pengelolaan potensi konflik sosial Kota Pekalongan tercapai 100%. Dengan kata lain, tidak terdapat konflik yang terjadi sepanjang tahun 2024. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini :

1. Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Forkopimda bersama jajarannya unsur TNI/POLRI, dan juga Instansi Vertikal lainnya yang semakin kuat dan solid.
2. Mengedepankan pendekatan persuasif dan mengutamakan komunikasi yang intensif dengan semua pemangku kepentingan.
3. Kerjasama dan sinergitas dari semua pemangku kepentingan (Pemerintah dan Masyarakat) dan dibantu aparat TNI/Polri guna meningkatkan persentase Konflik Sosial tertangani dengan cara dialog, penyelesaian masalah secara damai mengutamakan musyawarah mufakat yang mengikat semua pihak.
4. Pemberdayaan masyarakat melalui Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota untuk melaporkan kejadian yang berpotensi menimbulkan konflik juga merupakan upaya untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial secara dini.
5. Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) guna menjaga kerukunan beragama yang ada di Wilayah Kota Pekalongan
6. Adanya sosialisasi, pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat akan wawasan kebangsaan, semangat persatuan dan kesatuan, pemahaman tentang pluralisme, nilai

- pancasila, ideologi bangsa serta nasionalisme di masyarakat;
- Masyarakat Kota Pekalongan mampu bersama – sama menjaga perbedaan yang ada dan menumbuhkembangkan toleransi.

Dalam rangka untuk mempertahankan ketiadaan konflik sosial pada tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

- Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan;
- Kerjasama yang lebih baik dengan Perangkat Daerah serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kota Pekalongan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
- Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.751.061.000	1.894.489.000	1.845.450.272
Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	11.458.242.000	11.408.080.000	11.390.430.783
Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	361.772.000	379.352.000	374.279.724
Program pembinaan dan pengembangan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan	187.207.000	162.207.000	150.218.418

ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	315.900.000	325.900.000	278.692.000
Jumlah		18.329.515.000	16.944.889.000	16.360.125.010

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96,55 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,45 % pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 5 program sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Target untuk indikator ini adalah persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dukungan dari semua pihak. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 4 sub kegiatan yang realisasinya terpenuhi/di atas 100%.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya politik. Target untuk indikator ini adalah Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik dengan target 16 lembaga dan terealisasi 16 lembaga, sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dukungan anggaran dan pihak – pihak terkait dalam kegiatan ini. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 2 sub kegiatan yang semua realisasinya terpenuhi 100%.
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Target untuk indikator ini Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan dengan target 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dukungan anggaran dan pihak – pihak terkait dalam kegiatan ini. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan perumusan Kebijakan Teknis

- dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 1 sub kegiatan yang realisasinya terpenuhi 100%.
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya. Target untuk indikator ini adalah Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan target 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dukungan anggaran dan pihak – pihak terkait dalam kegiatan ini. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase pelaksanaan kegiatan perumusan Kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 1 sub kegiatan yang realisasinya terpenuhi 100%.
 5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Target untuk indikator ini persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial dengan target 100% dan terealisasi 100%, sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena dukungan anggaran dan pihak – pihak terkait dalam kegiatan ini. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 kegiatan yaitu kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 1 sub kegiatan yang realisasinya terpenuhi 100%.

SASARAN 19 : Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 19 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 39 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 19

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Indeks SPBE	3.19	indeks	3.14	3.29	3.05	3.76	123.28	3.25

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi : Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; Data dan Informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Tabel 2. 40 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Provinsi Jawa Tengah	4.42	Memuaskan
2	Kabupaten Sukoharjo	4.45	Memuaskan
3	Kabupaten Sragen	4.34	Memuaskan
4	Kota Surakarta	4.3	Memuaskan
5	Kabupaten Kudus	4.23	Memuaskan
6	Kabupaten Wonogiri	4.2	Memuaskan
7	Kabupaten Banyumas	4.09	Sangat Baik
8	Kabupaten Kebumen	4.07	Sangat Baik
9	Kabupaten Klaten	4.07	Sangat Baik
10	Kabupaten Rembang	3.99	Sangat Baik
11	Kota Semarang	3.95	Sangat Baik
12	Kota Tegal	3.95	Sangat Baik

13	Kabupaten Demak	3.93	Sangat Baik
14	Kabupaten Purbalingga	3.93	Sangat Baik
15	Kabupaten Magelang	3.92	Sangat Baik
16	Kabupaten Karanganyar	3.9	Sangat Baik
17	Kabupaten Boyolali	3.89	Sangat Baik
18	Kabupaten Wonosobo	3.79	Sangat Baik
19	Kota Pekalongan	3.76	Sangat Baik
20	Kabupaten Pati	3.75	Sangat Baik

Sumber : Kementerian PAN RB, 2024

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa indeks SPBE Tahun 2024 Kota Pekalongan berada pada peringkat 18 Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota	1.685.845.000	1.710.845.000	1.693.130.553
	Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota	1.142.804.000	1.142.804.000	1.022.046.658

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penggunaan anggaran adalah sebesar 95.15 %. apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 123,28 %, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 29,56 %.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program yaitu Program Aplikasi Informatika, target untuk indikator ini adalah 3.10 dan realisasi 3.25 sehingga capaiannya 104.84%. indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan indikator indeks aspek teknologi Informasi dan Komunikasi. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan subdomain di lingkup pemerintah daerah Kabupaten/Kota. kegiatan ini diukur dengan indikator persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo dengan target 62,42% dan realisasi 61,82% sehingga capaiannya 99,04%. indikator ini tercapai karena merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun ini tidak ada penambahan koneksi/sambungan ke jaringan batik.net dikarenakan adanya refocusing anggaran.
2. Pengelolaan E-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota. kegiatan ini diukur dengan indikator presentasi sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan target 9,35% dan realisasi 9,35% sehingga

capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena komitmen pimpinan, sosialisasi efektif, sumber daya memadai, proses pendaftaran mudah, koordinasi baik, pengawasan ketat, dan kepatuhan tinggi.

SASARAN 20 : Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 20 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 41 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 20

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	IKM Kota	83.19	persen	90.44	90.69	83.79	91.37	109.05	84.09
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	91.00	skor	90.01	96.62	97.00	96.03	99.00	97.50

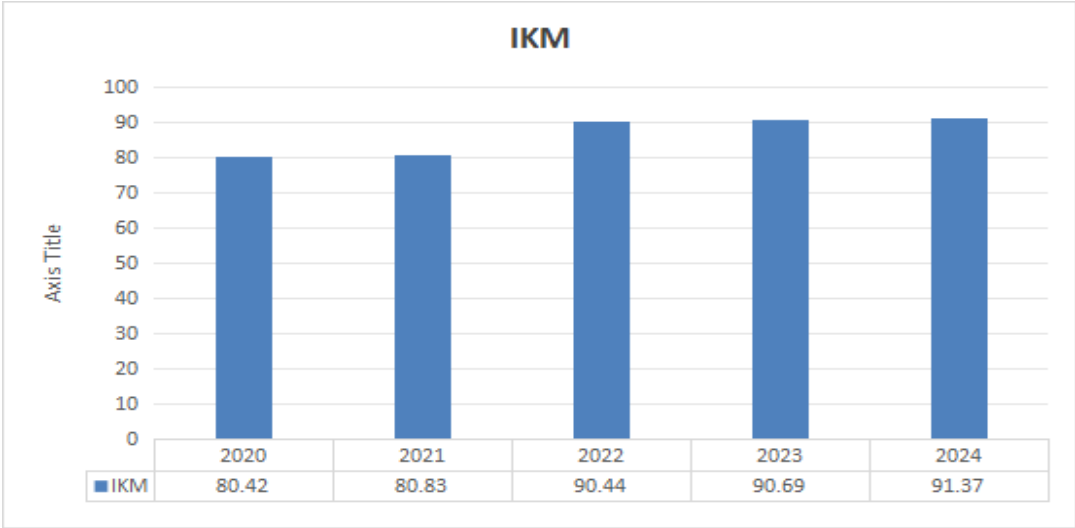
Indikator diatas merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan yang merupakan salah satu program unggulan Walikota Pekalongan, **sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.**

1. IKM Kota

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Penilaian kualitas pelayanan publik dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu tahun sekali. Adapun unsur yang dinilai meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

Pada tahun 2023, dilakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri pada 79 OPD/ Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Dari hasil pengukuran didapatkan rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91.37. Secara umum dapat diketahui bahwa kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh UPP di Kota Pekalongan terbilang baik dan terus-menerus mengalami peningkatan. Grafik dibawah menunjukkan nilai indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 :

Gambar 2. 3 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 - 2024 Kota Pekalongan



Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 tercatat terjadi kenaikan indeks kepuasan masyarakat dari 90.69 pada tahun 2023 menjadi 91.37 pada tahun 2024. Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, tim pelaksana juga mengumpulkan masukan dan saran dari para responden. Masukan dan saran tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh UPP dengan memberikan tanggapan ataupun rencana tindak lanjut.

Faktor pendukung keberhasilan pada sasaran ini sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen dari Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. Adanya perbaikan fasilitas pelayanan di masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Selain itu juga didukung dengan program dan kegiatan serta anggaran yang memadai, dengan rincian sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Penataan Organisasi	398.316.000	327.453.000	320.609.079

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penggunaan anggaran adalah sebesar 97.90 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 109.05 %, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11.39 %.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1(satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan kegiatan penataan organisasi pada Bagian Organisasi Setda. Sub kegiatan yang mengampu fasilitasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat adalah sub kegiatan fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana dimana capaian kinerja nya sebesar 100 %. Faktor pendukung ketercapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Adanya motivasi dan disiplin dalam bekerja;
- b. Adanya dukungan dan motivasi terhadap seluruh staf di Bagian Organisasi agar

- lebih bisa meningkatkan capaian realisasi baik fisik maupun keuangan;
- c. Membangun kerjasama yang baik dengan pimpinan dan rekan kerja.
2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinkominfo telah memberikan layanan akses keterbukaan informasi publik pada OPD secara bertahap. Seluruh OPD telah melakukan publikasi dokumen yang berisi informasi publik melalui web *ppip.pekalongankota.go.id*. Kemudian pada tahun 2017 telah melakukan penilaian atas keterbukaan informasi publik pada OPD.

Pada tahun 2024, indeks KIP Kota Pekalongan masuk ke dalam kategori informatif dengan nilai 96.03. Nilai tersebut belum mencapai target RPJMD yang ditetapkan karena pada tahap uji publik, penilaian dipengaruhi oleh pihak yang memaparkan (paparan oleh walikota mendapatkan nilai tinggi) namun pada saat paparan, Walikota Pekalongan tidak bisa memaparkan secara langsung dikarenakan sedang dalam masa cuti pilkada. sehingga nilai yang ditargetkan sebelumnya tidak tercapai. Oleh karena itu kedepannya dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang, maka akan ditempuh strategi :

- a. Perlunya Komitmen Walikota dalam kelangsungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik (KIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. Harus dilaksanakan koordinasi antar Perangkat Daerah;
- c. Aktivasi Admin dalam pengelolaan data Perangkat Daerah berjalan lancar.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota	5.432.210.000	5.502.210.000	5.454.522.509

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase penggunaan anggaran adalah sebesar 99,13%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 99%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1(satu) program yaitu program informasi dan komunikasi publik. target untuk indikator ini adalah persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam meningkatkan pelayanan permohonan

informasi publik. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota. kegiatan ini diukur dengan indikator peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah dengan target 80% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 115%. Indikator ini tercapai karena strategi komunikasi yang efektif, kualitas informasi yang baik, infrastruktur yang memadai, partisipasi aktif masyarakat, dan kebijakan yang mendukung.

SASARAN 21 : Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 21 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 42 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 21

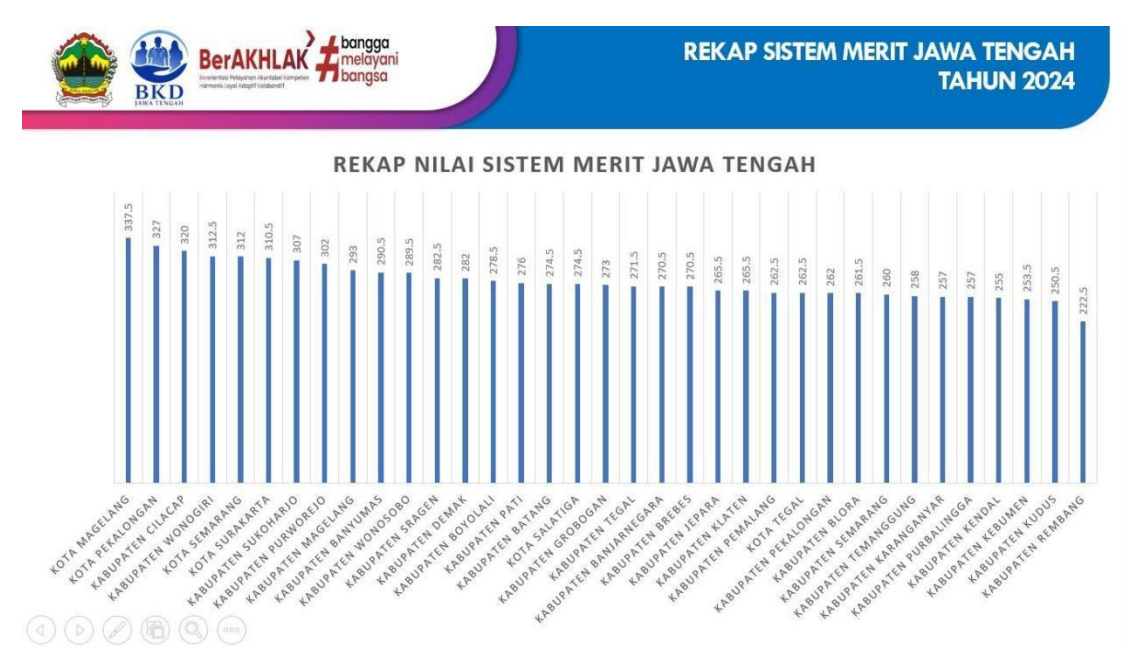
No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2021	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Indeks Merit System	200.00	indeks	264.50	327.00	327.00	327.00	100	340

Sistem Merit adalah merupakan kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Pengukuran Indeks penerapan Sistem Merit digunakan untuk menghitung keberhasilan suatu kegiatan yang mengatur terkait manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi serta kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Sistem merit dibuat untuk memenuhi empat tujuan, yaitu merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya, mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat, serta melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit.

Nilai Indeks Merit System Kota Pekalongan pada tahun 2024 sebesar 327, yang merupakan hasil penilaian pada tahun 2023. Karena Pemerintah Kota Pekalongan telah mencapai nilai yang sangat baik, maka penilaian Indeks Merit System dilakukan dua tahun sekali. Adapun perbandingan indeks merit system Kota Pekalongan dengan Daerah lain dan Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 2. 4 Perbandingan Indeks Merit System dengan Daerah lain di Wilayah Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber data : BKD Jawa Tengah

Faktor pendukung capaian indeks sistem merit antara lain :

1. Telah menyusun rencana pemenuhan kebutuhan ASN berdasarkan Anjab, ABK, pemetaan organisasi dan potensi daerah;
2. Telah menyelenggarakan Pengadaan CASN secara objektif dan transparan tanpa ada kecurangan;
3. Telah mengangkat CPNS menjadi PNS 100% sesuai unit kerja dan formasi jabatan yang dilamar;
4. Telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan untuk level JPT Pratama, Administrator dan Pengawas serta menetapkan Perwal Mekanisme Pengisian JPT Pratama;
5. Telah menetapkan Perwal Manajemen Talenta, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pengembangan kompetensi ASN melalui diklat, sosialisasi, workshop, magang dan *coaching mentoring*;
6. Telah menyelenggarakan Seleksi Pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif tanpa ada laporan pelanggaran dan melaksanakan pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas dengan menggunakan hasil uji kompetensi melalui *assessment*;
7. Telah menerapkan Pemberian TPP dengan memperhitungkan bobot kinerja dan disiplin pegawai;
8. Telah menerapkan kode etik dan membentuk majelis kode etik guna penegakan kebijakan secara konsisten;
9. Telah menerapkan pemberian reward bagi ASN terbaik, baik di tingkat OPD. maupun di tingkat kota.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	519.775.000	2.079.121.000	295.985.968
	Mutasi dan Promosi ASN	235.512.000	295.057.000	289.254.600
	Pengembangan Kompetensi ASN	251.706.000	372.911.000	319.488.100
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	219.098.000	176.598.000	132.995.300
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.817.534.000	1.524.017.000	1.063.002.300
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	121.000.000	55.375.000	44.463.500
Jumlah		3.164.625.000	4.503.079.000	2.145.189.768

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 47.64 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100 %, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 2 (dua) program sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah Target untuk indikator ini adalah sebagai berikut
 - ✓ Persentase PNS berkembang karier dengan target 80% realisasi 106,67% sehingga capaiannya 133,33%
 - ✓ Tingkat Pelaporan Kinerja ASN dengan target 100% realisasi 99,97% sehingga capaiannya 99,97%
 - ✓ Persentase Keterisian Jabatan dengan target 90% realisasi 95,61% sehingga capaiannya 106,23%
 - ✓ Persentase Keterpenuhan Formasi ASN dengan target 80% realisasi 48,14% sehingga capaiannya 60,18%

Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dalam peningkatan kapasitas ASN, pelaporan kinerja ASN dan keterpenuhan keterisian jabatan. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketersediaan data PNS dengan target 100%, realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena penyediaan data

- PNS yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
- b. Mutasi dan Promosi ASN. Kegiatan ini diukur dengan Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN dengan target 90%, realisasi 95,18% sehingga capaiannya 105,76%. Indikator ini tercapai karena penyediaan data mutasi dan promosi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
 - c. Pengembangan Kompetensi ASN. Kegiatan ini diukur dengan Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim) dengan target 42%, realisasi 63,26% sehingga capaiannya 150,62%. Indikator ini tercapai karena didorong oleh kebijakan SE Menpan RB 28 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Pekalongan 27 Tahun 2023 yang memberikan kemudahan PNS dalam meningkatkan kompetensi.
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Kegiatan ini diukur dengan Tingkat Disiplin ASN dengan target 100%, realisasi 99,97% sehingga capaiannya 99,97%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi kedisiplinan di semua OPD dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Target untuk indikator ini adalah Persentase PNS berkembang kompetensinya dengan target 40% realisasi 75,18% sehingga capaiannya 187,94%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekalongan dalam pengembangan kompetensi ASN. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengembangan Kompetensi Teknis. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Penyelenggaraan, Pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan umum dengan target 100%, realisasi 120% sehingga capaiannya 120%. Indikator ini tercapai karena sebagian pelatihan dengan metode pembelajaran daring/jarak jauh berbiaya kontribusi rendah dan non biaya akomodasi, meningkatkan jumlah peserta pelatihan.
 - b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. Kegiatan ini diukur dengan Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional dengan target 200 orang, realisasi 193 orang sehingga capaiannya 96,50%. Indikator ini tercapai karena telah dilaksanakan kegiatan sertifikasi pengadaan barang dan jasa melalui online.

SASARAN 22 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 22 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 95 % dengan kategori Sangat Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 43 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 22

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Nilai SAKIP Kota	73.07	skor	73.31	72.83	75.07	73.02	97.27	76.07

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024. Hasil evaluasi Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73.02 dengan predikat "BB". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 44 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai pada Tahun		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	24,38	23,24	23,30
2	Pengukuran Kinerja	30	19,50	20,04	20,09
3	Pelaporan Kinerja	15	11,48	11,52	11,59
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	17,95	18,03	18,04
Nilai Hasil Evaluasi		100	73,31	72,83	73,02
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB

Sumber data : Kementerian PAN RB, 2024

Pada Tahun 2024, nilai evaluasi AKIP Kota Pekalongan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan terjadi pada seluruh komponen penilaian. Berdasarkan capaian nilai evaluasi AKIP di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan berada pada peringkat ke-7 dari 35 Kabupaten/Kota. Adapun perbandingan nilai evaluasi AKIP dengan Kabupaten/Kota di di Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 45 Top 10 Nilai Evaluasi AKIP di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

No	Daerah	Nilai AKIP
	Provinsi Jawa Tengah	82,63
1	Kabupaten Banyumas	81,79
2	Kabupaten Wonogiri	77,69
3	Kabupaten Cilacap	75,48
4	Kota Magelang	75,02
5	Kabupaten Kudus	73,20

6	Kota Semarang	73,12
7	Kota Pekalongan	73,02
8	Kota Surakarta	72,00
9	Kabupaten Kendal	69,79
10	Kabupaten Karanganyar	69,31

Sumber data : Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah, 2024

Hambatan ketidaktercapaian target nilai SAKIP Kota antara lain

1. Kualitas kinerja pada sebagian kecil Perangkat Daerah belum sepenuhnya menggambarkan kinerja yang berorientasi hasil sesuai dengan level kinerjanya;
2. Pohon kinerja yang disusun oleh Pemerintah Kota Pekalongan belum sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Informasi dari hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan atau penyesuaian pengambilan kebijakan atau strategi aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan kedepan;
4. Hasil dari pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bagian dalam pemberian reward and punishment;
5. Laporan Kinerja Perangkat Daerah belum seluruhnya memuat analisis yang komprehensif dan substantif terkait analisis pencapaian kinerja yang detil. Informasi dalam capaian kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai masukan strategis dalam penyusunan perencanaan kinerja berikutnya;
6. Monitoring atas tindaklanjut dari hasil evaluasi AKIP internal belum dilakukan secara berkala dan menyeluruh dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di seluruh Perangkat Daerah.

Upaya yang akan dilakukan guna perbaikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Penyempurnaan aplikasi pohon kinerja Kota Pekalongan mengacu pada Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021
3. Menambah fitur *feedback* pimpinan melalui menu “Memo Pimpinan” sebagai media dialog kinerja secara berkala (triwulanan)
4. Hasil informasi pada pengukuran kinerja menjadi dasar penyusunan perubahan anggaran tahun berkenaan sehingga pencapaian kinerja dapat berjalan efektif
5. Kinerja individu dan Organisasi (dari aplikasi SEKSAMA) menjadi komponen pemotong tunjangan kinerja pegawai dari sisi prestasi kerja
6. Melakukan penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan catatan rekomendasi dari Kementerian PAN RB

7. Menyempurnakan kualitas evaluasi AKIP internal dengan memberikan catatan dan rekomendasi yang jelas

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	492.010.000	442.754.000	425.165.932
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	17.200.000	17.200.000	17.200.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	76.590.000	76.590.000	72.118.600
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	188.420.000	188.420.000	188.264.869
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	153.905.000	144.590.000	141.521.955
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	246.560.000	255.660.000	244.098.000
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	29.100.000	33.200.000	31.135.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	228.555.000	229.830.000	220.762.564
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	199.994.000	123.400.000	118.585.845
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	280.960.000	301.900.000	293.517.225
	Jumlah	1.913.294.000	1.813.544.000	1.752.369.990

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 96.63 %. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 97.27 %, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0.67 % pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dalam program ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:
 - a. Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu.
Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena tercapainya jumlah dokumen

evaluasi Pembangunan daerah berupa dokumen evaluasi RKPD triwulanan dan dokumen evaluasi DAK triwulanan.

Dalam indikator program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah dengan target 100% dan realisasi 100%. Ketercapaian dari kegiatan ini berupa terlaksananya kegiatan evaluasi RKPD triwulanan dan kegiatan evaluasi DAK triwulanan pada tahun 2024.

- b. Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu. Target indikator ini adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena ketercapaian data RKPD tahun 2025 secara lengkap dan tepat waktu dan ketersediaan data untuk perubahan RKPD 2024 secara tepat waktu melalui forum data.

Dalam indikator program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung yaitu kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data dengan target 100% dan tercapai 100% atau terealisasi 100%. Ketercapaian kegiatan ini berupa terselenggaranya kegiatan forum satu data.

- c. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu. Target indikator ini adalah 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Keberhasilan indikator program ini tidak lepas dari ketercapaian jumlah dokumen perencanaan yang ditargetkan tepat waktu. Jumlah dokumen yang ditargetkan tersebut adalah dokumen RKPD tahun 2025, Perubahan RKPD 2024, RPJPD, rancangan awal RKPD 2026 dan Rancangan Teknokratis RPJMD. Seluruh dokumen tersebut tersaji secara lengkap dan tepat waktu berkat Kerjasama dan komunikasi yang intensif antara stakeholder dan tim penyusun.

Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan dengan indikator Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan dengan target 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Ketercapaian dari kegiatan ini berupa terselenggaranya kegiatan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Kegiatan- kegiatan tersebut berupa rapat koordinasi, Focus Group Discussion, Kick Off, Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, kerjasama dan kajian akademik, serta studi komparasi.

- 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam program ini terdapat 3 (tiga) indikator guna mengukur ketercapaian program yaitu:
 - a. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud. Target indikator program ini adalah 100% dengan realisasi 100%. Sehingga capaiannya sebesar 100%. Ketercapaian indikator program ini dikarenakan ketercapaian dalam penyusunan dokumen sinkronisasi bidang pemerintahan, sosial dan budaya secara lengkap dan tepat waktu, Dokumen-dokumen tersebut adalah; Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan, Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring

dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia.

Dalam indikator program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan indikator Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan dan target 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Tingkat ketercapaian dari indikator ini berupa terselenggaranya berbagai kegiatan rapat dan koordinasi, pelatihan dan Focus Group Discussion dalam penyusunan dokumen perencanaan bidang Pembangunan manusia berupa; Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU), Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), capaian TBP/SDGs, RAD Penanganan Anak Tidak Sekolah, Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

- b. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dengan indikator. Target dari indikator ini adalah 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%. Indikator ini tercapai karena ketercapaian penyusunan dokumen kajian data Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan sistem informasi manajemen IUP.

Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan indikator Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan dan target 100% dengan realisasi 100% atau tercapaian 100%. Ketercapaian dari indikator ini dikarenakan terlaksananya kegiatan penyusunan kajian bidang perekonomian berupa kajian database IUP (Izin Usaha Perdagangan) dan Sistem Informasi Manajemen IUP.

- c. Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah dengan target indikator sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Ketercapaian indikator ini karena ketercapaian penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (RP3KP) secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam program ini kegiatan yang mendukung adalah kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan target indikator sebesar 100% dengan realisasi 100% atau tercapai 100%. Keberhasilan capaian indikator ini karena kegiatan penyusunan laporan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) tersusun tepat waktu sesuai dengan yang ditargetkan.

- 3. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah. Dalam program ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu:
 - a. Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD dengan target indikator sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga ketercapaiannya sebesar 100%. Keberhasilan atas target indikator ini adalah ketercapaian dalam pelaksanaan kompetisi Riset Unggulan Daerah (RUD) yang akan dijadikan sebagai rekomendasi dalam RPJMD. Dalam kompetisi RUD tahun 2024 terdapat 4 (empat)

pemenang berdasarkan tema masing-masing. Keempat pemenang tersebut adalah; 1. Kajian Materi Pembelajaran Teknologi dan Lingkungan berdasarkan konteks kondisi lingkungan di Kota Pekalongan, 2. Strategi Pengembangan dan Promosi Kuliner Kota Pekalongan (Studi Kasus Pasar Sugihwaras Pekalongan), 3. Studi Antropologi / Etnografi Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Rentan Anak Tidak Sekolah (berdasarkan perspektif dan tipologi Anak Putus Sekolah), 4. Kajian peran Kota Pekalongan dalam pengembangan potensi ekonomi / sumber daya lokal dan tenaga kerja pada Kawasan Industri Terpadu Batang

Dalam ketercapaian indikator program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan dengan indikator Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan dan target 100% dengan capaian 100% atau terealisasi 100%. Keberhasilan dari target tersebut karena Kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi yang dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara Bappeda Kota Pekalongan dengan perguruan tinggi.

- b. Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) dengan target skor sebesar 74.00. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitas Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyesuaian pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Sehingga Skor ketercapaian nilai SiDA pada tahun 2024 tidak dapat tercapai.

Indikator kegiatan yang mendukung program ini adalah kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan indikator Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA). Dalam hal ketidaktercapaian indikator ini disusun rencana aksi yaitu memformulasikan kembali indikator untuk mengukur kinerja Riset dan Inovasi dan diusulkan untuk menjadi bagian dalam dokumen perencanaan berikutnya, dalam hal ini RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2025-2029.

- c. Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga tingkat capaian sebesar 100%. Ketercapaian indikator ini disebabkan karena ketercapaian pemberdayaan stakeholder kelitbangan. Stakeholder kelitbangan yang bekerjasama dengan Bappeda Kota Pekalongan dalam berbagai penelitian, kajian dan pengabdian Masyarakat antara lain UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Institut Pertanian Bogor, Universitas Negeri Semarang, Institut Widya Pratama Pekalongan, Universitas Terbuka, Universitas Alma Ata Yogyakarta, Universitas Bhamada Slawi, Universitas Muhammadiyah Gombong.

Dalam indikator program ini ketercapaiannya didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu:

- ✓ Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dengan indikator Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek social dengan target 100% terealisasi 100% atau tercapai 100%. Ketercapaian kegiatan ini berkat terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen

penelitian yaitu; 1). Dokumen hasil penelitian dan riset bersama yang terdiri dari Penyusunan Strategi pengelolaan Air Limbah dan Pemanfaatan Air Tanah di Kota Pekalongan 2). Visioning Transformasi Kawasan pesisir Kota Pekalongan studi kasus Kawasan Degayu dan Slamaran

- ✓ Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan indikator jumlah dokumen hasil penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan dan target 1 dokumen dan tercapai 1 dokumen atau Tingkat capaian 100%. Dokumen tersebut adalah dokumen hasil riset produk unggulan daerah Penelitian bekerjasama dengan Universitas Pekalongan dengan Judul penentuan prioritas produk unggulan daerah dan pengembangannya di Kota Pekalongan menggunakan metode multi attribute utility theory (MAUT).

SASARAN 23 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 23 dengan 1 indikator kinerja belum dapat diketahui karena data belum dirilis oleh BPK RI. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 46 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 23

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	kategori	WTP	WTP	WTP	Na	Na	WTP

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, di samping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pekalongan berhasil memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 dari BPK RI. Penghargaan tersebut merupakan capaian yang ke 9 (sembilan) kalinya sejak pertama kali memperoleh predikat WTP pada tahun 2016. Opini BPK atas penyajian Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan telah dapat diyakini kewajarannya oleh BPK. Sedangkan opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2024 belum dapat tersedia data (Na) sampai dengan rilis BPK RI terbit.

Tabel 2. 47 Perbandingan Opini BPK Tahun 2023

No	Daerah	Opini BPK
1	Provinsi Jawa Tengah	WTP
2	Kota Pekalongan	WTP
3	Kabupaten Batang	WTP
4	Kabupaten Pekalongan	WTP

5	Kabupaten Pemalang	WTP
6	Kota Tegal	WTP

Sumber data : BPK RI, 2024

Faktor pendukung keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan tata kelola keuangan daerah kepada pejabat penata keuangan daerah;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan penerbitan dan pencairan SP2D;
3. Meninjau dan menyesuaikan regulasi tata kelola keuangan daerah;
4. Meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan aparatur atas regulasi dan kebijakan akuntansi;
5. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara rutin setiap triwulan;
6. Pembinaan dan pendampingan OPD dalam penyusunan Laporan Keuangan;
7. Koordinasi dan kerjasama dengan BPN dalam rangka percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemda;
8. Dukungan anggaran untuk memperbanyak pengajuan warkah pensertifikatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Pekalongan
9. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan Pengurus Barang OPD (Lap BMD) dan Pengurus Barang Pembantu (Lap Persediaan) secara rutin setiap triwulan;
10. Kegiatan inventarisasi barang milik daerah;
11. Mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi SIMBADA dan SIMDA;
12. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya);
13. Pemberian Stimulus PBB;
14. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
15. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
16. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
17. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
18. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
19. Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
20. Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru;
21. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
22. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
23. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	984.001.000	938.208.000	914.299.160
	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	377.134.000	397.925.000	397.925.000
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	346.039.000	351.039.000	345.387.434
	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.523.400.000	4.123.400.000	2.667.521.900
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.453.542.000	1.313.347.000	1.209.653.639
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.655.908.000	1.678.962.000	1.595.769.670
Jumlah		6.684.116.000	8.802.881.000	5.534.787.133

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 62.87 %. Efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dihitung karena capaian kinerja belum dirilis BPK RI.

Kinerja pada indikator sasaran ini didukung melalui 3 (tiga) program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang diukur dengan indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya. Target untuk indikator ini adalah 5,06% dan realisasi 5,06%, sehingga capaiannya 100% Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien oleh pemerintah daerah. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan yang matang dalam penyusunan APBD, pengendalian anggaran yang ketat, serta pemantauan realisasi belanja secara berkala. Selain itu, koordinasi yang baik antara BPKAD dan SKPD dalam pelaksanaan belanja daerah turut memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat sesuai dengan target yang telah direncanakan. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu dengan target 100% realisasi realisasi 100% sehingga capaian nya 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh adanya koordinasi yang efektif antara BPKAD, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), serta SKPD terkait, didukung dengan proses penyusunan anggaran yang terencana secara matang dan sesuai jadwal yang ditetapkan. Selain itu, kepatuhan terhadap tahapan dan regulasi perencanaan anggaran, penggunaan teknologi informasi dalam

penyusunan dokumen anggaran, serta adanya komitmen untuk mempercepat proses legislasi anggaran melalui Perda dan Perwal turut menjadi faktor penting dalam pencapaian ini.

- b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh adanya proses penatausahaan keuangan yang tertib dan responsif serta koordinasi yang efektif antara BPKAD dan OPD terkait. Selain itu, penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi memungkinkan percepatan penerbitan dan pencairan SP2D secara tepat waktu. Dukungan sumber daya manusia yang kompeten, kepatuhan terhadap prosedur perbendaharaan, serta komitmen untuk menjaga kelancaran arus keuangan daerah turut menjadi faktor penting dalam pencapaian ini.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh:
 - ✓ adanya komitmen kuat dalam penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, didukung oleh penerapan sistem akuntansi berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Koordinasi yang efektif antara BPKAD dan OPD dalam proses penyusunan data laporan keuangan serta pelaksanaan verifikasi dan rekonsiliasi secara berkala turut memastikan bahwa dokumen pertanggungjawaban APBD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan
 - ✓ penetapan target kinerja yang realistis sehingga capaian kinerja dapat terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan
 - ✓ pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan bidang akuntansi dan pelaporan
 - ✓ pemantauan dan evaluasi berkala: melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul
 - ✓ Sumber Daya Manusia yang kompeten: ketersediaan SDM yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tugas
 - ✓ Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan stakeholder yang memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diukur dengan indikator Indeks Pengelolaan Aset Baik dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai dikarenakan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah, khususnya BPKAD, dalam menerapkan tata kelola aset yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Komitmen ini diwujudkan melalui

inventarisasi aset yang tertib, pemanfaatan aset secara optimal, serta pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi berkala. Selain itu, dukungan sumber daya manusia yang kompeten serta penerapan teknologi informasi turut mendukung keberhasilan pengelolaan barang milik daerah dengan baik. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan dengan target 100% dan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh adanya komitmen dan koordinasi yang baik antara BPKAD dan OPD dalam menyusun serta menyampaikan laporan aset secara tepat waktu, didukung dengan pelaksanaan sosialisasi serta pemantauan berkala terkait pengelolaan aset tetap dan persediaan. Selain itu, penggunaan sistem informasi manajemen aset yang mempermudah proses pencatatan dan pelaporan turut berkontribusi dalam memastikan seluruh OPD dapat memenuhi kewajiban pelaporannya dengan baik.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang diukur dengan indikator Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD. Target untuk indikator ini 5% dan realisasi 2,35% sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya peningkatan akurasi dalam perencanaan pendapatan serta pengelolaan pemungutan yang efektif dan terstruktur. Faktor keberhasilan lainnya meliputi pemantauan realisasi penerimaan secara berkala, penguatan koordinasi dengan OPD terkait penerimaan daerah, serta penerapan sistem pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi. Selain itu, transparansi serta evaluasi rutin terhadap proses pemungutan turut memastikan target PAD dapat tercapai. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah yang diukur dengan 2 (indikator) yaitu:

- ✓ Indikator Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BPKAD dengan target 100% dan realisasi 104,42% sehingga capaian nya 104.42%. Indikator ini tercapai karena upaya penagihan *door to door* kepada wajib pajak PBJT restoran sehingga capaian pajak dapat terealisasi. Selain itu validasi verifikasi data piutang PBB yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Data Piutang memicu masyarakat untuk melakukan update data PBB sekaligus membayarkan tunggaknya. Adanya penerimaan BPHTB sangat dipengaruhi oleh banyaknya transaksi jual beli tanah dan bangunan di kota pekalongan dimana implementasi implementasi regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mulai efektif diberlakukan mulai 5 Januari 2024 dimana NPOPTK (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak) dari 60.000.000 ke 80.000.000.
- ✓ Indikator Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak dengan target 4,8% dan realisasi 6,35% sehingga capaiannya 132,28%. Tercapainya indikator ini didukung oleh berbagai faktor, antara lain, kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak, pemutakhiran data wajib pajak, penetapan SKPD/SKRD tepat waktu,

tindak lanjut atas keberatan pajak/retribusi, penguatan pengelolaan basis data pajak daerah, penerapan sistem monitoring yang lebih efektif, peningkatan layanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi, sarana dan prasarana yang memadai, serta penguatan koordinasi dan komunikasi internal maupun eksternal. Langkah-langkah tersebut berhasil mengidentifikasi dan mengelola sumber-sumber pendapatan pajak baru yang semula belum tergali, sehingga target peningkatan potensi pendapatan pajak dapat terlampaui.

SASARAN 24 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 24 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 70 % dengan kategori Cukup Berhasil. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 2. 48 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 24

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD 2026
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	
1	Maturitas SPIP	3.02	skor	3.022	3.00	3.60	3.01	83.61	4
2	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	2	OPD	2	3	6	3	50	8

1. Maturitas SPIP

SPIP merupakan salah satu bentuk pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan memberikan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pencapaian target indikator kinerja Maturitas SPIP tahun 2024 memperoleh skor 3,01.

Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan skor maturitas SPIP Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana tindak pengendalian pada seluruh OPD yaitu strategis pemda, strategis OPD dan tingkat operasional OPD;
- b. Menyusun risiko atas kemungkinan fraud dan kemitraan; dan
- c. Inspektorat untuk melaksanakan reviu efektivitas pelaksanaan pengelolaan risiko termasuk risiko fraud dan kemitraan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Penetapan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	30.848.000	30.848.000	23.659.000

Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	220.213.000	220.213.000	203.481.600
Jumlah		251.061.000	251.061.000	227.140.600

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 90,47%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 83,61%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut:

1. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Target untuk indikator ini adalah nilai Level Kapabilitas APIP sebesar 3,00 dan realisasinya nilai level kapabilitas APIP sebesar 3,00 sehingga capaiannya 100%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena komitmen organisasi dalam semua tahap perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan target 96% realisasi 100% sehingga capaiannya 104,7%. Indikator ini tercapai karena komitmen organisasi dalam semua tahap perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.

2. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2020 DPMPTSP Kota Pekalongan dan Dinarpus Kota Pekalongan berhasil memperoleh predikat WBK. Pada tahun 2023, dari 6 (enam) unit kerja yang diusulkan, 1 (satu) unit kerja yang berhasil memperoleh predikat WBK dari Kementerian PAN RB yaitu RSUD Bendan Kota Pekalongan. Sedangkan pada tahun 2024, 12 unit kerja yang diusulkan ke Tim Penilai Nasional (TPN) belum berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM. Dalam rangka untuk meningkatkan capaian OPD menuju WBK/WBBM, maka akan ditempuh strategi :

- a. Tim Penilai Internal akan melakukan pembinaan secara berkelanjutan terkait Pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang membangun ZI khususnya pada unit-unit kerja pelayanan, serta memastikan seluruh kriteria dan syarat unit

- kerja telah terpenuhi;
- b. Mengoptimalkan implementasi sistem pengawasan pada setiap unit kerja dengan penerapan mitigasi risiko dengan memetakan risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya *fraud* (KKN) sehingga mendorong pelayanan publik yang berintegritas;
 - c. Memastikan setiap inovasi yang dibuat telah disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan dan inovasi tersebut memperlihatkan dampak nyata yang lebih baik dalam mendorong peningkatan kinerja, pelayanan publik, dan juga penguatan integritas

Namun dalam tingkat capaian sasaran Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM masih masuk dalam kategori sangat tidak berhasil. Hal ini dikarenakan terdapat area penilaian area WBK/ WBBM sebagaimana Permen PAN & RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah berupa hal-hal yang harus diperhatikan oleh TPI pada saat melakukan evaluasi internal kepada unit kerja/satuan kerja adalah:

1. memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dari APIP/BPK telah selesai 100%;
2. memastikan hasil evaluasi penerapan SAKIP minimal "B" untuk menuju WBK dan minimal "BB" untuk Menuju WBBM;
3. memastikan tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN;
4. komitmen dan pemahaman pimpinan serta pegawai terkait pembangunan ZI;
5. kualitas implementasi dari komponen pengungkit serta data dukung implementasinya;
6. inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja;
7. menentukan penilaian dari hasil survei yang didapat;
8. capaian kinerja dari unit kerja/satuan kerja dan tren pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Sehingga program yang mendukung capaian indikator sasaran OPD yang menyandang predikat WBK/ WBBM tidak sepenuhnya didukung oleh program yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.z

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung sasaran ini :

PROGRAM	KEGIATAN	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp.)	Pagu Anggaran Setelah Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	118.863.000	116.503.000	105.232.900
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	13.928.000	14.928.000	14.684.600
Total		132.791.000	131.431.000	119.917.500

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 91,24%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 50%, maka dapat dikatakan tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada sasaran ini.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut:

1. Program penyelenggaraan pengawasan Target untuk indikator ini adalah Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85% dan realisasi 87,04% sehingga capaiannya 102,4% Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan target 100%. realisasi 115,32% sehingga capaiannya 115,32% %. Indikator ini tercapai karena komitmen organisasi dalam semua tahap perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan target 100%. Realisasi 87,50% sehingga capaiannya 87,50%. Indikator ini tidak tercapai karena adanya laporan yang masih menunggu progress penyelesaian.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN
TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada Tugas Pembantuan dari Kementerian/Lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/Kota.

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2024 tidak ada Tugas Pembantuan dari Daerah Provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten/kota.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekalongan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah – masalah pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dijadikan sebagai acuan dalam target pencapaiannya.

Urusan Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan kedua aturan tersebut, capaian atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan rapat Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa rapat Pendidikan tahun 2024 sampai dengan saat ini belum terbit, sehingga data yang digunakan adalah rapat Pendidikan tahun 2023. Sedangkan untuk pelaporan terkait anggaran menggunakan dasar pelaksanaan anggaran tahun 2024.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar;
3. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 dalam mencapai SPM bidang pendidikan, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024
(Berdasarkan Rapor Pendidikan Tahun 2023)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran			
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar						
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	10.220	1 tahun	1. Angka partisipasi sekolah	100	1 tahun	1.912.123.000			
					2. Angka partisipasi murni	100					
					3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	83,75					
					4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	84,7					
					5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	1					
					6. Kecukupan formasi guru ASN	38,14					
					7. Indeks distribusi guru	0,33					
					8. Proporsi PTK bersertifikat	54,46					
					9. Proporsi PTK penggerak *	1,09					
					2.	Pendidikan Dasar			Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	47.193	1 tahun
Sekolah Dasar (SD)											
			1. Angka partisipasi kasar	100			1 tahun				

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Angka partisipasi sekolah	100		
					3. Kemampuan literasi	59,29		
					4. Kemampuan numerasi	42,68		
					5. Perbedaan skor literasi	4,78		
					6. Perbedaan skor numerasi	1,45		
					7. Indeks iklim keamanan	71,89		
					8. Indeks iklim kebhinekaan	72,31		
					9. Indeks iklim inklusivitas	57,93		
					10. Kecukupan formasi guru ASN	38,15		
					11. Indeks distribusi guru	0,45		
					12. Proporsi PTK bersertifikat	45,51		
					13. Proporsi PTK penggerak *	0		
					Sekolah Menengah Pertama (SMP)			
					1. Angka partisipasi kasar	100	1 Tahun	
					2. Angka partisipasi sekolah	100		
					3. Kemampuan literasi	72,88		
					4. Kemampuan numerasi	72,19		
					5. Perbedaan skor literasi	6,33		
					6. Perbedaan skor numerasi	4,26		
					7. Indeks iklim keamanan	72,47		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					8. Indeks iklim kebhinekaan	71,09		
					9. Indeks iklim inklusivitas	58,9		
					10. Kecukupan formasi guru ASN	9,47		
					11. Indeks distribusi guru	0,35		
					12. Proporsi PTK bersertifikat	48,56		
					13. Proporsi PTK penggerak*	0		
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	1.364	1 tahun	1. Angka partisipasi kasar	0	1 tahun	1.301.922.000
					2. Angka partisipasi sekolah	100		
					3. Kemampuan literasi	65,3		
					4. Kemampuan numerasi	59,12		
					5. Perbedaan skor literasi	3,03		
					6. Perbedaan skor numerasi	6,01		
					7. Indeks iklim keamanan	71,37		
					8. Indeks iklim kebhinekaan	63,38		
					9. Indeks iklim inklusivitas	55,92		
					10. Kecukupan formasi guru ASN	0		
					11. Indeks distribusi guru	0		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					12. Proporsi PTK bersertifikat	0		
					13. Proporsi PTK Penggerak*	0		

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Target Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah sebanyak 10.220 orang, dengan anggaran sebesar Rp1.912.123.000,00.
- b. Target Pelayanan Pendidikan Dasar yaitu jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar adalah sebanyak 47.193 orang, dengan anggaran sebesar Rp9.778.385.000,00.
- c. Target Pelayanan Pendidikan Kesetaraan yaitu jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan adalah sebanyak 1.364 orang, dengan anggaran sebesar Rp1.301.922.000,00.

4.1.3. Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 baik dari anggaran maupun penerima layanan SPM Bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	10.220	10.373	100%	1.912.123.000	1.905.401.814	99,65%
2.	Pendidikan Dasar	47.193	48.045	100%	9.778.385.000	9.558.255.312	97,75%
3.	Pendidikan Kesetaraan	1.364	1.577	100%	1.301.922.000	1.298.334.674	99,72%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Realisasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD adalah sebanyak dengan target sebanyak 10.220 siswa dan realisasi sebanyak 10.373 siswa atau 100%, sehingga Indeks

- Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Anak Usia Dini melebihi target yang ditetapkan. Kegiatan tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.912.123.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.905.401.814,00 atau 99,65%.
- b. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Dasar yaitu jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dengan target sebanyak 47.193 siswa dan realisasi sebanyak 48.045 siswa atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Dasar melebihi target yang ditetapkan. Adapun dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.778.385.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp9.558.255.312,00 atau 97,75%.
- c. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Kesetaraan yaitu jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan dengan target sebanyak 1.364 siswa dan realisasi sebanyak 1.577 siswa atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Realisasi penerima layanan dasar Pendidikan Kesetaraan melebihi target yang ditetapkan. Sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp1.301.922.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.298.334.674,00 atau 99,72%.

Sedangkan Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	10.220	10.373	100 %	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini				18,69%
	1. Angka partisipasi sekolah	100	93,56	93,56%	
	2. Angka partisipasi murni	100	47,29	47,29%	
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	83,75	83,9	100%	
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	84,7	87,78	100%	
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	1	1	100%	
	6. Kecukupan formasi guru ASN	38,14	38,14	100%	
	7. Indeks distribusi guru	0,33	0,33	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	8. Proporsi PTK bersertifikat	54,46	54,46	100%	
	9. Proporsi PTK penggerak*	1,09	1,09	100%	
2.	Pendidikan Dasar	47.193	48.045	100	80
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar				19,87 %
	Sekolah Dasar (SD)				
	1. Angka partisipasi kasar	100	101,13	100%	
	2. Angka partisipasi sekolah	100	99,98	99,98%	
	3. Kemampuan literasi	59,29	64,12	100%	
	4. Kemampuan numerasi	42,68	48,17	100%	
	5. Perbedaan skor literasi	4,78	4,78	100%	
	6. Perbedaan skor numerasi	1,45	1,45	100%	
	7. Indeks iklim keamanan	71,89	71,89	100%	
	8. Indeks iklim kebhinekaan	72,31	74,57	100%	
	9. Indeks iklim inklusivitas	57,93	55,39	95,62%	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	38,15	38,15	100%	
	11. Indeks distribusi guru	0,45	0,45	100%	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	45,51	45,51	100%	
	13. Proporsi PTK penggerak*	0	0	100%	
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)				
	1. Angka partisipasi kasar	100	107,13	100%	
	2. Angka partisipasi sekolah	100	96,72	96,72%	
	3. Kemampuan literasi	72,88	76,56	100%	
4. Kemampuan numerasi	72,19	65,43	90,64%		
5. Perbedaan skor literasi	6,33	6,33	100%		
6. Perbedaan skor numerasi	4,26	4,26	100%		
7. Indeks iklim keamanan	72,47	73,2	100%		
8. Indeks iklim kebhinekaan	71,09	75,98	100%		
9. Indeks iklim inklusivitas	58,9	60,53	100%		
10. Kecukupan formasi guru ASN	9,47	9,47	100%		
11. Indeks distribusi guru	0,35	0,35	100%		
12. Proporsi PTK bersertifikat	48,56	48,56	100%		
13. Proporsi PTK penggerak*	0	0	100%		
3.	Pendidikan Kesenjaraan	1.364	1.577	100%	80%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				18,81 %
	1. Angka partisipasi kasar	0	0	100%	
	2. Angka partisipasi sekolah	100	22,76	22,76%	
	3. Kemampuan literasi	65,3	65,3	100%	
	4. Kemampuan numerasi	59,12	59,12	100%	
	5. Perbedaan skor literasi	3,03	3,03	100%	
	6. Perbedaan skor numerasi	6,01	6,01	100%	
	7. Indeks iklim keamanan	71,37	71,37	100%	
	8. Indeks iklim kebhinekaan	63,38	63,38	100%	
	9. Indeks iklim inklusivitas	55,92	55,92	100%	
	10. Kecukupan formasi guru ASN	0	0	100%	
	11. Indeks distribusi guru	0	0	100%	
	12. Proporsi PTK bersertifikat	0	0	100%	
	13. Proporsi PTK Penggerak*	0	0	100%	

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Persentase Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebesar 18,69%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini yaitu sebesar 98,69%.
- b. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar yaitu sebesar 19,87%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan Pendidikan Dasar yaitu sebesar 99,87%.
- c. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 18,81%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan yaitu sebesar 98,81%.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 4 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	98,69%	TUNTAS UTAMA
2.	Pendidikan Dasar	99,87%	TUNTAS UTAMA
3.	Pendidikan Kesetaraan	98,81%	TUNTAS UTAMA

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan data di atas, maka nilai rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 adalah sebesar 99,12% atau termasuk kategori TUNTAS UTAMA.

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan pada tahun 2024 untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang pendidikan di Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	-	1.912.123.000	-
2.	Pendidikan Dasar	-	9.778.385.000	-
3.	Pendidikan Kesetaraan	-	1.301.922.000	-
4.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya yang mendukung Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan	-	10.432.380.000	-
	Bantuan perlengkapan siswa miskin SD (CSR Bank Jateng)	-	-	250.000.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Total anggaran yang mendukung SPM Bidang Pendidikan adalah sebesar Rp23.674.810.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan rincian sebesar Rp23.424.810.000,00 bersumber dari APBD Kota Pekalongan tahun 2024 dan sebesar Rp250.000.000,00 berasal dari CSR PT. Bank Jawa Tengah.

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 6 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2	123
2.	Strata 1	3.861
3.	D III	125
4.	D II	51
5.	D I	10
6.	SLTA	867
7.	SLTP	119
8.	SD	120
JUMLAH		5.276

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Jumlah total dukungan personil pemenuhan SPM bidang Pendidikan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebanyak 5.276 orang.

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 7 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat.	1. Proses update data pada aplikasi Dapodik maupun EMIS oleh Operator sekolah dilaksanakan di awal waktu sehingga terhindar dari permasalahan sistem akibat <i>over</i> kapasitas pengakses aplikasi menjelang <i>cut off</i> . 2. Mengintensifkan penguatan kelembagaan di satuan pendidikan terutama disiplin dalam menjalankan administrasi sekolah.
	Kesulitan dalam memperoleh data siswa pendidikan menengah, yang kewenangannya berada di Provinsi	Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sistem Dinas Pendidikan Provinsi dan admin Dapodik di tingkat pusat agar kebutuhan data terpenuhi.
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan, memerlukan waktu untuk melakukan verifikasi dan	Meningkatkan koordinasi dengan tim verifikator dari sekolah terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi siswa miskin

No.	Permasalahan	Solusi
	validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar.	sehingga dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu.
	Tidak tersedianya data BNBA pada data penduduk, sehingga kesulitan dalam menentukan kebutuhan jumlah penerima layanan SPM berdasarkan asal siswa.	Melakukan koordinasi dengan Dindukcapil agar mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Keterbatasan anggaran yang tersedia menghambat pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencapaian SPM.	1. Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan agar hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Melakukan advokasi penganggaran pemenuhan SPM di Badan Anggaran agar penetapannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
4.	Pelaksanaan	-
	Tidak ada	-
5,	Lain-lain	
	Rapor pendidikan yang dirilis terlambat sehingga menyulitkan dalam menyusun pelaporan tahun N karena data yang disandingkan tidak padan.	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.
	Rapor pendidikan hanya menyajikan hasil akhir tanpa menyertakan nilai variabel perhitungannya, sehingga menyulitkan pada saat pengisian form tahapan penerapan SPM.	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

4.2. Bidang Kesehatan

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia dan merupakan modal setiap warga negara dan setiap bangsa dalam mencapai kemakmuran. Seseorang tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika dia berada dalam kondisi tidak sehat. Oleh sebab itu maka setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan dijadikan sebagai acuan dalam target pencapaiannya.

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

- Pelayanan kesehatan balita;
- Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus;
- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis;
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan di Kota Pekalongan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7/0019 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor : 400.7/0588 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pekalongan Nomor 400.7/0019 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2024. Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 dalam mencapai SPM Bidang Kesehatan, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 8 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.305	1 tahun	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4305	1 tahun	125.000.000
					2. Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	774.900		
					3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	4.305		
					4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4305		
					5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4305		
					6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	4305		
					7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan	4305		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV			
					8. Kartu ibu/ rekam medis ibu	4305		
					9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4305		
					10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70		
					11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	287		
					12. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	271		
					13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	935		
					14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	400		
					15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	4305		
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.874	1 tahun	1. Formulir partograf	3.874	1 tahun	32.813.000
					2. Kartu ibu/ rekam medis ibu	3.874		
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak	3.874		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)			
					4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70		
					5. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	271		
					6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	400		
					7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	935		
					8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	3.855	1 tahun	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	3855	1 tahun	196.795.000
					2. Vitamin K1 injeksi	3855		
					3. Salep/tetes mata antibiotik	3855		
					4. Formulir bayi baru lahir	3855		
					5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	3855		
					6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3855		
					7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					8. Tenaga medis : Dokter/ Dokter Spesialis Anak	270		
					9. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	54		
					13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					14. Kader Kesehatan	2.220		
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	16.048	1 tahun	1. Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	16.048	1 tahun	156.413.000
					2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	16.048		
					3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.048		
					4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	16.048		
					5. Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	16.048		
					6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	16.048		
					7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	16.048		
					8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	16.048		
					9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	16.048		
					10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	16.048		
					11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB -Hib	16.048		
					12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	16.048		
					13. Jarum suntik dan Bahan	16.048		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Habis Pakai (BHP)			
					14. Peralatan Anafilaktik	14		
					15. Formula Terapi Gizi Buruk	31		
					16. Tenaga medis : Dokter	253		
					17. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					18. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					20. Guru PAUD	1.083		
					21. Kader Kesehatan	2.220		
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	45.000	1 tahun	1. Form pencatatan/ buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	45.000	1 tahun	99.142.000
					2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	45.000		
					3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	45.000		
					4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per	45.000		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					sekolah/madrasah/pesantren)			
					5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	45.000		
					6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 table dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	16.801		
					7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	14		
					8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	2.500		
					9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	70		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	45.000		
					11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	299		
					12. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					13. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	24		
					17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	2.671		
					18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer counselor	2.220		
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	210.465	1 tahun	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	1 tahun	163.173.000
					2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	28		
					3. Alat : Tensimeter	28		
					4. Alat : Glukometer	28		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar										
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian								
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
					5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	14									
					6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alcohol	210.465									
					7. Alat : KIT IVA Tes	14									
					8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	14									
					9. Kit Ophthalmologi Komunitas	28									
					10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	28									
					11. Alat Pelayanan KB	42									
					12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	14									
					13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	66.000									
					14. Tenaga medis : Dokter	253									
					15. Tenaga kesehatan : Bidan	400									
					16. Tenaga kesehatan : Perawat	935									
					17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36									
					18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54									
					19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	84									
					7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	35.444	1 tahun	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	28	1 tahun	27.053.000
												2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	28		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran							
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar										
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian								
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
					3. Alat pemeriksaan kolesterol	28									
					4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	35.444									
					5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	14									
					6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	14									
					7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70									
					8. Tenaga medis : Dokter	253									
					9. Tenaga kesehatan : Bidan	400									
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	935									
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36									
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	24									
					13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2.220									
					8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	76.872	1 tahun	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	70	1 tahun	6.576.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					2. Obat Hipertensi	76872		
					3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	28		
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	14		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	28		
					6. Tenaga medis : Dokter	253		
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					8. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	54		
					11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	396		
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54		
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	14.148	1 tahun	1. Obat Diabetes Melitus	14148	1 tahun	6.291.000
					2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	28		
					3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	14148		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	14		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	70		
					6. Tenaga medis : Dokter	253		
					7. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					8. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54		
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36		
					12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	133		
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan	1.013	1 tahun	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru	14	1 tahun	11.520.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pelayanan kesehatan			(bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)			
					2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/m edikasi)	14		
					3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	14		
					4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	14		
					5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	28		
					6. Tenaga kesehatan : Dokter	253		
					7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	14		
					8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	4		
					9. Tenaga profesional lainnya	2		
					11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis		
2. Reagen Zn TB	44							
3. Masker bedah dan Masker N95	9.976							

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pelayanan kesehatan			4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	13.672		
					5. Katrid tes cepat molekuler	6.836		
					6. Formulir pencatatan dan pelaporan	14		
					7. Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	22		
					8. Tuberkuilin	271		
					9. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	277		
					10. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396		
					12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54		
					13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	133		
					14. Tenaga kesehatan : Radiografer	41		
					15. Kader Kesehatan	2.220		
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	17.542	1 tahun	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	1 tahun	73.286.000
					2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	17.542		
					3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	17.542		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	17.542		
					5. Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	280		
					6. Tenaga kesehatan : Bidan	400		
					7. Tenaga kesehatan : Perawat	935		
					8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	133		
					9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	54		
					10. Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	1		

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Target Pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 4.305 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00.
- b. Target Pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 3.874 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp32.813.000,00.
- c. Target Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 3.855 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp196.795.000,00.

- d. Target Pelayanan kesehatan balita yaitu jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 16.048 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp156.413.000,00.
- e. Target Pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar yaitu jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 45.000 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp99.142.000,00.
- f. Target Pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 210.465 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp163.173.000,00.
- g. Target Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 35.444 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp27.053.000,00.
- h. Target Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu jumlah warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 76.872 orang, atau seluruh warga Kota Pekalongan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.576.000,00.
- i. Target Pelayanan kesehatan penderita *diabetes militus* yaitu jumlah warga negara penderita *Diabetes Melitus* usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 14.148 orang, atau seluruh warga Kota Pekalongan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.291.000,00.
- j. Target Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu jumlah warga negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 1.013 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.520.000,00.
- k. Target Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis yaitu jumlah warga negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 9.976 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp62.734.000,00.
- l. Target Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yaitu Jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah sebanyak 17.542 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp73.286.000,00.

Selain anggaran tersebut di atas, terdapat alokasi program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya dengan rincian Pengadaan Kartrid TCM sebesar Rp831.493.800,00, untuk pengadaan Pengadaan Rapid HIV dan reagen Sifilis untuk Skrining IBu Hamil sebesar Rp143.942.500,00, Pengadaan BMHP Thermal paper untuk EKG dan Gel untuk USG sebesar Rp19.052.000,00, pengadaan BMHP gula darah sebesar Rp329.205.000,00, pengadaan reagen profil lipid sebesar Rp190.247.000,00 dan pengadaan BMHP SHk sebesar Rp80.225.0000,00.

4.2.3. Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 baik dari anggaran maupun penerima layanan SPM Bidang Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	4.305	4.305	100%	125.000.000	117.635.000	94,11%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.874	3.874	100%	32.813.000	32.813.000	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3.855	3.837	99,53%	196.795.000	189.519.500	96,30%
4.	Pelayanan kesehatan balita	16.048	16.048	100%	156.413.000	154.523.000	98,79%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	45.000	45.000	100%	99.142.000	94.742.000	95,56%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	210.465	190.150	90,35%	163.173.000	161.243.000	98,82%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	35.444	34.963	98,64%	27.053.000	25.791.500	95,34%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	76.872	62.787	81,68%	6.576.000	6.576.000	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	14.148	14.148	100%	6.291.000	6.291.000	100%
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.013	1.013	100%	11.520.000	11.520.000	100%
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	9.976	9.976	100%	62.734.000	59.224.000	94,40%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	17.542	17.542	100%	73.286.000	73.279.600	99,99%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Realisasi capaian penerima layanan dasar dan realisasi anggaran SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 4.305 orang dan realisasi sebanyak 4.305 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp117.635.000,00 atau 94,11%.
- b. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 3.874 orang dan realisasi sebanyak 3.874 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar Rp32.813.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp32.813.000,00 atau 100%.
- c. Realisasi penerima layanan dasar kesehatan bayi baru lahir yaitu jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 3.855 orang dan realisasi sebanyak 3.837 orang atau 99,53%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 79.63%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar kesehatan bayi baru lahir sebesar Rp196.795.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp189.519.500,00 atau 96,30%.
- d. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan balita yaitu jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 16.048 orang dan realisasi sebanyak 16.048 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar Pelayanan kesehatan balita sebesar Rp156.413.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp154.523.000,00 atau 98,79%.
- e. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu jumlah jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 45.000 orang dan realisasi sebanyak 45.000 orang atau capaian penerima layanan dasar sebesar 100% atau capaian penerima layanan dasar sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sebesar Rp99.142.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp94.742.000,00 atau 95,56%.
- f. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif yaitu jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 210.465 orang dan realisasi sebanyak 190.150 orang atau 90,35%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 72,28%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif sebesar Rp163.173.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp161.243.000,00 atau 98,82%.
- g. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 35.444 orang dan realisasi sebanyak 34.963 orang atau 98,64%, sehingga Indeks Pencapaian (IP)

layanannya sebesar 78,91%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar Pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar Rp27.053.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp25.791.500,00 atau 95,34%.

- h. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu jumlah warga penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 76.872 orang dan realisasi sebanyak 62.787 orang atau 81,68%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 65,34%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebesar Rp6.576.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.576.000,00 atau 100%.
- i. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan kesehatan penderita *diabetes militus* yaitu Jumlah Warga Negara Penderita *Diabetes Melitus* usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 14.148 orang dan realisasi sebanyak 14.148 orang atau 100% sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar pelayanan kesehatan penderita *diabetes militus* sebesar Rp6.291.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp6.291.000,00 atau 100%.
- j. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 1.013 orang dan realisasi sebanyak 1.013 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sebesar Rp11.520.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp11.520.000,00 atau 100%.
- k. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkolosis* yaitu Jumlah Warga Negara terduga *tuberculosis* yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 9.976 orang dan realisasi sebanyak 9.976 orang atau 100% sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkolosis* sebesar Rp62.734.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp59.224.000,00 atau 94,40%.
- l. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yaitu Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan target sebanyak 17.542 orang dan realisasi sebanyak 17.542 orang atau 100% sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian layanan dasar Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sebesar Rp73.286.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp73.279.600,00 atau 99,99%.

Sedangkan realisasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya yang mendukung pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Kartrid TCM dengan anggaran sebesar Rp831.493.800,00 dan realisasi sebesar Rp823.259.250,00 atau 99,01%.
2. Pengadaan Rapid HIV dan reagen Sifilis untuk Skrining ibu hamil dengan anggaran sebesar Rp143.942.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp143.930.925,00 atau 99,99%.
3. Pengadaan BMHP Thermal paper untuk EKG dan Gel untuk USG dengan anggaran sebesar Rp 19.052.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp18.889.520,00 atau 99,15%.
4. Pengadaan BMHP Gula darah dengan anggaran sebesar Rp329.205.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp329.205.000,00 atau 100%.
5. Pengadaan Reagen Profil Lipid dengan anggaran sebesar Rp190.247.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp190.207.580,00 atau 99,98%.
6. Pengadaan BMHP SHK dengan anggaran sebesar Rp80.225.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp67.980.000,00 atau 84,74%.
7. Anggaran dari *Global Fund* untuk penanganan TBC dan HIV dengan anggaran sebesar Rp119.006.400,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp119.006.400,00 atau 100%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 10 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	4.305	4.305	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Ibu Hamil				20%
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	4.305	4.305	100%	
	2. Tablet tambah darah(180 tablet x jumlah ibu hamil)	774.900	774.900	100%	
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	4.305	4.305	100%	
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	4.305	4.305	100%	
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	4.305	4.305	100%	
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	4.305	4.305	100%	
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	4.305	4.305	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	4.305	4.305	100%	
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	4.305	4.305	100%	
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	70	100%	
	11. Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	287	287	100%	
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	271	271	100%	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	935	935	100%	
	14. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	400	400	100%	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396	396	100%	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100%	
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	4.305	4.305	100%	
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	3.874	3.874	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Ibu Bersalin				19,92%
	1. Formulir partograf	3.874	3.874	100 %	
	2. Kartu ibu/rekam medis ibu	3.874	3.874	100 %	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	3.874	3.874	100%	
	4. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	70	100%	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	271	261	96,31%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	6. Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	400	400	100%	
	7. Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	935	935	100%	
	8. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396	396	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100%	
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3.855	3.837	99,53%	79,63%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Bayi Baru Lahir				19,96%
	1. Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	3.855	3.837	99,53%	
	2. Vitamin K1 injeksi	3.855	3.837	99,53%	
	3. Salep/tetes mata antibiotik	3.855	3.837	99,53%	
	4. Formulir bayi baru lahir	3.855	3.837	99,53%	
	5. Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	3.855	3.837	99,53%	
	6. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	3.855	3.837	99,53%	
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	70	100 %	
	8. Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	270	270	100 %	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	400	400	100 %	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100 %	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396	396	100 %	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	54	54	100 %	
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100 %	
	14. Kader Kesehatan	2.220	2.220	100 %	
4.	Pelayanan kesehatan balita	16.048	16.048	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Balita				20%
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	16.048	16.048	100%	
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	16.048	16.048	100%	
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	16.048	16.048	100%	
	4. Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	16.048	16.048	100%	
	a.	16.048	16.048	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	5. Vitamin A Merah(sesuai standar 12-59 bulan)	16.048	16.048	100%	
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	16.048	16.048	100%	
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	16.048	16.048	100%	
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	16.048	16.048	100%	
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	16.048	16.048	100%	
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	16.048	16.048	100%	
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	16.048	16.048	100%	
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	16.048	16.048	100%	
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	16.048	16.048	100%	
	14. Peralatan Anafilaktik	14	14	100%	
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	31	31	100%	
	16. Tenaga medis : Dokter	253	253	100%	
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	400	400	100%	
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100%	
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100%	
	20. Guru PAUD	1.083	1.083	100%	
	21. Kader Kesehatan	2.220	2.220	100%	
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	45.000	45.000	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				20%
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	45.000	45.000	100 %	
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	45.000	45.000	100 %	
	3. Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	45.000	45.000	100 %	
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per	45.000	45.000	100 %	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	sekolah/madrasah/pesantren)				
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	45.000	45.000	100 %	
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 table dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	16.801	16.801	100 %	
	7. Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	14	14	100 %	
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	2.500	2.500	100 %	
	9. Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	70	70	100 %	
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	45.000	45.000	100 %	
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	299	299	100 %	
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	400	400	100 %	
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100 %	
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100 %	
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396	396	100 %	
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	24	24	100 %	
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	2.671	2.671	100 %	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	2.220	2.220	100 %	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	210.465	190.150	90,35%	72,28 %
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Usia Produktif				19,90 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	70	100%	
	2. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	28	28	100%	
	3. Alat : Tensimeter	28	28	100%	
	4. Alat : Glukometer	28	28	100%	
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	14	14	100%	
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	210.465	190.150	90,35 %	
	7. Alat : KIT IVA Tes	14	14	100%	
	8. Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	14	14	100%	
	9. Kit Ophthalmologi Komunitas	28	28	100%	
	10. Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	28	28	100%	
	11. Alat Pelayanan KB	42	42	100%	
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	14	14	100%	
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	66.000	66.000	100%	
	14. Tenaga medis : Dokter	253	253	100%	
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	400	400	100%	
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100%	
	17. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100%	
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	100%	
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	84	84	100%	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	35.444	34.963	98,64 %	78,91%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Usia Lanjut				19,98 %
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar	28	28	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	lengan atas, dan tensimeter				
	2. Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	28	28	100%	
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	28	28	100%	
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	35.444	34.963	98,64 %	
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	14	14	100%	
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	14	14	100%	
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	70	100%	
	8. Tenaga medis : Dokter	253	253	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Bidan	400	400	100%	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100%	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100%	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	24	24	100%	
	13. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	2.220	2.220	100%	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	76.872	62.787	81,68 %	65,34%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Penderita Hipertensi				19,69 %
	1. Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	70	70	100%	
		76.872	62.787	81,68 %	
	2. Obat Hipertensi				
	3. Tensimeter (mengukur tekanan darah)	28	28	100%	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	14	14	100%	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	28	28	100%	
	6. Tenaga medis : Dokter	253	253	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	400	400	100%	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100%	
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	54	54	100%	
	11. Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasian	396	396	100%	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	100%	
9.	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes militus</i>	14.148	14.148	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Penderita <i>Diabetes Militus</i>				20%
	1. Obat Diabetes Melitus	14.148	14.148	100%	
	2. Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	28	28	100%	
	3. BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	14.148	14.148	100%	
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	14	14	100%	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	70	70	100%	
	6. Tenaga medis : Dokter	253	253	100%	
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	400	400	100%	
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396	396	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	100%	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	36	36	100%	
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	133	133	100%	
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1.013	1.013	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				20%
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	14	14	100%	
	2. Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	14	14	100%	
	3. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	14	14	100%	
	4. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)	14	14	100%	
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	28	28	100%	
	6. Tenaga kesehatan : Dokter	253	253	100%	
	7. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	14	14	100%	
	8. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	4	4	100%	
	9. Tenaga profesional lainnya	2	2	100%	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	9.976	9.976	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis				20%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	70	100%	
	2. Reagen Zn TB	44	44	100%	
	3. Masker bedah dan Masker N95	9.976	9.976	100%	
	4. Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil	13.672	13.672	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering				
	5. Katrid tes cepat molekuler	6.836	6.836	100%	
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	14	14	100%	
	7. Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	22	22	100%	
	8. Tuberkulin	271	271	100%	
	9. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	277	277	100%	
	10. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100%	
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	396	396	100%	
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	54	54	100%	
	13. Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	133	133	100%	
	14. Tenaga kesehatan : Radiografer	41	41	100%	
	15. Kader Kesehatan	2.220	2.220	100%	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	17.542	17.542	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)				20%
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	70	70	100%	
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	17.542	17.542	100%	
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	17.542	17.542	100%	
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	17.542	17.542	100%	
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	280	280	100%	
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	400	400	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	935	935	100%	
	8. Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	133	133	100%	
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	54	54	100%	
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	1	1	100%	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Persentase Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan ibu hamil yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu sebesar 20%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu sebesar 100%.
- Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan ibu bersalin yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu sebesar 19,92%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan ibu bersalin yaitu sebesar 99,92%.
- Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan bayi baru lahir yaitu sebesar 79,63%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu sebesar 19,96%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yaitu sebesar 99,59%.
- Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan balita yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan balita yaitu sebesar 20%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan balita yaitu sebesar 100%.
- Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu sebesar 20%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yaitu sebesar 100%.
- Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan pada usia produktif yaitu sebesar 72,28%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan

- kesehatan pada usia produktif yaitu sebesar 19,90%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan pada usia produktif dasar yaitu sebesar 92,18%.
- g. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan pada usia lanjut yaitu sebesar 78,91%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu sebesar 19,98%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan pada usia lanjut yaitu sebesar 98,89%.
 - h. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan penderita hipertensi yaitu sebesar 65,34%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu sebesar 19,69%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan penderita hipertensi yaitu sebesar 85,04%.
 - i. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan penderita *diabetes militus* yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan penderita *diabetes militus* yaitu sebesar 20%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan penderita *diabetes militus* yaitu sebesar 100%.
 - j. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu sebesar 20%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yaitu sebesar 100%.
 - k. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan orang terduga *tuberkolosis* yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkolosis* yaitu sebesar 20%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberkolosis* yaitu sebesar 100%.
 - l. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Penerima Pelayanan Dasar kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yaitu sebesar 80%, sedangkan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan kesehatan orang dengan risiko t terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yaitu sebesar 20%, sehingga total Indeks SPM Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yaitu sebesar 100%.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Total Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 11 Total Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks (IP Layanan Mutu) + SPM IP	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	99,92%	TUNTAS UTAMA
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,59%	TUNTAS UTAMA
4.	Pelayanan kesehatan balita	100%	TUNTAS PARIPURNA

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks (IP Layanan + IP Mutu) SPM	Kategori Indeks SPM
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	TUNTAS PARIPURNA
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	92,18%	TUNTAS UTAMA
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	98,89%	TUNTAS UTAMA
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	85,04%	TUNTAS MADYA
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	100%	TUNTAS PARIPURNA
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	TUNTAS PARIPURNA
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	100%	TUNTAS PARIPURNA
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	100%	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Nilai rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024 adalah sebesar 97,97% atau termasuk ke dalam kategori TUNTAS UTAMA.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan pada tahun 2024 untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber lain yang sah untuk bidang kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 12 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	-	125.000.000	-
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	-	32.813.000	-
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	196.795.000	-
4.	Pelayanan kesehatan balita	-	156.413.000	-
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	-	99.142.000	-
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	-	163.173.000	-
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	-	27.053.000	-
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	-	6.576.000	-
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes militus	-	6.291.000	-

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	-	11.520.000	-
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	-	62.734.000	-
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	-	73.286.000	-
13.	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya			
	Pengadaan Kartrid TCM	-	831.493.800	-
	Pengadaan Rapid HIV dan reagen Sifilis untuk Skrining Bumil	-	143.942.500	-
	Pengadaan BMHP Thermal paper untuk EKG dan Gel untuk USG	-	19.052.000	-
	Pengadaan BMHP Gula darah	-	329.205.000	-
	Pengadaan Reagen Profil Lipid	-	190.247.000	-
	Pengadaan BMHP SHK	-	80.225.000	-
	Anggaran dari Global Fund untuk penanganan TBC dan HIV	-	-	119.006.400

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan

Total alokasi anggaran yang mendukung penerapan SPM bidang kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2024 adalah sebesar Rp2.673.967.700,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian:

1. APBD Kota Pekalongan Rp2.554.961.300,00 terdiri dari APBD DAU Rp960.796.000,00 dan APBD DAK Non Fisik Rp1.594.165.300,00;
2. Anggaran dari Global Fund untuk penanganan TBC dan HIV sebesar Rp119.006.400,00.

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 13 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekolog	271
2.	Dokter/Dokter Spesialis Anak	270
3.	Dokter/Dokter gigi	299

4.	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	277
5.	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	280
6.	Dokter	253
7.	Bidan	400
8.	Perawat	935
9.	Ahli Gizi	36
10.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	54
11.	Guru PAUD	1.083
12.	Kader Kesehatan	2.220
13.	Tenaga Non Kesehatan (Guru sekolah di jenjang pendidikan dasar)	151
14.	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yang mendukung Pelayanan Dasar Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	1
15.	Ahli teknologi laboratorium medis (ATLM)	133
16.	Tenaga kesehatan Penata Rontgen	41

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Keseluruhan personil yang mendukung capaian SPM Bidang urusan Kesehatan di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat, ahli gizi, tenaga kesehatan masyarakat, guru PAUD, kader kesehatan, tenaga non kesehatan, tenaga non kesehatan terlatih, ahli teknologi laoratorium medis dan tenaga kesehatan penata rontgen.

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Kesehatan, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 14 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Tidak ada.	-
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Tidak ada.	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Tidak ada.	-
4.	Pelaksanaan	
	1. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut: a. Belum semua lansia mengakses pelayanan kesehatan,akses ke	Akan meningkatkan kegiatan sosialisasi / kampanye terkait upaya promosi kesehatan terhadap masyarakat

	faskes maupun posyandu terkendala tidak ada yang mengantar karena satu rumah keluarga bekerja atau dengan alasan lainnya. b. Kurangnya dukungan keluarga dalam pendampingan lansia. Kurangnya dukungan anggaran kegiatan kunjungan rumah pada sasaran lansia. c. Perlu peningkatan kapasitas petugas dan penggalangan komitmen pelayanan lansia sesuai dengan standart terkait Skrining kesehatan. Usia Produktif Belum semua usia produktif melakukan pemeriksaan skrining PTM minimal 1 tahun sekali. 2. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Belum semua penderita hipertensi melakukan pemeriksaaan 12 kali dalam setahun	
5.	Lain-lain	
	Tidak ada	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

4.3. Bidang Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah - masalah penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dijadikan sebagai acuan dalam target pencapaiannya.

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar Pekerjaan Umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 dalam mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 15 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	318.182	1 Tahun	JARINGAN PERPIPAAN		1 Tahun	1.545.081.000
					1. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	41.025		
					2. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	41.025		
					BUKAN JARINGAN PERPIPAAN			
					3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan	36.164		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM			
					4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbusa, tidak berbau	36.164		
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	318.182	1 Tahun	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	77.189	1 Tahun	2.454.741.000
					2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap	1.702		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T			
					3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan	75.487		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Target Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari adalah sebanyak 318.182 orang, atau seluruh warga Kota Pekalongan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.545.081.000,00.
- b. Target Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 318.182 orang, atau seluruh warga Kota Pekalongan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.454.741.000,00.

4.3.3. Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 baik dari anggaran maupun penerima layanan SPM Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 16 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	318.182	318.182	100%	1.545.081.000	1.469.355.614	95,10 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	318.182	318.182	100%	2.454.741.000	1.786.929.458	72,80 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan terkait Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Realisasi Anggaran penerima layanan dasar dan realisasi anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut :

- a. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari,

- dengan target sebanyak 318.182 orang dan realisasi sebanyak 318.182 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Kegiatan tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.545.081.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.469.355.614,00 atau 95,10 %.
- b. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dengan target sebanyak 318.182 orang dan realisasi sebanyak 318.182 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Kegiatan tersebut didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.454.741.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.786.929.458,00 atau 72,80%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 17 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	318.182	318.182	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari				20%
	JARINGAN PERPIPAAN				
	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	41.025	41.025	100%	
	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan	41.025	41.025	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau				
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN				
	3. Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	36.164	36.164	100%	
	4. Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	36.164	36.164	100%	
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	318.182	318.182	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik				20%
	1. Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	77.189	77.189	100%	
	2. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang	1.702	1.702	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T				
	3. Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	75.487	75.487	100%	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan

- Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut :
- a. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu sebesar 20%.
 - b. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik yaitu sebesar 20%.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 18 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan data di atas, maka rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024 adalah sebesar 100% atau termasuk kategori TUNTAS PARIPURNA.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan pada tahun 2024 untuk penerapan dan pencapaian SPM Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber lain yang sah untuk Bidang Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 19 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	-	1.545.081.000,00	202.200.000,00
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	-	2.454.741.000,00	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, 2024

Jumlah total alokasi anggaran yang mendukung penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan pada tahun 2024 sebesar Rp4.202.022.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. APBD DAU sebesar Rp1.683.822.000,00;
- 2. APBD DAK FISIK sebesar Rp2.316.000.000,00;
- 3. CSR dari Bank Jateng sebesar Rp172.200.000,00; dan
- 4. CSR dari Perusahaan Mie Gacoan sebesar Rp30.000.000,00.

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum di Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 20 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Personil yang terlibat langsung	Personil pendukung	Total Personil
1	Strata 2	1		1
2	Strata 1	4	12	16
3	D III	-	1	1
4	SLTA	1	2	3
Jumlah		6	15	21

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, 2024

Dukungan personil atau jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan sebanyak 42 orang.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum, beserta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 21 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Pengumpulan data memerlukan support dan dukungan dengan pihak eksternal OPD, yang terkadang sulit dikendalikan kesiapan dan keberadaan datanya	Koordinasi dengan pihak eksternal OPD terkait pengumpulan data yang dibutuhkan
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Untuk penyediaan air bersih penghitungan kebutuhan membutuhkan koordinasi dengan pihak eksternal OPD (PDAM)	Koordinasi dengan pihak eksternal OPD (PDAM) terkait penghitungan kebutuhan
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Mebutuhkan kerjasama secara aktif dengan CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM	Inventarisasi dan koordinasi dengan badan usaha yang memiliki potensi meningkatkan mutu SPM melalui CSR
4.	Pelaksanaan	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALDT, SPALDS dan IPLT	Pertimbangkan Pembangunan infrastruktur secara regional
5.	Lain-lain	
	Pada mutu layanan penyediaan pengolahan limbah domestik hanya ada untuk kawasan pedesaan yang tidak bisa dilakukan tutup mutu, karena OPD kami berada di kawasan perkotaan, sehingga menurunkan capaian SPM kami	Dilakukan pengisian akses layak limbah domestik wilayah perkotaan

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, 2024

4.4. Bidang Perumahan Rakyat Dan Permukiman

Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib Bidang Perumahan Rakyat ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah penyediaan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.
- 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian

Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 dalam mencapai SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 22 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	1 tahun	1. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	1 tahun	60.000.000
					2. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0		
					3. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0		
					4. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0		
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi	22	1 tahun	1.Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	22	1 tahun	232.061.000
					a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	0		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
	Daerah kabupaten/ kota	penyediaan rumah layak huni			b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	0		
					c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	22		
					2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	8		

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil pengumpulan data pada tahapan penerapan SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat, pada tahun 2024 di Kota Pekalongan tidak ada rumah warga yang rusak akibat bencana alam sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Permukiman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat. Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, maka target Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota yaitu jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebanyak 0 rumah. Meskipun tidak ada rumah korban bencana yang memerlukan rehabilitasi, namun Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasi anggaran sebesar Rp232.061.000,00 sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu terjadi bencana.
- Target Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni adalah sebanyak 22 warga negara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000,00.

4.4.3. Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 baik dari anggaran maupun penerima layanan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 23 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	100%	232.061.000	11.803.000	5,09%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	22	22	100%	60.000.000	49.400.000	82,33%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan, 2024

Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Realisasi Anggaran pelayanan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- Realisasi penerima layanan dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota yaitu yaitu jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan target 0 dan realisasi 0. Meskipun target dan realisasi 0 (nol), akan tetapi karena Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan tahapan penerapan SPM urusan bidang Perumahan Rakyat dan telah mengalokasikan anggaran untuk layanan SPM ini, maka sesuai ketentuan yang berlaku persentase capaian layanan SPM tersebut adalah sebesar 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung capaian layanan SPM ini sebesar adalah sebesar Rp232.061.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp11.803.000,00 atau 5,09%.
- Realisasi penerima layanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni dengan target sebanyak 22 warga dan realisasi sebanyak 22 warga atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan alokasi anggaran yang mendukung capaian layanan SPM tersebut adalah sebesar Rp60.000.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp49.400.000,00 atau 82,33%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan dan Mutu Minimal SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024 di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 24 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	0	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota				20%
	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	100%	
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	0	100%	
	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	0	100%	
	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	100%	
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	22	22	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota				20%
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	22	22	100%	
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	0	0	100%	
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	0	0	100%	
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	22	22	100%	
	2. Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	8	8	100%	

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan, 2024

Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota yaitu sebesar 20%.
- b. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yaitu sebesar 20%.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 25 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan

Nilai rata-rata Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 secara keseluruhan adalah 100% dengan kategori indeks TUNTAS PARIPURNA.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan pada tahun 2024 untuk penerapan dan pencapaian SPM Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber lain yang sah untuk bidang perumahan rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 26 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	-	232.061.000	1.278.000.000
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	-	60.000.000	-
3.	Anggaran Kegiatan Lainnya			
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	10.000.000	-
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	-	25.000.000	-
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	-	9.280.000	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan

Total alokasi anggaran yang tersedia yang digunakan untuk mendukung penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp1.614.341.000,00 dengan rincian:

- 1. APBD Kota Pekalongan sebesar Rp336.341.000,00;
- 2. APBD Provinsi Jawa Tengah (Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota) sebesar Rp1.070.000.000,00;
- 3. CSR dari Bank Jateng sebesar Rp120.000.000,00;
- 4. CSR dari BAZNAS sebesar Rp80.000.000,00; dan
- 5. CSR dari LAZIZMU sebesar Rp8.000.000,00.

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat di Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 27 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata 2	2
2.	Strata 1	30
3.	D-III	4
4.	SLTA	3
JUMLAH		39

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan, 2024

Jumlah personil pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat adalah sebanyak 39 orang.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 28 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Kesulitan dalam melengkapi BNBA secara detail sesuai dengan isian form, baik itu RT/RW, NIK, jumlah anggota keluarga, luas bangunan, luas tanah. Serta pemetaan lokasi rawan bencana di Kota Pekalongan.	Melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan pemangku wilayah (RT/RW) setempat agar mendapat data yang valid Pemetaan daerah rawan bencana harus berkoordinasi dengan BPBD.
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Kesulitan dalam menghitung kebutuhan Pembangunan rumah bagi korban bencana dan	Penganggaran berdasarkan kebutuhan penghitungan rata-rata

No.	Permasalahan	Solusi
	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana karena kegiatan kebencanaan dan lokasi yang terjadi bencana alam sifatnya insidentil.	standar pembangunan rumah untuk korban bencana
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Tidak Ada	-
4.	Pelaksanaan	
	Tidak Ada	-
5.	Lain-lain	
	Tidak Ada	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan, 2024

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penanganan bencana dan pemadam kebakaran sesuai petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

1.4.2 Target Pencapaian

Pada tahun 2024 Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan target dalam mencapai SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. 29 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	420	1 tahun	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	315	1 tahun	6.587.360.000
					2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	19		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Sat linmas)	170		
					4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	1		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0		
					6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0		
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	318.182	1 tahun	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1 tahun	59.265.000
					2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	318.182		
					3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan	2.150		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)			
					4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	8		
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	318.182	1 tahun	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	724	1 tahun	173.711.000
					2. Peningkatan kapasitas personil/Sum ber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	2.397		
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	318.182	1 tahun	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya a koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan	1	1 tahun	1.614.215.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					gan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)			
					2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1.920		
					3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1		
					4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0		
					5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	30		
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	55	1 tahun	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan	56	1 tahun	1.012.225.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/re dkar)			
					2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4		
					3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	241		
					4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah	10		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)			
					5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	59		
					6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	59		

Sumber : Sat.Pol.P3KP dan BPBD Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Target Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada adalah sebanyak 420 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.587.360.000,00.
- b. Target Pelayanan informasi rawan bencana yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah sebanyak 318.182 orang dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.265.000,00.
- c. Target Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah sebanyak 318.182 orang dengan anggaran alokasi sebesar Rp173.711.000,00.
- d. Target Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah sebanyak 318.182 orang, atau seluruh warga Kota Pekalongan yang terdampak bencana dan dievakuasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.614.215.000,00.

- e. Target Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah sebanyak 55 layanan kejadian kebakaran atau seluruh kejadian kebakaran yang terjadi pada tahun 2024 sudah terlayani, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.012.225.000,00.

1.4.3 Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 baik dari anggaran maupun penerima layanan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 30 Realisasi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	420	420	100%	6.587.360.000	6.518.909.278	98,96 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	318.182	318.182	100%	59.265.000	45.830.000	77,33 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	318.182	318.182	100%	173.711.000	162.204.900	93,38 %
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	318.182	318.182	100%	1.614.215.000	1.562.845.526	96,81%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55	55	100%	1.012.225.000	1.005.314.356	99,32 %
Dana siap pakai BNPB					250.000.000	250.000.000	100 %

Sumber : Sat.Pol.P3KP dan BPBD Kota Pekalongan

Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Realisasi Anggaran pelayanan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yaitu jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dengan target sebanyak 420 orang dan realisasi sebanyak 420 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di Kota Pekalongan berjalan lancar, aman dan terkendali, sehingga tidak menimbulkan adanya dampak kerugian bagi seluruh warga Kota Pekalongan baik kerugian materiil maupun immateriil. Sedangkan anggaran yang mendukung capaian

- layanan dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp6.587.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.518.909.278,00 atau 98,96%.
- b. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan informasi rawan bencana yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dengan target sebanyak 318.182 orang dan realisasi sebanyak 318.182 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan anggaran sebesar Rp59.265.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp45.830.000,00 atau 77,33 %.
 - c. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan target sebanyak 318.182 orang dan realisasi sebanyak 318.182 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan anggaran sebesar Rp173.711.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp162.204.900,00 atau 93,38%.
 - d. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan target sebanyak 318.182 orang dan realisasi sebanyak 318.182 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, dengan anggaran sebesar Rp1.614.215.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.562.845.526,00 atau 96,81%.
 - e. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dengan target sebanyak 55 layanan dan realisasi sebanyak 55 layanan atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%, yaitu seluruh warga Kota Pekalongan, dengan anggaran sebesar Rp1.012.225.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp1.005.314.356,00 atau 99,32%.

Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp250.000.000,00,00 atau 100%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 31 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	420	420	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum				20%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara(jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	315	315	100%	
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkara*(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	19	19	100%	
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	170	170	100%	
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	1	1	100%	
	5. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	100%	
	6. Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	100%	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	318.182	318.182	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pelayanan informasi rawan bencana				20%
	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana. (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	100%	
	2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	318.182	318.182	100%	
	3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	2.150	2.150	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	8	8	100%	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	318.182	318.182	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana				20%
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	724	724	100%	
	2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	2.397	2.397	100%	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	318.182	318.182	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana				20%
	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	100%	
	2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1920	1920	100%	
	3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	100%	
	4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0	0	100%	
	5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	30	30	100%	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55	55	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				19,94%
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	56	55	98,21%	
	2. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	4	4	100%	
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	241	241	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	10	10	100%	
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	59	59	100%	
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	59	59	100%	

Sumber : Sat.Pol.P3KP dan BPBD Kota Pekalongan, 2024

Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan ketentraman dan ketertiban umum yaitu sebesar 20%.
- b. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan informasi rawan bencana yaitu sebesar 20%.
- c. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu sebesar 20%.
- d. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu sebesar 20%.
- e. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yaitu sebesar 19,94%.

Indeks Pencapaian Mutu Minimal pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tidak mencapai 20% karena dari 56 kejadian kebakaran, terdapat 1 kejadian kebakaran yang respon timenya lebih dari 15 menit. Hal ini terjadi akibat terkendala adanya kereta yang lewat, sehingga kendaraan pemadam kebakaran tidak dapat menerobos pintu perlintasan kereta api.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 32 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM

1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	TUNTAS PARIPURNA
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	TUNTAS PARIPURNA
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	TUNTAS PARIPURNA
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	99,94%	TUNTAS UTAMA

Sumber : Sat.Pol.P3KP dan BPBD Kota Pekalongan

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 secara keseluruhan adalah 99,98% dengan kategori indeks TUNTAS UTAMA.

1.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan pada tahun 2024 untuk penerapan dan pencapaian SPM Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber lain yang sah untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 33 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	-	6.587.360.000	-
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	-	59.265.000	250.000.000
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	173.711.000	
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	1.614.215.000	
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	1.012.225.000	-

Sumber : Sat.Pol.P3KP dan BPBD Kota Pekalongan, 2024

Selain anggaran yang bersumber dari APBD, pelayanan SPM Urusan Bidang Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana juga mendapat dukungan anggaran dari BNPB sebesar Rp250.000.000,00. Sehingga total alokasi anggaran yang tersedia yang digunakan untuk mendukung penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp9.696.776.000,00.

1.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4. 34 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketentraman Umum Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		ASN	NON ASN
1	Magister (S2)	3 Orang	-
2	Sarjana (S1)	7 Orang	19 Orang
3	D-III	3 Orang	7 Orang
4	SMA	7 Orang	92 Orang
5	SMP	3 Orang	-
6	SD	1 Orang	1 Orang

Sumber : Sat.Pol.P3KP Kota Pekalongan, 2024

Jumlah dukungan personil pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebanyak 143 orang yang terdiri dari 24 orang ASN Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekalongan dan 119 Non ASN.

Sub Urusan Bencana

Tabel 4. 35 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Umum Sub Urusan Bencana Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Magister (S2)	1
2.	Sarjana (S1)	15
3.	D-III	4
4.	SMA Sederajat	22
5.	SMP Sederajat	4
6.	SD Sederajat	2
JUMLAH		48

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, 2024

Jumlah personil yang mendukung pemenuhan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana adalah sebanyak 48 orang tenaga ASN.

Selain itu pada saat penanganan bencana, BPBD Kota Pekalongan mendapatkan dukungan personil aktif sebagai petugas penanganan bencana dari relawan dan masyarakat.

Sub Urusan Kebakaran

Tabel 4. 36 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		ASN	NON ASN
1.	Magister (S2)	3 Orang	-
2.	Sarjana (S1)	1 Orang	2 Orang
3.	SMA Sederajat	7 Orang	15 Orang
4.	SMP Sederajat	5 Orang	1 Orang
5.	SD Sederajat	1 Orang	-

Sumber : Sat.Pol.P3KP Kota Pekalongan, 2024

Jumlah personil pemenuhan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran adalah sebanyak 148 orang, terdiri dari 17 orang ASN petugas Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja, 18 orang pegawai Non ASN sebagai petugas pemadam kebakaran dan mendapatkan dukungan personil dari relawan pemadam kebakaran sebanyak 113 orang.

1.4.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 37 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	
	Belum adanya data penduduk yang memuat nama dan alamat sehingga kesulitan untuk melakukan pengumpulan data secara detail	Adanya koordinasi di tingkat Pusat, sehingga aturan terkait data penduduk yang memuat nama dan alamat dapat diperoleh dengan mudah oleh daerah.
	Belum terintegrasinya data pilah kependudukan dengan data geospasial sehingga tidak bisa melakukan pengumpulan data secara akurat	Dilakukan integrasi data pilah kependudukan dengan data geospasial.
	Pengumpulan data kurang detail seperti data NIK, No.KK, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir warga negara yang berada dalam radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda dan Perkada, saat dilokasi penegakan perda dan perkada, petugas kesulitan mendapatkan data tersebut karena merupakan data pribadi	Perlu adanya pembinaan lebih lanjut kepada masyarakat dalam data yang dikumpulkan saat penegakan Perda serta kurangnya kepercayaan masyarakat dalam keamanan privasi data yang diberikan, sehingga perlu adanya penjaminan keamanan data yang diberikan oleh Kemendagri.

No.	Permasalahan	Solusi
	yang bisa saja disalahgunakan ketika data itu diinput.	
2.	Penghitungan Kebutuhan	
	Pengumpulan data yang kurang detail berdampak pada penghitungan kebutuhan yang mungkin berbeda dengan kebutuhan faktual	Pengumpulan data dilakukan lebih detail.
	Perubahan cuaca yang sulit diprediksi secara akurat mengakibatkan prediksi kejadian bencana berbeda dengan kejadian sesungguhnya. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan pelayanan akan berbeda dengan kebutuhan dilapangan.	Lebih cermat dalam memprediksi perubahan cuaca yang terjadi.
3.	Perencanaan dan Penganggaran	
	Ketersediaan data yang minim membuat perencanaan dan penganggaran tidak bisa dilakukan dengan akurat sesuai dengan kebutuhan real	Penyediaan data yang lebih baik.
4.	Pelaksanaan	
	Prediksi cuaca yang tidak akurat menyebabkan peningkatan kejadian bencana pada waktu yang tidak biasanya. Hal ini menyebabkan ketidaksiapan penanganan secara optimal.	Lebih cermat dan akurat dalam memprediksi cuaca yang terjadi.
	Sepanjang Tahun 2024 dari total 56 kejadian kebakaran, 55 diantaranya dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimal waktu tanggap 15 menit, waktu tanggap tersebut dihitung sejak diterimanya laporan hingga Pemadam Kebakaran tiba di lokasi kejadian dan siap melakukan pemadaman api. Terdapat 1 kejadian yang dicapai dalam waktu 17 menit sehingga tidak dapat memenuhi SPM yang dipersyaratkan, hal tersebut dikarenakan pada saat kejadian tersebut terjadi kebakaran yang cukup besar di waktu yang hampir bersamaan dan armada truk Damkar sedang mengisi ulang tangki air serta kemudian terdapat Kereta Api yang melintas sehingga menghambat perjalanan menuju ke lokasi kejadian kebakaran yang akan ditangani.	Perlu adanya penambahan pos Damkar di sisi selatan rel Kereta Api agar tidak terkendala oleh Kereta Api yang melintas pada saat terjadi kebakaran karena kondisi saat ini Mako Damkar Kota Pekalongan berada di Jl. Tentara Pelajar No.1 yang berada di sisi utara rel Kereta Api, disamping itu berdasarkan data yang kami miliki intensitas kejadian kebakaran yang terjadi mayoritas berada di sisi selatan rel Kereta Api mengingat di wilayah Kota Pekalongan bagian selatan banyak ditemui industri rumahan seperti produksi batik, tempe, tahu, mebel, dll yang memiliki potensi bahaya kebakaran cukup tinggi ditambah dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan akses jalan yang sempit.
	Dengan melihat data dan fakta diatas dapat dikatakan permasalahan utama pemenuhan SPM sub Urusan Kebakaran di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lokasi Mako/Pos Damkar yang hanya 1 terletak di sisi utara rel Kereta Api (Jl. Tentara Pelajar No.1) sehingga sewaktu-waktu apabila terjadi kebakaran di sisi selatan rel Kereta Api dapat terhambat penanganannya, ditambah lokasi sumber air yang hanya terdapat di Kantor PDAM juga terletak di sisi utara rel Kereta Api sehingga apabila hendak mengisi ulang tangki air armada Truk Damkar juga cukup jauh jaraknya ditambah kendala yang	Perlu adanya penambahan pos Damkar di sisi selatan rel Kereta Api agar tidak terkendala oleh Kereta Api yang melintas pada saat terjadi kebakaran karena kondisi saat ini Mako Damkar Kota Pekalongan berada di Jl. Tentara Pelajar No.1 yang berada di sisi utara rel Kereta Api, disamping itu berdasarkan data yang kami miliki intensitas kejadian kebakaran yang terjadi mayoritas berada di sisi selatan rel Kereta Api mengingat di wilayah Kota Pekalongan bagian selatan banyak ditemui industri rumahan seperti produksi batik, tempe, tahu, mebel, dll yang memiliki potensi bahaya kebakaran cukup tinggi

No.	Permasalahan	Solusi
	sama apabila terdapat kereta api yang melintas akan menghambat untuk kembali menuju lokasi kejadian kebakaran. Dengan demikian perlu adanya tambahan minimal 1 Mako/Pos Damkar untuk menjangkau/menangani kejadian kebakaran yang terjadi di sisi selatan rel Kereta Api.	ditambah dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan akses jalan yang sempit.
5.	Lain-lain	
	Permasalahan lain terkait penerapan SPM sub Urusan Kebakaran di Kota Pekalongan adalah jumlah kerugian material yang masih cukup tinggi meskipun bila melihat waktu tanggap sebagian besar telah dapat dicapai maksimal dalam 15 menit, hal tersebut disebabkan oleh kurang maksimalnya sarpras yang tersedia baik selang, nozzle, APD petugas, dan peralatan lain yang diperlukan untuk menangani kejadian kebakaran dengan maksimal sehingga dapat menekan jumlah kerugian aset maupun kemungkinan adanya korban jiwa	Perlu peningkatan kualitas/peremajaan sarana prasarana pemadaman kebakaran yang ada agar dapat lebih maksimal dalam melakukan kegiatan pemadaman, hal tersebut dikarenakan peralatan yang ada telah cukup berumur sehingga kurang maksimal untuk digunakan dalam memadamkan api seperti selang yang bocor, nozzle yang macet, armada yang telah cukup berumur. Hal tersebut menyebabkan kerugian material masih tinggi atau tidak maksimal untuk menyelamatkan aset yang ada pada saat terjadi kebakaran. Dapat dikatakan meskipun dapat cepat sampai di lokasi pada saat terjadi kebakaran namun untuk proses pemadaman belum maksimal karena permasalahan tersebut.

Sumber : Sat.Pol.P3KP dan BPBD Kota Pekalongan

4.6. Bidang Urusan Sosial

Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar. Bidang Urusan Sosial merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Sosial di Kota Pekalongan. Penerapan dan pencapaian dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota sosial dan penanganan sesuai petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1.4.7 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah

Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

1.4.8 Target Pencapaian

Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 telah menetapkan target dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 38 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	207	1 tahun	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	115	1 tahun	1.244.173.000
					2. Penyediaan permakanan	207		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)			
					3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	90		
					4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	207		
					5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan	6		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)			
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	207		
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ola hraga/ outbound/gym ; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial,	207		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					alat peraga, alat tulis)			
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	95		
					9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	99		
					10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	207		
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas	207		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					terlantar untuk tujuan reunifikasi)			
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	95		
					13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	4		
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	26	1 tahun	1. Layanan data dan pengaduan, layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan	1	1 tahun	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial			
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	25		
					3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	26		
					4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian	26		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					alas kaki dan kebutuhan lainnya)			
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	26		
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ola hraga/ outbound/gym ; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	26		
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak	26		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)			
					8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	4		
					9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	26		
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	26		
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan	26		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			
					12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	0		
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	39	1 tahun	1. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	22	1 tahun	
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat	16		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanjar)			
					3. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	39		
					4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	39		
					5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan	12		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kebutuhan penerima disabilitas)			
					6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	39		
					7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym ; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	39		
					8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlanjar (pemberian bimbingan sosial kepada	8		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					keluarga lanjut usia terlan- tar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/na ma lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masy arakat)			
					9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependuduka n/Bukti kepemilikan NIK	13		
					10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas /klinik/rumah sakit)	39		
					11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlan- tar untuk tujuan reunifikasi)	39		
					12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlan- tar dengan keluarga yang	8		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			
					13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	11		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	32	1 tahun	1. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	11	1 tahun	
					2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan	21		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis)			
					3. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	32		
					4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	32		
					5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan,	32		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
					6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/ola hraga/ outbound/gy m; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	32		
					7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial,	29		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)			
					8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	10		
					9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	32		
					10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	32		
					11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan	29		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)			
					12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	0		
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	2.120	1 tahun	1. Penyediaan permakanaan (penyediaan permakanaan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	2.120	1 tahun	448.352.000
					2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian	2.120		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)			
					3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	3		
					4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	1.070		
					5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/ko munitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari	2.120		

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/ situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/ trauma healing, dsb.)			

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa target pelayanan SPM Bidang Sosial di Kota Pekalongan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Target Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yaitu jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti adalah sebanyak 207 orang.
- b. Target pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yaitu jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti adalah sebanyak 26 orang.
- c. Target pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti yaitu Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti adalah sebanyak 39 orang.
- d. Target pelayanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yaitu jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti adalah sebanyak 32 orang.
- e. Total alokasi anggaran untuk pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, pelayanan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dan pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti adalah sebesar Rp1.244.173.000,00.
- f. Target perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota yaitu jumlah warga negara korban bencana kabupaten/ kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota adalah sebanyak 2.120 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp448.352.000,00.

1.4.9 Realisasi

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2024 baik dari anggaran maupun penerima layanan SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 39 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	207	207	100%	1.244.173.000	1.181.358.653	94,95 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	26	26	100%			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	39	39	100%			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	32	32	100%			
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.120	2.120	100%	448.352.000	378.014.351	84,31 %

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2024

Realisasi Capaian Penerima Layanan Dasar dan Realisasi Anggaran pelayanan SPM Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi penerima layanan dasar Pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yaitu Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan target sebanyak 207 orang dan realisasi sebanyak 207 orang atau 100% sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%.
- b. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yaitu Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dengan target sebanyak 26 orang dan realisasi sebanyak 26 orang atau 100% sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%.
- c. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti yaitu Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial

- di luar panti dengan target sebanyak 39 orang dan realisasi sebanyak 39 orang atau 100% sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%.
- d. Realisasi penerima layanan dasar pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yaitu Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan target sebanyak 32 orang dan realisasi sebanyak 32 orang atau 100% sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%.
- e. Adapun total alokasi anggaran untuk pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dan pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti adalah sebesar Rp1.244.173.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.181.358.653,00 atau 94,95%.
- f. Realisasi pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota yaitu jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota dengan target sebanyak 2.120 orang dan realisasi sebanyak 2.120 orang atau 100%, sehingga Indeks Pencapaian (IP) layanannya sebesar 80%. Sedangkan anggaran yang mendukung capaian SPM pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota adalah sebesar Rp448.352.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp378.014.351,00 atau 84,31%.

Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Sosial Tahun 2024 di Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 40 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerima Layanan Dasar dan Mutu Minimal SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	207	207	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti				20%
	1. Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan	115	115	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
	2. Penyediaan permakanaan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanaan/orang/hari)	207	207	100%	
	3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada disabilitas terlantar)	90	90	100%	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	207	207	100%	
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	6	6	100%	
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	207	207	100%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/	207	207	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	95	95	100%	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	99	99	100%	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	207	207	100%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	207	207	100%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	95	95	100%	
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang	4	4	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)				
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	26	26	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti				20%
	1. Layanan data dan pengaduan, layanan data yang diberikan kepada anak terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	1	1	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar)	25	25	100%	
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	26	26	100%	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	26	26	100%	
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	26	26	100%	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara	26	26	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)				
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	26	26	100%	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	4	4	100%	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	26	26	100%	
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	26	26	100%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	26	26	100%	
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang	0	0	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)				
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti	39	39	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di luar panti				20%
	1. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada lanjut usia terlanter untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	22	22	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlanter)	16	16	100%	
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	39	39	100%	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	39	39	100%	
	5. Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan	12	12	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	kebutuhan penerima disabilitas)				
	6. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	39	39	100%	
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	39	39	100%	
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/ kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	8	8	100%	
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	13	13	100%	
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas /klinik/rumah sakit)	39	39	100%	
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	39	39	100%	
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan	8	8	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)				
	13. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	11	11	100%	
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	32	32	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti				20%
	1. Layanan data dan pengaduan (layanan data yang diberikan kepada tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial)	11	11	100%	
	2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat (layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis)	21	21	100%	
	3. Penyediaan permakanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	32	32	100%	
	4. Penyediaan sandang (berupa pembelian pakaian,	32	32	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami <i>bedridden</i> , pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)				
	5. Penyediaan perbekalan kesehatan (obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	32	32	100%	
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social (bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/ outbound/gym; bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual; bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	32	32	100%	
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	29	29	100%	
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	10	10	100%	
	9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar	32	32	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	puskesmas/klinik/rumah sakit)				
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	32	32	100%	
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	29	29	100%	
	12. Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	0	0	100%	
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	2.120	2.120	100%	80%
	Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Pelayanan Dasar Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kota.				20%
	1. Penyediaan permakanan (penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	2.120	2.120	100%	
	2. Penyediaan sandang (pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	2.120	2.120	100%	
	3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi (tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan	3	3	100%	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%) Indeks Pencapaian Mutu Minimal (5x 20%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
	sementara lainnya sesuai kebutuhan)				
	4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan (merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	1.070	1.070	100%	
	5. Pelayanan dukungan Psikososial (upaya/ dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/ komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing dsb.)	2.120	2.120	100%	

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2024

Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal Layanan Dasar Mutu Minimal Pelayanan Dasar SPM Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti yaitu sebesar 20%.
- b. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti yaitu sebesar 20%.
- c. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti yaitu sebesar 20%.
- d. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti yaitu sebesar 20%.
- e. Persentase Indeks Pencapaian (IP) Mutu Minimal pelayanan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota yaitu sebesar 20%.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 41 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	TUNTAS PARIPURNA
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	TUNTAS PARIPURNA
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	TUNTAS PARIPURNA
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	TUNTAS PARIPURNA
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota.	100%	TUNTAS PARIPURNA

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2024

Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Sosial Tahun 2024 secara keseluruhan adalah 100% dengan kategori indeks TUNTAS PARIPURNA.

1.4.10 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD Kota Pekalongan pada tahun 2024 untuk penerapan dan pencapaian SPM Kota Pekalongan yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber lain yang sah untuk bidang sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 42 Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)		
		APBN	APBD	Sumber Lain Yang Sah
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	-	1.244.173.000	-
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	-		-
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	-		-
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	-		-
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	-	448.352.000	-
6.	CSR :	-	-	-
	CSR BRI PEDULI	-	-	19.478.000
	CSR BANK BRI	-	-	10.000.000

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

Jumlah total alokasi anggaran untuk mendukung penerapan SPM Bidang Sosial adalah sebesar Rp1.722.003.000,00 dengan rincian:

- 1. APBD Kota Pekalongan sebesar Rp1.692.525.000,00;
- 2. CSR BRI PEDULI sebesar Rp19.478.000,00; dan
- 3. CSR BANK BBRI sebesar Rp10.000.000,00.

1.4.11 Dukungan Personil

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial di Kota Pekalongan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 43 Dukungan Personil Pemenuhan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Magister (S2)	1
2.	Sarjana (S1)	3
3.	Diploma (D3)	2
4.	SMA Sederajat	2
5.	TAGANA	20
6.	PKH	23
7.	Petugas Pengelola RPSBM	28
8.	Petugas Profesional RPSBM	4
JUMLAH		83

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2024

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber daya manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial pada tahun 2024 sebanyak 83 orang terdiri dari 28 orang pengelola sosial RPSBM, 4 orang petugas profesional RPSBM, 20 orang anggota TAGANA (Taruna Siaga Bencana), 23 orang PKH (Pendamping Program Keluarga Harapan) dan 8 orang PNS di Bidang Rehabilitasi Sosial.

1.4.12 Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Sosial, baik internal maupun eksternal, serta solusi maupun penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 44 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pengumpulan Data	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil supaya dapat dibantu perekaman identitas penerima manfaat
	Biodata dari kelayan yang tidak mempunyai identitas lengkap seperti KTP	
2.	Penghitungan Kebutuhan	Melakukan koordinasi dengan penanggungjawab Lokasi pengungsi agar dilakukan asesmen kebutuhan kepada pengungsi
	Kesulitan dalam mempredikasi kebutuhan dalam korban bencana	
3.	Perencanaan dan Penganggaran	

No.	Permasalahan	Solusi
	Perencanaan kebutuhan dasar yang masih belum tercapai	Merencanakan dengan baik kebutuhan anggaran yang diperlukan kemudian mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
4.	Pelaksanaan Ada beberapa kecil penerima manfaat berasal dari luar daerah kota pekalonga	1. Melakukan asesmen kepada penerima manfaat terkait asal usul, kemudian menghubungkan dengan Dinas Sosial sesuai asal daerah 2. Merujuk penerima manfaat ke panti milik pemerintah
5.	Lain-lain Kapasitas tempat yang belum memadai	Merencanakan kebutuhan untuk tempat hunian sementara penerima manfaat kemudian mengusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah agar dapat melakukan rehab tempat

Sumber : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2024

4.7. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Pada tahun 2024 Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kota Pekalongan dilaksanakan dengan didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah dipetakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.4.13 Bidang Urusan Pendidikan

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp23.424.810.000,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 45 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.912.123.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.110.341.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	10.000.000
		Pengadaan Mebel PAUD	15.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	327.752.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	55.440.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	293.590.000
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	100.000.000
2.	Pendidikan Dasar	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	5.468.101.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	714.005.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	117.153.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	116.978.000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	67.230.000
		Pembangunan Ruang Kelas Baru	400.000.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	26.250.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.026.485.000
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.310.284.000
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.423.725.000
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik	182.350.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	210.665.000
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	27.720.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	309.656.000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	38.830.000
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	117.338.000
3.	Pendidikan Kesetaraan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.301.922.000
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	967.000.000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	40.000.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	83.160.000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	101.762.000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.000.000
		Pengadaan Mebel Sekolah	60.000.000
4.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Lainnya		
	Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD		23.780.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		28.218.000
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		982.282.000
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		9.398.100.000

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Selain program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat sumber anggaran lain di luar APBD Kota Pekalongan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan, yaitu CSR dari Bank Jateng berupa bantuan perlengkapan bagi siswa miskin jenjang Sekolah Dasar sebesar Rp250.000.000,00.

1.4.14 Bidang Urusan Kesehatan

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.554.961.300,00 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 46 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	125.000.000
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.813.000
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	196.795.000
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	156.413.000
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	99.142.000
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	163.173.000
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.053.000
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	6.576.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	6.291.000
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.520.000
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	62.734.000
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	73.286.000
13.	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya		
	Pengadaan Kartrid TCM		831.493.800
	Pengadaan Rapid HIV dan reagen Sifilis untuk Skrining Ibu Hamil		143.942.500
	Pengadaan BMHP Thermal paper untuk EKG dan Gel untuk USG		19.052.000
	Pengadaan BMHP Gula darah		329.205.000
	Pengadaan Reagen Profil Lipid		190.247.000
	Pengadaan BMHP SHK		80.225.000

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Selain program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat sumber anggaran lain di luar APBD Kota Pekalongan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan yaitu Anggaran dari *Global Fund* untuk penanganan TBC dan HIV sebesar Rp119.006.400,00.

1.4.15 Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.999.822.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 47 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.545.081.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.545.081.000
		Perluasan Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.545.081.000
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.454.741.000
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.454.741.000
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	2.454.741.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, 2024

Selain program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat sumber anggaran lain di luar APBD Kota Pekalongan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum, yaitu :

- 1. CSR dari PT. Bank Jawa Tengah sebesar Rp172.200.000,00; dan
- 2. CSR dari Perusahaan Mie Gacoan Rp30.000.000,00.

1.4.16 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp336.341.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penerapan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 48 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	60.000.000
2.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	132.061.000
		Pembangunan rumah bagi korban bencana	100.000.000
3.	Program, kegiatan dan Sub Kegiatan lainnya		
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana		10.000.000
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator		25.000.000
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana		9.280.000

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman dan Permukiman Kota Pekalongan, 2024

Selain program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat sumber anggaran lain di luar APBD Kota Pekalongan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman, yaitu :

1. Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota (APBD Provinsi Jawa Tengah) sebesar Rp1.070.000.000,00;
2. CSR dari PT. Bank Jawa Tengah sebesar Rp120.000.000,00;
3. CSR dari Badan Zakat Nasional Rp80.000.000,00; dan
4. CSR dari LAZISMU sebesar Rp8.000.000,00.

1.4.17 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9.446.776.000,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar Rp6.587.360.000,00 (enam miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dianggarkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4. 49 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketertiban Umum Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	6.587.360.000
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.492.736.000
		Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	1.976.146.000
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	102.270.000
		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	21.100.000
		Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	123.500.000
		Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	43.000.000
		Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	213.480.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	13.240.000
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.092.693.000
		Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	51.699.000
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.025.994.000
		Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15.000.000
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1.931.000
		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	1.931.000

Sumber : Sat.Pol.P3KP Kota Pekalongan, 2024

Sub Urusan Bencana

Alokasi anggaran dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana adalah sebesar Rp1.847.191.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang dianggarkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4. 50 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	59.265.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	59.265.000
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	173.711.000
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	76.500.000
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	33.911.000

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	63.300.000
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.536.590.000
		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.369.840.000
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	166.750.000
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	
		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	77.625.000
		Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	40.125.000
		Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	37.500.000

Sumber : BPBD Kota Pekalongan, 2024

Selain program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat sumber anggaran lain di luar APBD Kota Pekalongan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana yaitu Dana Siap Pakai (DSP) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Sub Urusan Kebakaran

Alokasi anggaran dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran adalah sebesar Rp1.012.225.000,00 (satu miliar dua belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dianggarkan melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4. 51 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	1.012.225.000
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	826.313.000
		Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	24.750.000
		Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	734.013.000

	Pembinaan aparaturnya pemadam kebakaran	15.000.000
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	7.500.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	11.250.000
	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	33.800.000
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	34.071.000
	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	34.071.000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	97.328.000
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	37.500.000
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	59.828.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	54.513.000
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	54.513.000

Sumber : Sat.Pol.P3KP Kota Pekalongan, 2024

1.4.18 Bidang Urusan Sosial

Pemerintah Kota Pekalongan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.692.525.000,00 (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam APBD Kota Pekalongan Tahun 2024 melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 52 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.692.525.000
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.244.173.000
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Penyediaan permakanan	415.635.000

4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti		
		Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	1.692.525.000
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	448.352.000
		Penyediaan makanan	353.562.000
		Penanganan khusus bagi kelompok rentan	77.000.000
		Pelayanan dukungan Psikososial	17.790.000

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, 2024

Selain program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas, terdapat sumber anggaran lain di luar APBD Kota Pekalongan yang mendukung pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial yaitu:

1. CSR dari BRI Peduli sebesar Rp19.478.000,00; dan
2. CSR dari Bank BRI sebesar Rp10.000.000,00.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Pada tahun 2024, pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan telah sesuai dengan perencanaannya dan dalam pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, terlaksana dengan baik. Kami berharap dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya dapat meningkatkan capaian kinerja untuk kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Pekalongan serta menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Harapan kami bahwa LPPD Kota Pekalongan Tahun 2024 ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan otonomi daerah di masa yang akan datang

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dibuat. Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi Pekalongan sebagai Kota yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas.